



PEMERINTAH  
KABUPATEN KOLAKA



**PERDA KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG**

**RPJMD KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2019 - 2024**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 - 2024**



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019 – 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab V Pasal 7 ayat (1) ditambahkan huruf d, huruf e, dan huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata. cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar;
  - d. asumsi kerangka ekonomi daerah yang tidak sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - e. terjadi perubahan yang mendasar sebagai akibat perubahan kebijakan nasional; dan
  - f. terjadi perubahan capaian sasaran tahunan dan mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah.
2. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI KOLAKA,

T T D,

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

T T D,

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA NOMOR 8/55/2022



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

HASIMIN

NIP. 19670602 198803 1 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2019-2024

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 258 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 260, Pasal 263 ayat (4), Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024.

Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, terdapat dinamika perkembangan daerah maupun nasional dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Kolaka.

Dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dapat dicapai, dengan tetap menjaga keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pada saat RPJMD Tahun 2019-2024.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diatur bahwa pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Adapun yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas

## TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2019 - 2024**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	Hal. i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I.1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I.11
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I.14
1.4. Maksud dan Tujuan .....	I.18
1.5. Sistematika Penulisan .....	I.18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II.1</b>
2.1. Kondisi Umum Daerah .....	II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II.1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II.24
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II.62
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II.106
<b>BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III.1</b>
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu.....	III.1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD .....	III.2
3.1.2. Neraca Daerah .....	III.15
3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu .....	III.19
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran .....	III.20
3.2.2. Analisis Pembiayaan .....	III.21
3.3. Kerangka Pendanaan .....	III.23
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja .....	III.23
3.3.2. APBD Tahun Anggaran 2021 .....	III.31
3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan .....	III.33
<b>BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1. Permasalahan Pembangunan .....	IV.1
4.1.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar .....	IV.1
4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar... ..	IV.4
4.1.3. Urusan Pilihan .....	IV.9
4.1.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	IV.11

4.2. Isu Strategis .....	IV.13
4.2.1. Isu Strategis Internasional .....	IV.13
4.2.2. Isu Strategis Nasional .....	IV.16
4.2.3. Isu Strategis Regional (Prov. Sultra) .....	IV.20
4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kolaka .....	IV.21
<b>BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>V.1</b>
5.1. Visi .....	V.1
5.2. Misi .....	V.3
5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	V.8
5.3.1. Tujuan Pembangunan .....	V.8
5.3.2. Sasaran Pembangunan .....	V.9
<b>BAB VI STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....</b>	<b>VI.1</b>
6.1. Strategi .....	VI.1
6.2. Arah Kebijakan .....	VI.5
6.3. Program Pembangunan Daerah .....	VI.17
<b>BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>VII.1</b>
<b>BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH...</b>	<b>VIII.1</b>
8.1. Indikator Kinerja Utama .....	VIII.1
8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....	VIII.7
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>IX.1</b>

## DAFTAR TABEL

			Hal.
Tabel 2.1	Luas Kecamatan Kab. Kolaka	.....	II.2
Tabel 2.2	Klasifikasi Kemiringan Lereng	.....	II.4
Tabel 2.3	Luas Areal menurut jenis tanah di Kab. Kolaka	.....	II.6
Tabel 2.4	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Kab. Kolaka tahun 2020	.....	II.9
Tabel 2.5	Rencana Penggunaan Lahan 2019-2039	.....	II.12
Tabel 2.6	Perkembangan Populasi Ternak di Kab. Kolaka tahun 2016-2022	.....	II.13
Tabel 2.7	Potensi Sumber daya Perikanan dan tingkat Pemanfaatannya	.....	II.15
Tabel 2.8	Data Potensi Pariwisata	.....	II.16
Tabel 2.9	Data Potensi Bahan Galian di Kab. Kolaka tahun 2020	.....	II.18
Tabel 2.10	Rekapitulasi Kejadian Bencana Kab. Kolaka Tahun 2015-2020	.....	II.20
Tabel 2.11	Kondisi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2020	.....	II.22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020	.....	II.23
Tabel 2.13	Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka TAHUN 2016-2020	.....	II.24
Tabel 2.14	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar ga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka TAHUN 2016-2020	.....	II.26
Tabel 2.15	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.26
Tabel 2.16	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.28
Tabel 2.17	Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.29
Tabel 2.18	Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.30
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Kolaka Tahun 2016–2020	.....	II.35
Tabel 2.20	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.37

Tabel 2.21	Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.39
Tabel 2.22	Realisasi Capaian Kinerja Spm Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2020	.....	II.41
Tabel 2.23	Prevalensi Stunting Kabupaten Kolaka Tahun 2018-2021	.....	II.45
Tabel 2.24	Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSBG di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.59
Tabel 2.25	Capaian Serapan Pencari Kerja di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.60
Tabel 2.26	Capaian Pembangunan Seni dan Budaya di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.61
Tabel 2.27	Indikator kegiatan Kepemudaan di Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.62
Tabel 2.28	APS, APK, APM SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.63
Tabel 2.29	Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.64
Tabel 2.30	Rasio Guru/Murid di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.64
Tabel 2.31	Perkembangan Jumlah Lulusan Sekolah Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.65
Tabel 2.32	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.66
Tabel 2.33	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.67
Tabel 2.34	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kab. Kolaka	.....	II.69
Tabel 2.35	Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.71
Tabel 2.36	Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kolaka	.....	II.72
Tabel 2.37	Perkembangan Layanan Sanitasi dan Air Minum di kabupaten kolaka	.....	II.72
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kab. Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.73
Tabel 2.39	Capain sektor Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.74
Tabel 2.40	Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.75
Tabel 2.41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.76

Tabel 2.42	Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka	.....	II.77
Tabel 2.43	Realisasi Kegiatan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 - 2020	.....	II.77
Tabel 2.44	Realisasi Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.80
Tabel 2.45	Data Pertanahan Milik Pemda di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.81
Tabel 2.46	Volume Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020	.....	II.82
Tabel 2.47	Kondisi Indikator Lingkungan Hidup Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.82
Tabel 2.48	Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.83
Tabel 2.49	Jumlah Lembaga BUMDES di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.84
Tabel 2.50	Perkembangan Status Desa Kabupaten Kolaka	.....	II.84
Tabel 2.51	Cakupan Peserta KB Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020	.....	II.85
Tabel 2.52	Jumlah Peserta KB Per-Alkon sejak tahun 2016 – 2020	.....	II.86
Tabel 2.53	Perkembangan Transportasi Darat Kab. Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.86
Tabel 2.54	Perkembangan Transportasi Darat, Laut, dan Udara Kab.Kolaka tahun 2016-2020	.....	II.87
Tabel 2.55	Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Tahun 2015-2020	.....	II.89
Tabel 2.56	Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kolaka 2015-2020	.....	II.89
Tabel 2.57	Jumlah Pertumbuhan UKM Tahun 2015 – 2020	.....	II.90
Tabel 2.58	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan tahun 2016-2020	.....	II.91
Tabel 2.59	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2020	.....	II.91
Tabel 2.60	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.92
Tabel 2.61	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020	.....	II.92
Tabel 2.62	Jumlah Penyelenggaraan Seni Budaya dan Situs Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.93

Tabel 2.63	Perkembangan Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.98
Tabel 2.64	Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016–2020	.....	II.98
Tabel 2.65	Jumlah Pasar yang terbangun di Kab.Kolaka 2016-2020	.....	II.101
Tabel 2.66	Realisasi Capaian Urusan Perindustrian Kab. Kolaka 2015-2020	.....	II.101
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Tahun 2016 – 2020	.....	II.102
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Kolaka	.....	II.104
Tabel 2.69	Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Kabupaten Kolaka	.....	II.104
Tabel 2.70	Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan pengembangan Kabupaten Kolaka	.....	II.105
Tabel 2.71	Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020	.....	II.105
Tabel 2.72	Perkembangan komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2019	.....	II.106
Tabel 2.73	Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan menurut kelompok Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2020	.....	II.108
Tabel 2.74	Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan menurut kelompok bukan Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2020	.....	II.108
Tabel 2.75	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita sehari (kcal) Menurut kelompok makanan di Kabupaten Kolaka Tahun 2020	.....	II.109
Tabel 2.76	Luasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kab. Kolaka	.....	II.110
Tabel 2.77	Kondisi Infrastruktur Jalan di Kab. Kolaka	.....	II.110
Tabel 2.78	Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kab. Kolaka	.....	II.110
Tabel 2.79	Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.112
Tabel 2.80	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020	.....	II.113
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.3

Tabel 3.2	Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.3
Tabel 3.3	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.4
Tabel 3.4	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.6
Tabel 3.5	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2014-2020	.....	III.8
Tabel 3.6	Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka	.....	III.9
Tabel 3.7	Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka tahun 2014-2020	.....	III.9
Tabel 3.8	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.11
Tabel 3.9	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.14
Tabel 3.10	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.16
Tabel 3.11	Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.18
Tabel 3.12	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.20
Tabel 3.13	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020	.....	III.22
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024	.....	III.26
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024	.....	III.28
Tabel 3.16	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024	.....	III.30
Tabel 3.17	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021	.....	III.31
Tabel 3.18	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	.....	III.34
Tabel 3.19	Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	.....	III.36
Tabel 5.1	Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kabupaten Kolaka	.....	V.5

Tabel 5.2	Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka	.....	V.7
Tabel 5.3	Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024	.....	V.13
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1	.....	VI.1
Tabel 6.2	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2	.....	VI.2
Tabel 6.3	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3	.....	VI.3
Tabel 6.4	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4	.....	VI.4
Tabel 6.5	Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5	.....	VI.4
Tabel 6.6	Arah Kebijakan Pembangunan lima Tahun kedepan	.....	VI.12
Tabel 6.8	Implementasi 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya dan Penjabarannya terhadap Misi	.....	VI.17
Tabel 6.9	Program dengan disertai pendanaan bersifat indikatif yang tersaji	.....	VI.22
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024 Kabupaten Kolaka	.....	VII.3
Tabel 7.2	program prioritas seluruh perangkat daerah Kabupaten Kolaka	.....	VII.6
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama	.....	VIII.2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	.....	VIII.8

## DAFTAR GAMBAR

			Hal.
Gambar	1.1	Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024	I.9
Gambar	1.2	Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I.17
Gambar	2.1	Peta Administrasi Kabupaten Kolaka	II.1
Gambar	2.2	Persentase Luasan Tiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka	II.3
Gambar	2.3	Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah	II.3
Gambar	2.4	Peta Kemiringan Lereng Kab. Kolaka	II.5
Gambar	2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Kolaka	II.7
Gambar	2.6	Peta Hidrologi Kabupaten Kolaka	II.8
Gambar	2.7	Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kolaka	II.10
Gambar	2.8	Persentase Penggunaan Lahan Kab. Kolaka 2020	II.11
Gambar	2.9	Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Kolaka	II.19
Gambar	2.10	Kontribusi masing-masing sektor PDRB (BPS, 2020)	II.25
Gambar	2.11	Capaian Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	II.31
Gambar	2.12	Persentase Penduduk Miskin Kab. Kolaka 2016-2020	II.32
Gambar	2.13	Perkembangan Angka Garis Kemiskinan Kabupaten Kolaka tahun 2016-2020	II.33
Gambar	2.14	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%) Kab. Kolaka 2016 – 2020	II.34
Gambar	2.15	APS Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	II.36
Gambar	2.16	Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Kolaka 2016-2020	II.36
Gambar	2.17	Perkembangan APK Kab. Kolaka 2016 – 2020	II.37
Gambar	2.18	Perkembangan APM Kab. Kolaka 2016– 2020	II.39
Gambar	2.19	Perbandingan Capaian Stunting	II.45
Gambar	2.20	Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Kolaka dan Nasional Tahun 2016 – 2020	II.47

Gambar	2.21	Angka Harapan Hidup Kab. Kolaka 2016-2020	.....	II.48
Gambar	2.22	Perbandingan Angka Kematian Ibu Kab. Kolaka dan Nasional Tahun 2016 – 2020	.....	II.49
Gambar	2.23	Persentase Gizi Buruk Kab. Kolaka 2016 -2020	.....	II.50
Gambar	2.24	Angka Kematian Anak Balita Kab. Kolaka 2016–2020	.....	II.51
Gambar	2.25	Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan /pemeriksaan Kesehatan (K1) Kab. Kolaka 2016-2020	.....	II.53
Gambar	2.26	Persentase Angka Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.54
Gambar	2.27	Persentase Angka Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kab. Kolaka 2016-2020	.....	II.55
Gambar	2.28	Persentase Angka Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.56
Gambar	2.29	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.57
Gambar	2.30	Persentase Warga negara usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.58
Gambar	2.31	Peta Jaringan Jalan Kab. Kolaka (Bappeda Kolaka, 2020)	.....	II.70
Gambar	2.32	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kolaka Tahun 2017-2021	.....	II.78
Gambar	2.33	Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kolaka Tahun 2021	.....	II.79
Gambar	2.34	Kunjungan Perpustakaan 2016 – 2020	.....	II.94
Gambar	2.35	Total Produksi Perikanan Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.96
Gambar	2.36	Produksi Perikanan Budidaya Kab. Kolaka 2016-2020	.....	II.96
Gambar	2.37	Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kolaka 2016 – 2020	.....	II.97
Gambar	2.38	Nilai Perdagangan Antar Pulau Kab.Kolaka 2015-2020 (Rp.000)	.....	II.100
Gambar	2.39	Capaian kinerja bidang keuangan Tahun 2015 – 2020	.....	II.103
Gambar	2.40	Pengeluaran per kapita sebulan (Rp) Kab. Kolaka 2016-2020	.....	II.107

Gambar 2.41	Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020	.....	II.113
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024	.....	VI.6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 258 ayat (2) mengamanatkan bahwa, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus sinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan rencana sebagai permulaan dari siklus perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, sesuai amanat pasal 264 ayat (4) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun RPJMD dan menetapkannya dalam bentuk Perda paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Pasangan H. Ahmad Safei, SH, MH dan H. Muhammad Jayadin, SE, ME yang dilantik pada tanggal 15 Januari 2019, telah melaksanakan kewajibannya menyusun Dokumen RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 dan telah ditetapkan pada tanggal 15 Juli 2019.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selain itu, RPJMD juga memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) RPJMD yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi perencanaan pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan kompensasi program dan kegiatan.

Dalam penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Kolaka menerapkan beberapa pendekatan sebagaimana di atur dalam Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang dimaksud, meliputi :

1. Pendekatan Teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang di bahas bersama DPRD; dan
4. Pendekatan atas bawah (*Top Down*) dan bawah atas (*Bottom Up*) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

Dalam perjalanannya, setelah RPJMD Kabupaten Kolaka ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019, telah terbit beberapa kebijakan nasional maupun perkembangan

keadaan daerah yang mempengaruhi perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana regulasi yang berlaku bahwa RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk itu, RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 - 2024 harus diselaraskan dengan RPJMN yang baru disahkan pada bulan Januari 2020 untuk periode RPJMN 2020 – 2024.

Memasuki tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019-2024, dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD. Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
3. Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Perubahan mendasar

yang memengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 adalah adanya perubahan kebijakan nasional. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan hal-hal perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan yang berkenaan dengan perencanaan dan keuangan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024. RPJMN merupakan pedoman bagi perencanaan nasional maupun perencanaan daerah karena perencanaan pusat dan perencanaan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional. Pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, pembangunan Kabupaten Kolaka diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian, agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Sinergi pusat dan daerah sangat dibutuhkan dalam melaksanakan setiap prioritas nasional tersebut. Hal ini tercantum dalam pasal 159 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Peraturan ini mewajibkan kepada seluruh pemerintah daerah agar menggunakan sistem pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah daerah lainnya secara nasional yang terintegrasi dan saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sehingga berimplikasi pada penyesuaian program dan kegiatan. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah disusun secara sistematis dalam rangka mendukung SIPD. Selain peraturan perundang-undangan di atas, terbit pula beberapa peraturan yang menguatkan perlunya dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024. Peraturan dimaksud adalah sebagai berikut:
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini berkenaan dengan laporan dan informasi hasil kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang disampaikan kepada pemerintah pusat, DPRD maupun masyarakat;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan ini terbit untuk memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta

meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah;

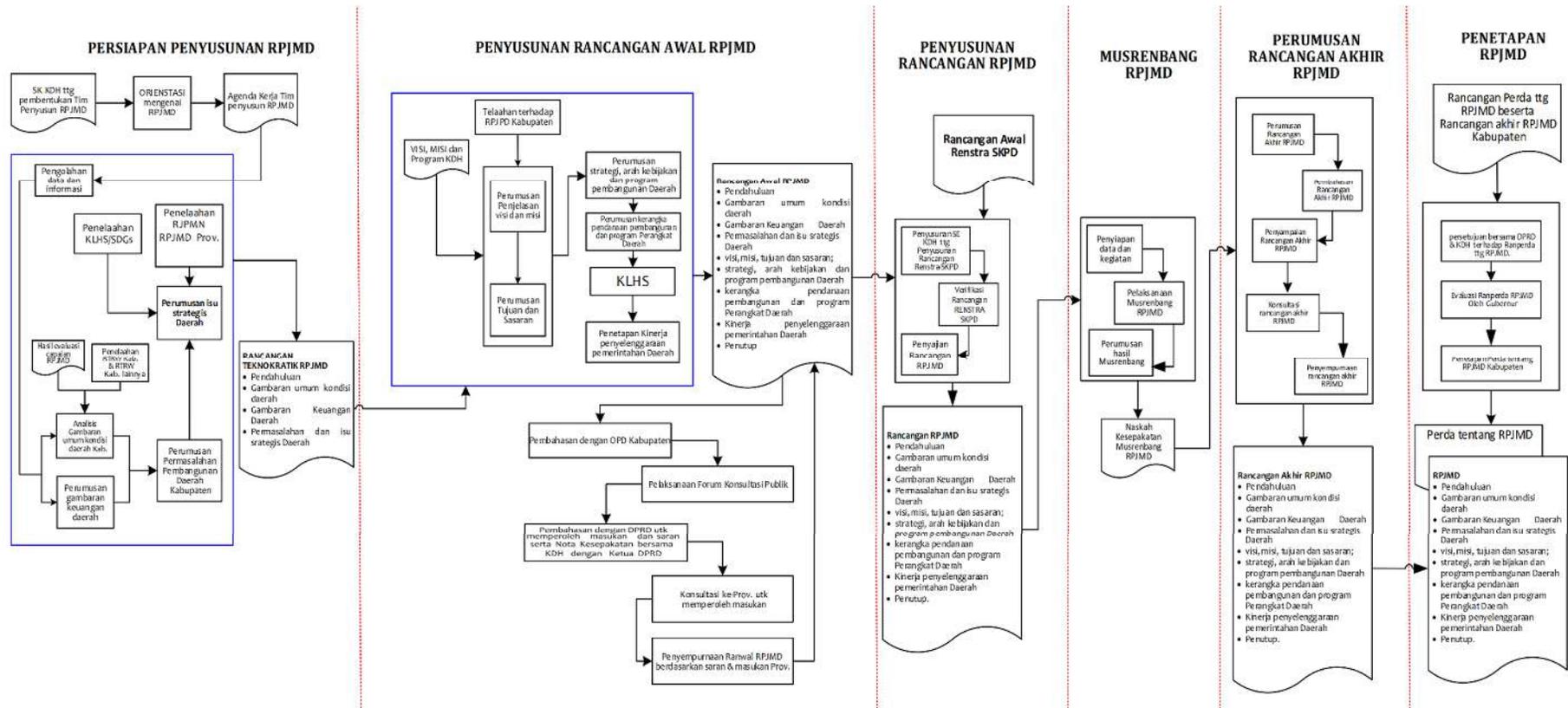
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini ditujukan untuk keseragaman nomenklatur dan unit kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur tata cara dan sistematika penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selanjutnya, hal lain yang mendasari perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 - 2024 adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit *Novel Coronavirus* pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Kolaka memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*)

yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Pergeseran anggaran telah dilakukan beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19. Oleh sebab itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2021 dan Rancangan RKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2022, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Kabupaten Kolaka. Penambahan prioritas ini ditegaskan kembali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2021 yang merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan tahun 2022 di tengah pandemi COVID-19. Ada 2 (dua) agenda penting yang dibahas, yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun kedua pencapaian visi misi dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 yaitu terwujudnya Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera. Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Tahun 2020. Substansi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 yang mengalami perubahan, meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini sampai dengan tahun berjalan; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi COVID-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program dan kegiatan menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 beserta indikator kinerjanya; dan IKU Pemerintah Daerah dan target kinerjanya, IKU Perangkat Daerah dan target kinerjanya, dan indikator kinerja program.

Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dilakukan sesuai amanat dalam Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RPJMD dilakukan mulai dari tahap persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, musrenbang, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan Perda tentang Perubahan RPJMD. Alur tahapan pelaksanaan Perubahan RPJMD digambarkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Tahapan dan Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024

Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka merupakan dokumen yang sangat strategis yang digunakan untuk :

1. Mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye pada seluruh masyarakat.
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025 untuk periode/ tahap keempat.
3. Pedoman pembangunan selama lima tahun.
4. Pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Kolaka.
5. Pedoman arah kebijakan percepatan penanganan dan pemulihan pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Kolaka.
6. Instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal pemerintah (SPIP) dan Bappeda.
7. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama lima tahun.
8. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dimiliki.
9. Pedoman penyusunan RPJMDes.

Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 s/d 2024. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022 s/d 2024. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 dengan perencanaan strategis dan operasional di perangkat daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka.

## **1.2. Dasar hukum penyusunan**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Perda 9 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 Nomor 3);

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**

#### **1.3.1. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara.**

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diamanatkan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. RPJMN 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 – 2023 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional/ provinsi dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Pembangunan Kabupaten Kolaka dan Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan dengan target yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan dalam RPJMN tersebut lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa Proyek

Prioritas Strategis (Major Project) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda pembangunan yang menjadi Prioritas Nasional dalam Perencanaan Tahunan (RKP) harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah.

### 1.3.2. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025 yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap keempat RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005 – 2025.

Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 – 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Perubahan Renstra perangkat daerah merupakan rencana kerja lima tahunan yang menjabarkan perencanaan kerja dan kinerja tahunan perangkat daerah untuk menunjang pencapaian visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana termuat dalam Perubahan RPJMD serta penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Selanjutnya, Perubahan RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan tahunan daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja. Dalam pelaksanaan setiap tahunnya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

### 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan RTRW Kabupaten Kolaka

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2012 – 2032 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2012-2032. RTRW dipedomani dengan maksud untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

#### 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kolaka

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/ atau kebijakan, rencana dan program. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1.2  
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## **1.4. Maksud dan Tujuan**

### **1.4.1. Maksud**

Maksud dari Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 – 2024 adalah memperbaiki kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka 3 (tiga) tahun ke depan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD dan penyesuaian peraturan undang-undangan terbaru serta percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkannya.

### **1.4.2. Tujuan**

Tujuan Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 – 2024, yaitu:

1. Menetapkan kebijakan pembangunan jangka menengah yang selaras dengan perkembangan keadaan dan penyesuaian terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan terbaru yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Menetapkan pedoman untuk penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai dengan akhir periode RPJMD;
3. Menetapkan pedoman untuk penyusunan RPJMDes dan RKPDes; dan
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta dengan kabupaten yang berbatasan.
5. Mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka 2019 - 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

## **2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Kolaka beberapa tahun terakhir yang disajikan dalam empat aspek yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

## **3. BAB III GAMBARAN KEUANGANDAERAH**

Bab ini memuat kondisi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah beberapa tahun terakhir sebagai dasar untuk merancang kerangka pendanaan untuk membiayai pembangunan 5 (lima) tahun ke depan.

## **4. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**

Bab ini memuat rangkaian proses yang menghasilkan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tahapan dimulai dengan perumusan permasalahan pembangunan, menelaah dokumen perencanaan lainnya maupun kebijakan isu tingkat regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak terhadap daerah dalam kurun waktu jangka menengah.

## **5. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Selanjutnya, misi dijabarkan ke tujuan dan sasaran serta indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

## **6. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menyajikan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya,

ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

#### **7. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pembangunan Kabupaten Kolaka yang disertai dengan pendanaan bersifat indikatif.

#### **8. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Bab ini memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disajikan beserta target setiap tahun sampai tahun 2024.

#### **9. PENUTUP**

Bab ini memuat hal – hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan dalam pelaksanaan RPJMD secara terpadu dan berkesinambungan.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

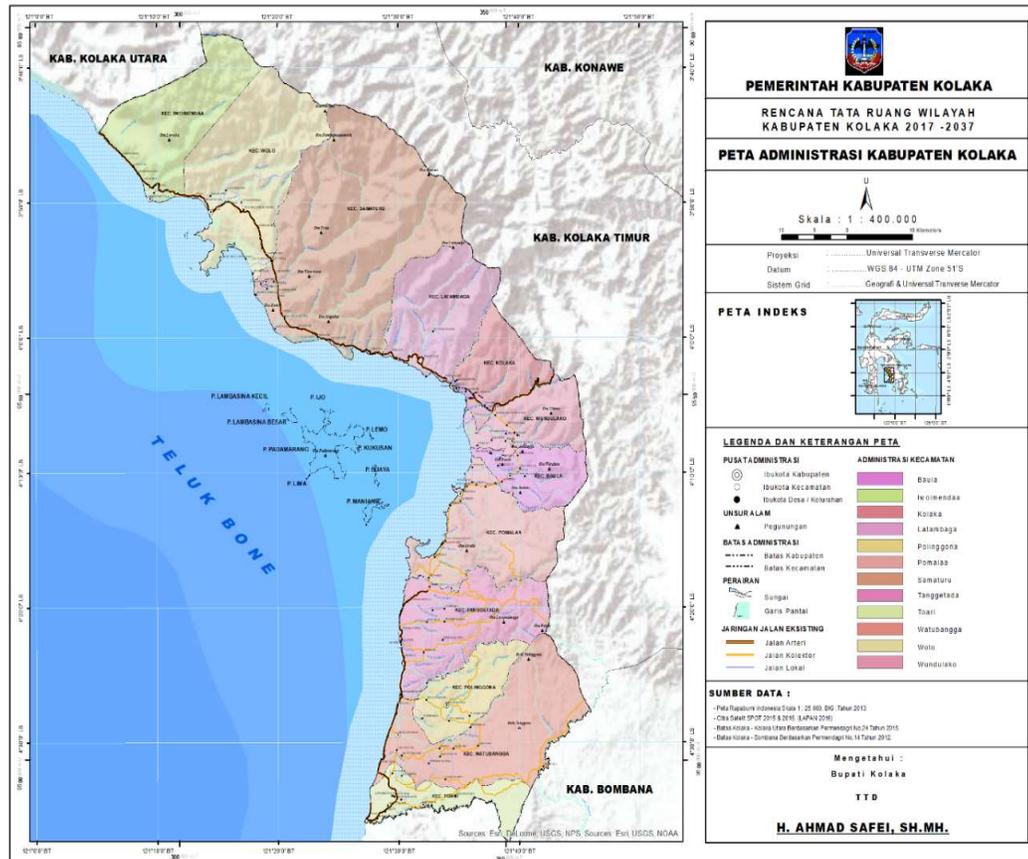
#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1.1. Aspek Geografi

#### A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kolaka secara administratif memiliki luas wilayah 2.958,69 km<sup>2</sup> dan secara administratif memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kolaka Utara dan Kolaka Timur
- Sebelah Timur : Kabupaten Kolaka Timur
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bombana
- Sebelah Barat : Teluk Bone



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kolaka

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kabupaten Kolaka

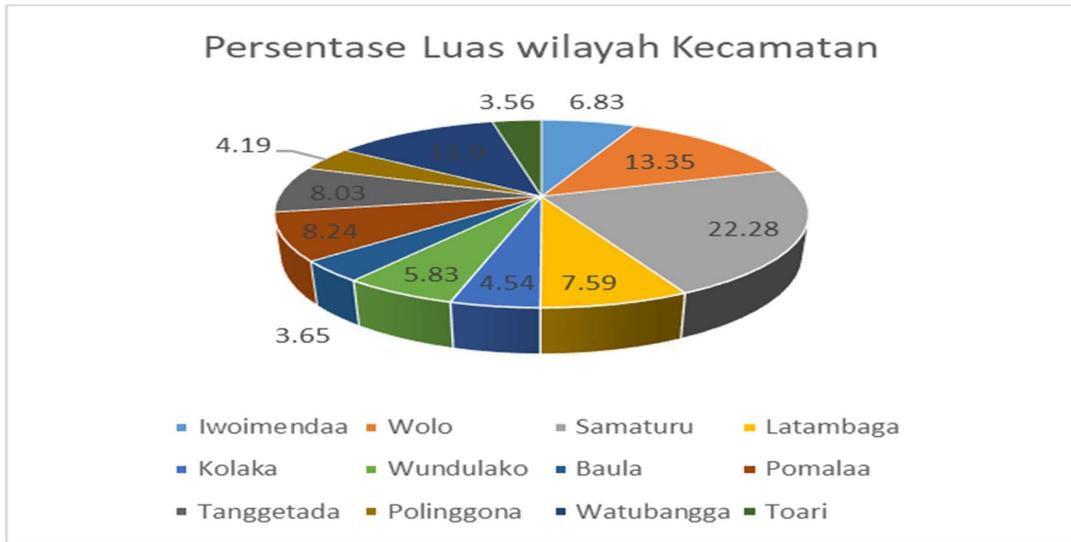
Kabupaten Kolaka saat ini terbagi menjadi 12 Kecamatan, 100 desa dan 35 kelurahan. Luas Wilayah daratan Kabupaten Kolaka adalah 2.958,69 km<sup>2</sup> dan perairan laut seluas ± 15.000 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 293,45 km. Kecamatan Samaturu adalah kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 659,08 km<sup>2</sup> atau 22,28% dari total luas Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Toari merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 105,37 km<sup>2</sup> atau 3,56% dari total luas Kabupaten Kolaka. Luas wilayah Kabupaten Kolaka menurut kecamatan selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Luas Kecamatan Kab. Kolaka

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Iwoimendaa	202,22	6,83
2	Wolo	395,03	13,35
3	Samaturu	659,08	22,28
4	Latambaga	224,46	7,59
5	Kolaka	134,45	4,54
6	Wundulako	172,61	5,83
7	Baula	107,90	3,65
8	Pomalaa	243,90	8,24
9	Tanggetada	237,70	8,03
10	Polinggona	124,02	4,19
11	Watubangga	351,97	11,90
12	Toari	105,37	3,56
<b>T o t a l</b>		<b>2.958,69</b>	<b>100,00</b>

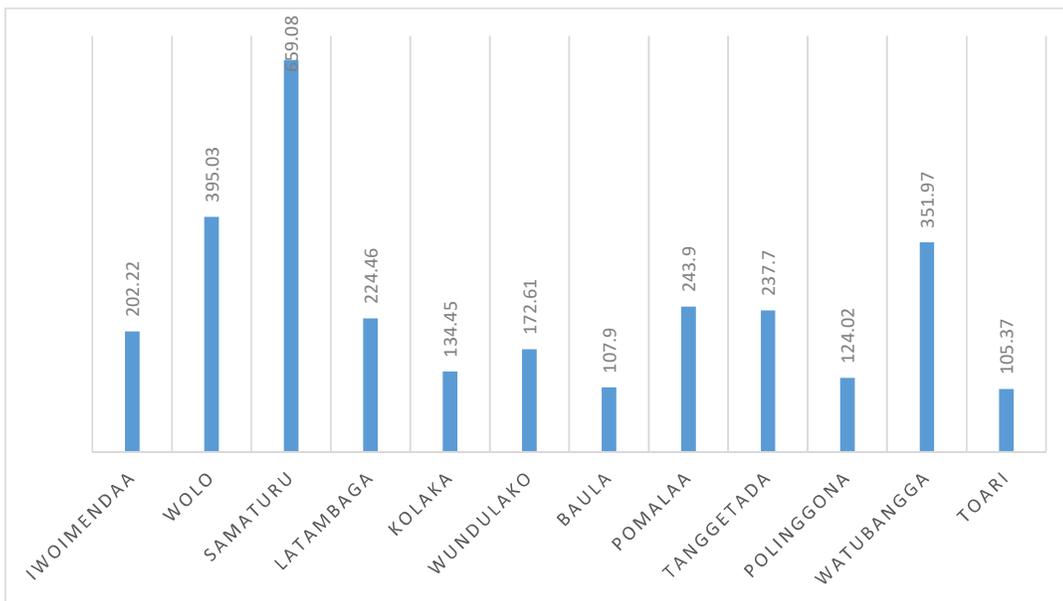
Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021

Kecamatan Samaturu merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 659,08 km<sup>2</sup> atau 22,28% dari total luas Kabupaten Kolaka sedangkan Kecamatan Toari merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 105,37 km<sup>2</sup> atau 3,56% dari total luas Kabupaten Kolaka. Wilayah kecamatan berdasarkan yang terluas sampai dengan yang paling kecil dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.



Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Gambar 2. 2. Persentase Luasan Tiap Kecamatan di Kabupaten Kolaka



Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021 (diolah)

Gambar 2. 3. Kecamatan berdasarkan Luas Wilayah

## B. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari Utara ke Selatan, tepatnya berada pada 3°37'-4°38' Lintang Selatan dan 121°05'-121°46' Bujur Timur. Kabupaten Kolaka yang terletak ±165 km dari Kota Kendari, ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara yang dapat diakses dengan mudah melalui transportasi darat (Trans Sulawesi), laut (Feri Bajoe-Kolaka dan Feri Tobaku-Siwa) serta transportasi udara (Bandara Udara Sangia Nibandera-Kolaka).

## C. Topografi

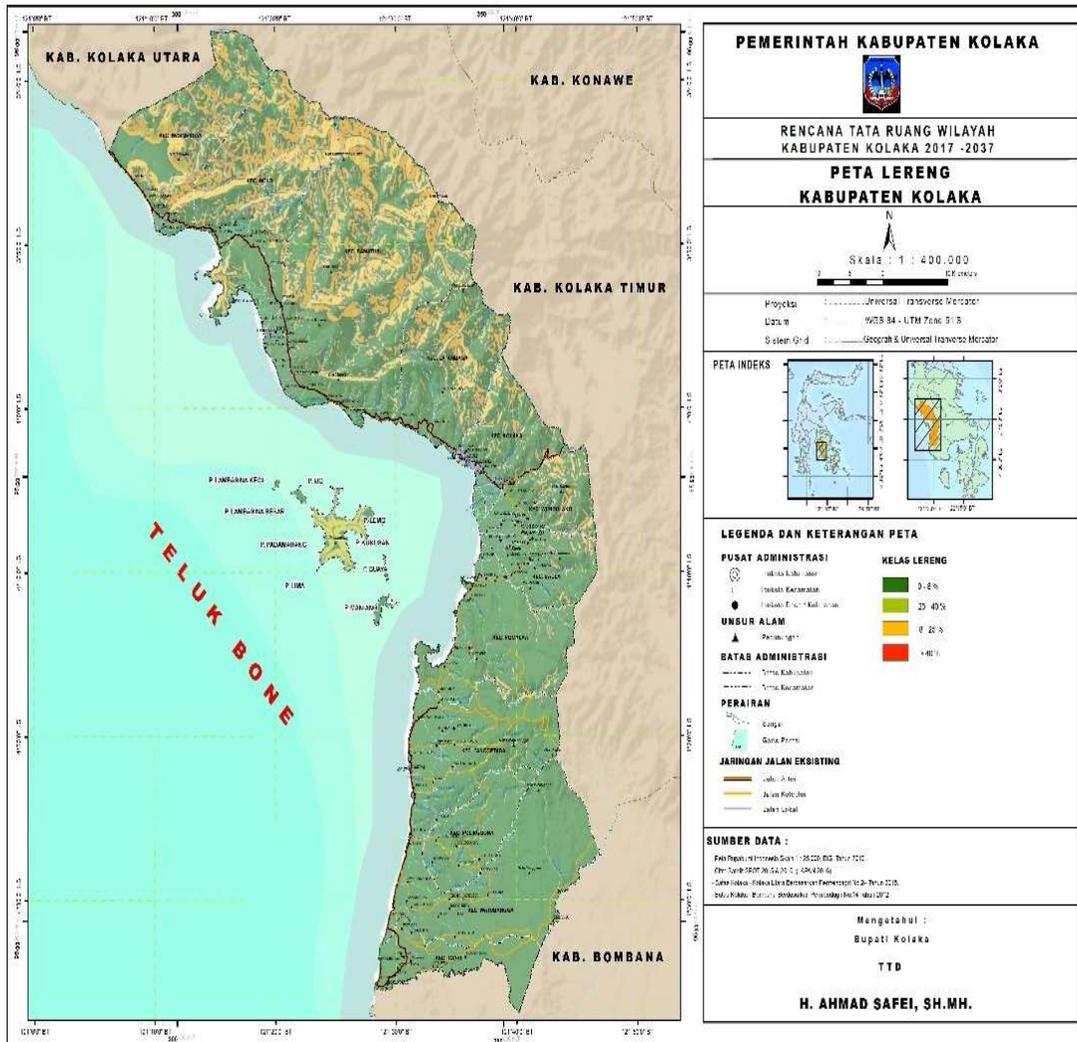
Topografi wilayah Kabupaten Kolaka pada umumnya memiliki permukaan tanah yang bervariasi mulai dari datar, landai, agak miring, agak curam, curam dan sangat curam. Ketinggian tempat dari permukaan laut di Kabupaten Kolaka di bedakan dalam empat segmen yaitu:

1. Kemiringan lereng 0 – 8%, berada disepanjang wilayah pesisir Kabupaten Kolaka yang menempati 80,197 % dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka atau sekitar 2.633,393 Ha.
2. Kemiringan lereng 8 – 25% menempati sekitar 18,88% atau sekitar 620 Ha yang berada di wilayah bagian utara kabupaten Kolaka.
3. Kemiringan lereng 25 – 40% menempati 0,60% atau sekitar 19,56 Ha dari total luas wilayah Kabupaten Kolaka yang berada di Kecamatan Iwoimendaa dan kecamatan Wolo.
4. Kemiringan lereng >40% menempati 0,33% atau sekitar 10,70 Ha yang berada di wilayah kawasan hutan lindung di kecamatan Iwoimendaa dan Kecamatan Wolo.

Tabel 2. 2. Klasifikasi Kemiringan Lereng

Klasifikasi Kelerengan	Luas (Ha)	Persentase (%)
0 - 8 %	2.633,39	80,20
8 - 25 %	620,00	18,88
25 - 40 %	19,56	0,60
> 40 %	10,70	0,33
<b>Total</b>	<b>3.283,64</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Analisa Revisi RTRW Kab. Kolaka



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kolaka

Gambar 2. 4. Peta Kemiringan Lereng Kab. Kolaka

#### D. Geologi

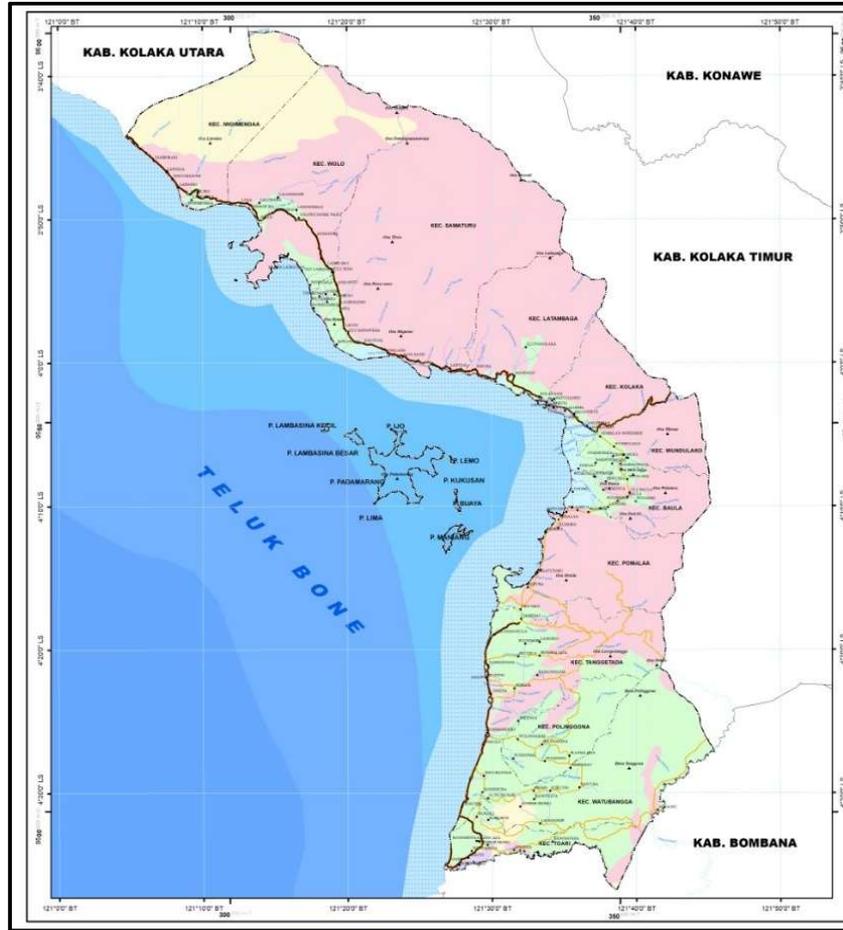
Berdasarkan peta geologi lembar Lasusua - Kendari Sulawesi dan peta geologi lembar Kolaka Sulawesi dengan skala 1:250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi (P3G), Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral, serta kompilasi peta oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara wilayah Kabupaten Kolaka tersusun oleh beberapa jenis batuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kompleks Mekongga (Pzm) formasi batuan ini termasuk di dalamnya marmer Paleozoikum (Pzmm) Kompleks batuan ini terdiri atas batuan metamorf berupa sekis, geneis dan kuarsit. Sedangkan Pzmm sendiri merupakan batuan metamorf hasil ubahan dari batu gamping (marmer).
2. Formasi Tolala (TRJt) formasi ini tersusun oleh batu gamping dengan sisipan batu pasir, serpih dan napal.
3. Formasi Meluhu (TRJm) formasi ini terdiri atas perselingan batu pasir, serpih, batu gamping dan lanau.
4. Batuan Beku Ultrabasa (Ku) batuan ini terdiri atas peridotit, hazburgit, gabro, dunit dan serpentinit.
5. Kompleks Pompangeo (MTpm) merupakan kompleks batuan metamorf yang terdiri dari sekis, rijang dan marmer serta meta gamping.

Tabel 2. 3. Luas areal menurut jenis tanah di Kab. Kolaka

Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persen (%)
Alluvial	1,681	0,50
Regosol	6,929	1,50
Latosol	50,871	2,11
Kambisol	293,151	89,24
Gleisol	20,924	6,37
Rendzina	9,06	0,28
<b>Total</b>	<b>328,520</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kolaka

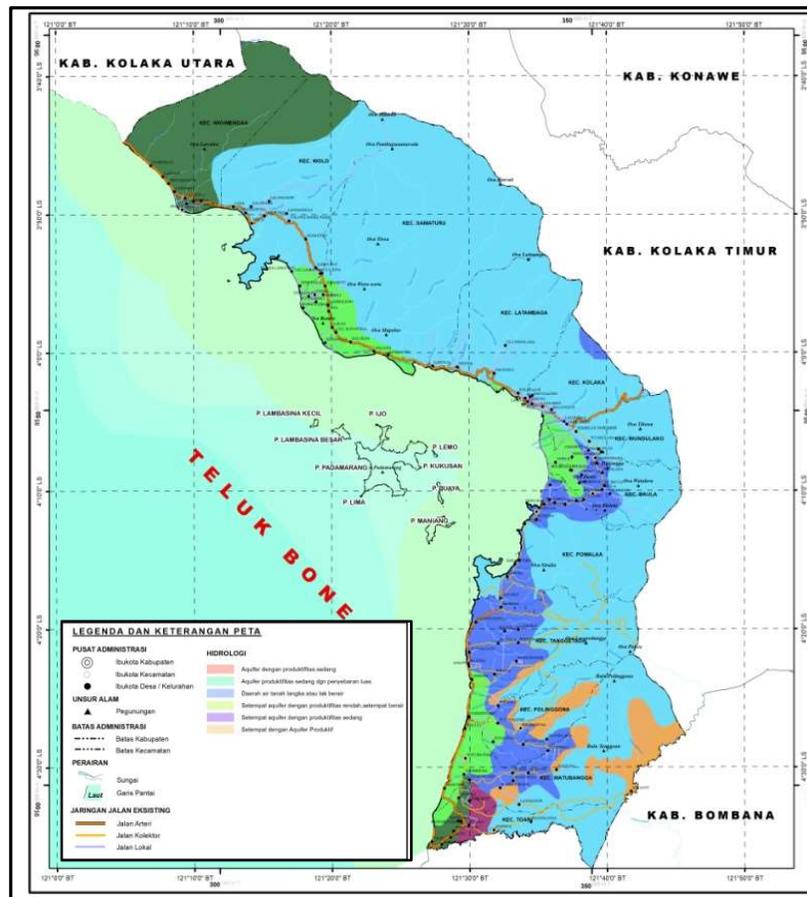
Gambar 2. 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kolaka

## F. Hidrologi

Kabupaten Kolaka memiliki beberapa sungai yang tersebar pada 12 kecamatan. Sungai tersebut memiliki potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Adapun sungai yang dimaksud adalah antara lain:

- Sungai Wolulu di Kecamatan Watubangga.
- Sungai Oko-Okoko di Kecamatan Tanggetada.
- Sungai Huko-Huko di Kecamatan Pomalaa.
- Sungai Baula di Kecamatan Baula.
- Sungai Lamekongga di Kecamatan Wundulako.

- Sungai Sabilambo, Balandete dan Kolaka di Kecamatan Kolaka.
- Sungai Mangolo di Kecamatan Latambaga.
- Sungai Iwoimendaa di Kecamatan Iwoimendaa.
- Sungai Wolo di Kecamatan Wolo.
- Sungai Tamboli dan Konaweha di Kecamatan Samaturu.



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Kolaka

Gambar 2. 6. Peta Hidrologi Kabupaten Kolaka

Dalam konteks hidrologi regional, di Kabupaten Kolaka terdapat dua Wilayah Sungai (WS) yaitu:

- WS Pompengan-Larona dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam daerah yaitu DAS Larona; dan
- WS Toari-Lasusua dengan DAS dalam daerah meliputi DAS Tamborasi, DAS Iwoimendaa, DAS Langgomali, DAS Tamboli, DAS Konaweheha, DAS Mangolo, DAS Balandete, DAS Sabilambo, DAS

Wundulako, DAS Mekongga, DAS Huko-huko, DAS Oko-oko, DAS Popalia, DAS Wolulu, DAS Poturua, DAS Peoho, DAS Toari dan DAS Padamarang.

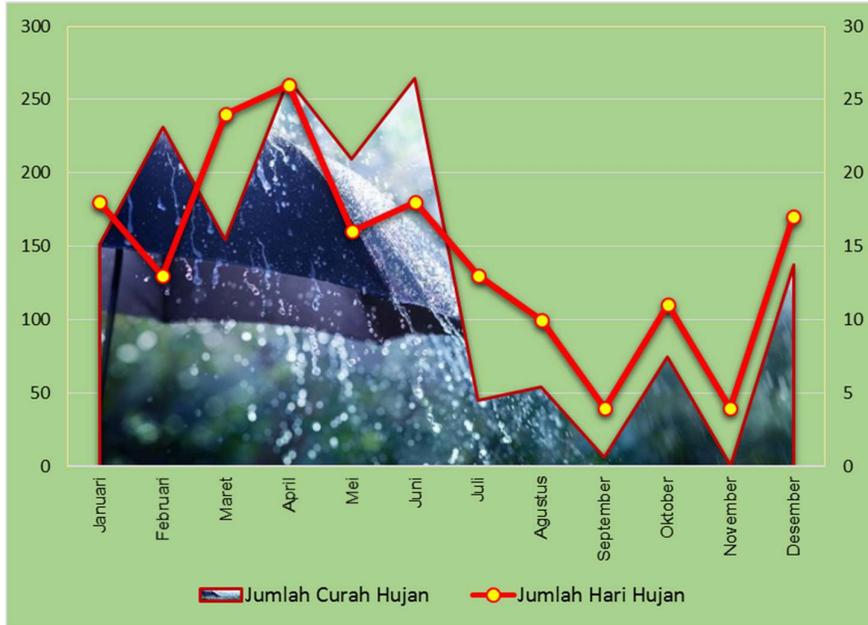
### G. Klimatologi

Berdasarkan pada klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson, wilayah Kabupaten Kolaka dibedakan dalam dua klasifikasi yaitu Tipe Iklim B yakni tipe Iklim dengan kelembaban 14,3-33,3 % pada daerah Iwoimendaa hingga Wundulako, dan Tipe Iklim C yaitu dengan kelembaban 33,3-60 % pada wilayah Pomalaa hingga Watubangga. Untuk curah hujan, pada wilayah utara yakni pada wilayah Wundulako hingga Iwoimendaa termasuk daerah dengan rata-rata curah hujan diatas 2.000 mm per tahun, sedangkan wilayah selatan yaitu wilayah Pomalaa hingga Toari merupakan daerah dengan rata-rata curah hujan kurang dari 2.000 mm per tahun.

Tabel 2. 4. Jumlah curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Kolaka Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	151.50	18
Februari	231.00	13
Maret	154.50	24
April	263.90	26
Mei	209.10	16
Juni	264.40	18
Juli	45.20	13
Agustus	54.40	10
September	6.50	4
Oktober	74.70	11
November	0.40	4
Desember	137.20	17

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021

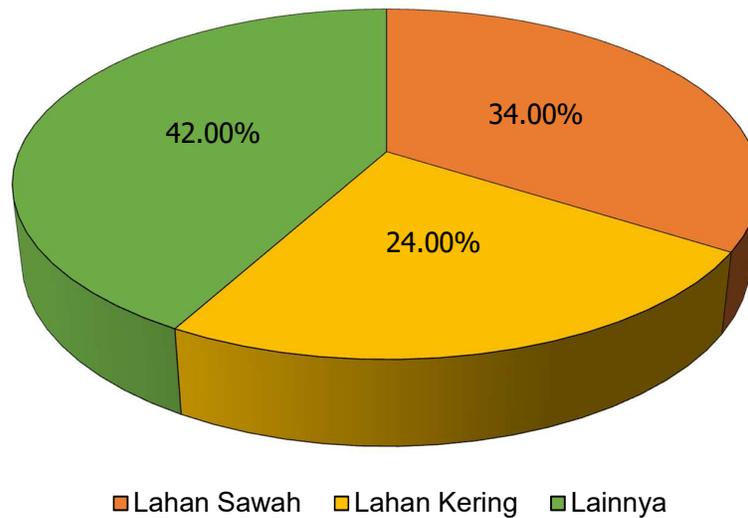


Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 2. 7. Jumlah hari Hujan dan Curah Hujan Kabupaten Kolaka

### H. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kolaka dibedakan menjadi lahan pertanian dan lahan bukan pertanian. Penggunaan Lahan eksisting Kabupaten Kolaka tahun 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik didominasi lahan kering seluas 97.201 Ha (42%), kemudian lahan sawah seluas 78.517 Ha (34%) dan lainnya seluas 54.664 Ha (24%).



Sumber: BPS, Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2.8. Persentase Penggunaan Lahan Kab. Kolaka 2020

### I. Potensi Daerah

Berdasarkan karakter geografi, sebaran penggunaan lahan dan potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kolaka dapat diidentifikasi potensi - potensi yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Kolaka seperti potensi pertanian dan pertambangan. Potensi pengembangan wilayah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Tahun 2012 - 2032 yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2012 menyebutkan bahwa rencana penggunaan lahan pada tahun 2032 diarahkan untuk menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan Lindung adalah wilayah yang harus dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan yang harus dipertahankan guna menghindari berbagai efek negatif yang mungkin muncul. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya manusia, dan sumber daya buatan.

Tabel 2.5. Rencana Penggunaan Lahan 2019-2039

Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
	(ha)	%
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
Hutan Lindung	109.174,8	43.92
Sempadan Sungai	2.391,2	0.96
Hutan Suaka	8.070,0	3.25
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
Hutan Produksi	74.538,6	29.98
Perkebunan	23.755,2	9.56
Sawah	8.520,5	3.43
Lahan Kering/Hortikultura	665,5	0.27
Permukiman	13.075,8	5.26
Pertambangan	83.99,7	3.38
<b>Jumlah</b>	<b>328.364,3</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRW Kab. Kolaka

### 1. Potensi Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama mata pencarian masyarakat Kabupaten Kolaka. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka yaitu urutan kedua setelah sektor pertambangan. Adapun komoditas andalan Kabupaten Kolaka pada sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan adalah padi, jagung, dan kedelai.

Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Sulawesi Tenggara dimana sebagian produksinya telah di pasarkan keluar wilayah Sulawesi Tenggara. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam budidaya padi adalah masih rendahnya produktivitas padi per Ha. Olehnya itu Kabupaten Kolaka terus berupaya dan berinovasi untuk menjadi produsen padi terbesar di Sulawesi Tenggara.

Kabupaten Kolaka memiliki luas lahan tanaman pangan tahun 2020 sebagai berikut: sawah luas panen 16.962,80 Ha dengan produksi sebesar 75.450,53 ton, luas panen jagung 2.098,90 Ha, dengan produksi sebesar 10.066,32 ton, luas panen ubi kayu 278,40 Ha dengan produksi 7.896,26 ton. Kondisi wilayah Kabupaten Kolaka khususnya iklim, lahan dan

sumber daya alam merupakan pendukung utama pengembangan usaha jenis komoditas pertanian terutama pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Sama halnya komoditas tanaman pangan, maka untuk pengembangan komoditas hortikultura, dan perkebunan masih diperlukan peningkatan produktivitas dan konversi produk. Hal ini dalam rangka mendukung ketahanan pangan masyarakat yang tidak hanya mengandalkan dari sektor beras, namun juga harus didukung dengan komoditas pangan yang lain. Tahun 2020 luas tanam komoditas sayuran 1.979 Ha dan luas lahan komoditas buah-buahan 3.087 Ha. Adapun produksi komoditas sayur-sayuran sebesar 30.023 kwintal dan produksi komoditas buah-buahan sebesar 216.795 kwintal.

Permasalahan di bidang pertanian tidak hanya dalam produksi dan budidaya, namun dalam pemenuhan prasarana pertanian seperti Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jaringan Irigasi Tersier juga masih perlu ada peningkatan. Saat ini panjang JUT yang sudah terbangun/direhabilitasi sejak tahun 2015-2020 sebesar 56,8 Km, sedangkan panjang Jaringan Irigasi Tersier yang direhabilitasi tahun 2015-2020 sepanjang 24.918 meter.

Tabel 2.6. Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 - 2020

Uraian	Satuan	T a h u n				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Ternak Besar</b>						
Sapi	Ekor	26.075	28.0888	29.055	23.306	24.757
Kerbau	Ekor	375	377	379	195	205
Kuda	Ekor	58	65	66	86	94
Kambing	Ekor	22.737	24.003	25.150	26.019	31.034
Babi	Ekor	6.001	6.202	6.401	7.116	7.705
<b>Ternak Kecil</b>						
Ayam Ras	Ekor	160.133	168.133	181.934	192.284	194
Ayam Buras	Ekor	1.441.342	1.490.350	1.543.346	1.618.819	1.904.291
Ayam Petelur	Ekor	17.300	18.512	19.314	6.800	8.600
Itik	Ekor	22.517	23.525	30.368	30.368	35.497

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, 2021

## 2. Potensi Perikanan

Luas perairan laut Kabupaten Kolaka yang mencapai 15.000 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai membentang sepanjang 295.855 km dengan luas keseluruhan pulau seluas 4.384 Ha, menjadikan Kabupaten Kolaka sebagai salah satu daerah yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari sektor perikanan. Potensi pengembangan wilayah untuk pengembangan kawasan budidaya perikanan laut dan perikanan darat meliputi :

1. Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat pada wilayah pesisir dan laut di Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada, Watubangga dan Toari;
2. Kawasan peruntukan budidaya perikanan yang terdiri atas budidaya perikanan payau (tambak) terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako, Pomalaa, Tanggetada, Watubangga dan Toari dan budidaya perikanan air tawar (kolam, sawah) terdapat di Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, Watubangga dan Toari serta budidaya perikanan laut dengan komoditi budidaya rumput laut terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu, Latambaga, Kolaka, Wundulako, Pomalaa, Tanggetada dan Watubangga, budidaya kerapu terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu, Wundulako, Pomalaa dan Tanggetada, budidaya perikanan dengan Keramba Jaring Apung (KJA) terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu dan Wundulako, budidaya teripang terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu, Wundulako dan Pomalaa dan budidaya kerang mutiara terdapat di Kecamatan Wolo, Samaturu dan Wundulako;
3. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kelurahan Mangolo Kecamatan Latambaga;
4. Kawasan minapolitan yang terdiri atas kawasan minapolitan nasional terdapat di Kecamatan Wundulako serta Wolo dan kawasan minapolitan

Berikut gambaran potensi sumber daya perikanan Kabupaten Kolaka disajikan dalam Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Potensi Sumberdaya Perikanan dan tingkat pemanfaatannya

No	Sumberdaya Perikanan	Satuan	Potensi	Tingkat Pemanfaatan	
				Luas	Persentase
1.	Perikanan laut	Ton/ Thn	37.500	18.265	48,71%
2.	Budi Daya air payau	Ha	8.500	4.940	58,12%
3.	Budidaya air tawar	Ha	500	137,75	27,55%
4.	Budidaya laut	Ha	7.000	979,12	13,99%

Sumber: Dinas Perikanan, Tahun 2021

### 3. Potensi Pariwisata

Terdapat 10 destinasi wisata unggulan untuk menarik para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Keindahan dan kekhasannya tidak kalah bersaing dengan daerah wisata lain di luar Sulawesi Tenggara. Secara rinci "top ten" destinasi wisata itu antara lain:

- Sungai terpendek di dunia terletak di Pemandian Tamborasi,
- Objek wisata laut dan Pulau Padamarang,
- Wisata laut Tanjung Kayu Angin, Pulau Pisang,
- Tanjung Malaha,
- Pantai Putura,
- Wisata Air Terjun Ulunggolaka,
- Taman Wisata Mangrove,
- Cagar budaya Makam Sangia Nibandera
- Wisata Kampung Cokelat.
- Wisata budaya tradisional pencucian Negeri (Mosehe Wonua) dan permainan tradisional.

Tabel 2.8. Data Potensi Pariwisata

No.	Jenis Wisata	Jarak dari Pusat Kota menuju daya Tarik wisata (km)
<b>I</b>	<b>Wisata Alam</b>	
	1. Pantai dan Sungai Terpendek Tamborasi	80
	2. Pantai Tanjung Malaha	30
	3. Pantai Tanjung Kayu Angin	20
	4. Air panas dan Air Terjun Ulunggolaka	12
	5. Pulau Padamarang dan pulau-pulau sekitarnya	10
	6. Gua Watu Wulaa dan air terjun toro'ue	12
	7. Pantai Poturua Watubangga	80
	8. Pantai harapan Pomalaa	20
	9. Pantai Kalomang Watubangga	80
<b>II</b>	<b>Wisata Budaya</b>	
	1. Cagar Budaya Makam Sangia Nibandera	10
	2. Situs Benteng Tanah Bende Wuta	20
	3. Cerobong tua pabrik nikel Antam Pomalaa	25
<b>III</b>	<b>Wisata Buatan</b>	
	1. Replika Rumah Adat Mekongga	Dalam Kota
	2. Tugu Coklat	Dalam Kota
	3. Kampung Coklat	3

Sumber: Dinas Pariwisata, Tahun 2021

#### 4. Potensi Pertambangan

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dikeluarkan Badan Standarisasi Nasional Indonesia (BSNI) nomor SNI 13-4726-1998 tentang klasifikasi sumber daya mineral dan cadangan, yang mengacu pada *United Nations International Framework Classification for Reserves/Resources* tahun 1996, dinyatakan bahwa ada empat tahapan eksplorasi yaitu Survei Tinjau (*Reconnaissance*), Prospeksi (*Prospecting*), Eksplorasi Umum (*General Exploration*), dan Eksplorasi Rinci (*Detailed Exploration*).

Pertambangan merupakan sektor unggulan karena peranannya yang cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Kolaka. Tercatat kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada Tahun 2019 mencapai 47,36% dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kolaka. Pemerintah Kabupaten Kolaka memberikan kemudahan kepada investor untuk mengelola potensi pertambangan sesuai dengan kewenangannya. Potensi pertambangan Kabupaten Kolaka antara lain:

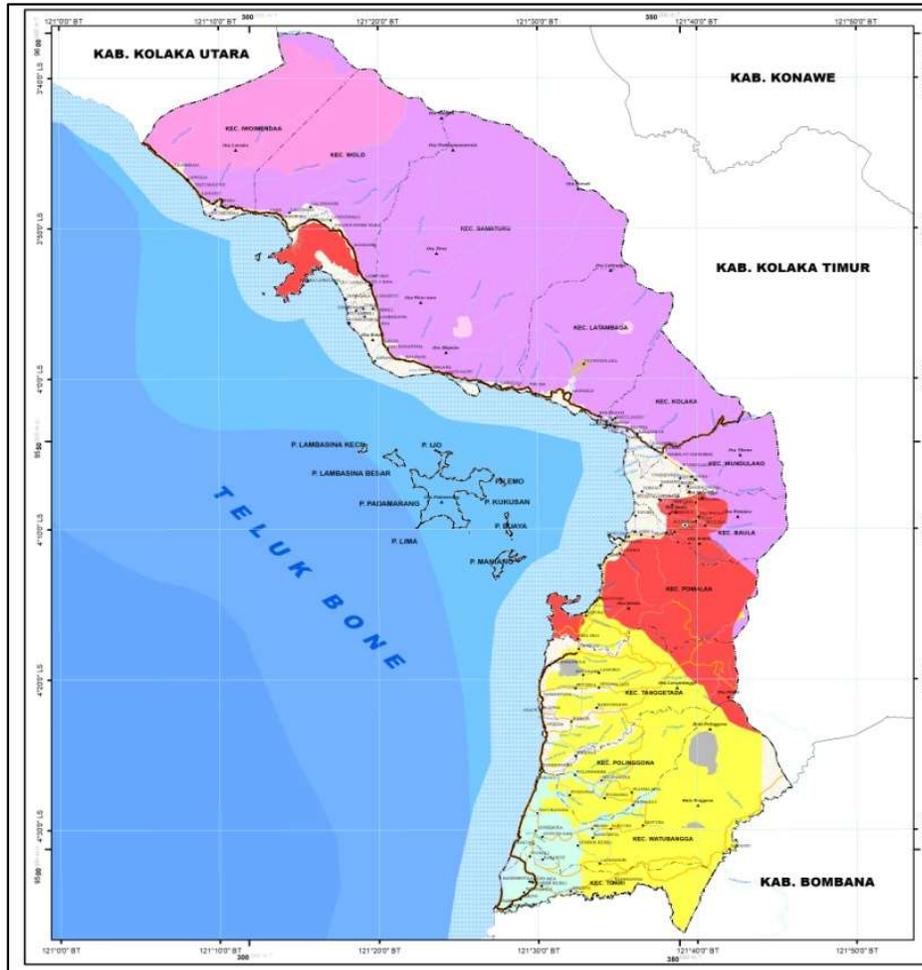
- Nikel di Kecamatan Wolo, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada dan Watubangga dengan luas sebaran mencapai 34.874 ha;
- Marmer di Kecamatan Iwoimendaa dan Wolo dengan luas sebaran mencapai 30.010 ha;
- Metamorf di Kecamatan Iwoimendaa, Wolo, Samaturu, Latamabaga, Kolaka, Wundulako, Baula dan Pomalaa dengan luas sebaran 129.966 ha;
- Onix di Kecamatan Samaturu dan Latambaga dengan luas sebaran 635 ha;
- Magnesit di Wundulako dengan luas sebaran 40 ha;
- Pasir kwarsa di Kecamatan Latambaga, Pomalaa, Tanggetada, Polinggona, Watubangga dan Toari dengan luas sebaran 55.144 ha; dan
- Dolomit di Kecamatan Watubangga dan Toari dengan luas sebaran mencapai 5.261 ha.

Mengingat wilayah Kabupaten Kolaka cukup luas dan terbatasnya anggaran, maka inventarisasi sumberdaya mineral yang pernah dilakukan masih pada tahap survai tinjau sehingga kategori sumberdaya dan cadangan adalah sumberdaya dan cadangan hipotetik. Gambaran potensi bahan galian yang ada di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9. Data Potensi Bahan Galian di Kabupaten Kolaka Tahun 2020

No.	WILAYAH		SEBARAN BAHAN GALIAN (HEKTAR)							
	Kecamatan	Hektar	Nikel	Marmer	Metamorf	Oniks	Magnesit	Kawarsa	Gamping	G. Dolomit
1	IWOIMENDAA	25.680		19.450	19.450					
2	WOLO	35.033	4.108	10.560	16.740					
3	SAMATURU	66.260			61.510	428				
4	LATAMBAGA	22.480			20.820	207		239		
5	KOLAKA	12.700			10.900					
6	WUNDULAKO	16.483	4.498		9.002		40,3			
7	BAULA	10.750	4.481		5.506					
8	POMALAA	23.420	16.136		650			2.095		
9	TANGGETADA	24.540	4.911					14.600		
10	POLINGGONA	12.460						10.830		
11	WATUBANGGA	31.880	737,5					22.080	331	1.902
12	TOARI	10.620						5.298	1.610	3.359
	<b>JUMLAH</b>	<b>292.307</b>	<b>34.874</b>	<b>30.010</b>	<b>129.966</b>	<b>635,7</b>	<b>40,3</b>	<b>55.144</b>	<b>1.971</b>	<b>5.261</b>
	<b>Berat Jenis</b>		<b>1,5</b>	<b>2,55</b>	<b>2,7</b>	<b>3,65</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,5</b>	<b>2,85</b>
	Estimasi Ketebalan		<b>5</b>	20	25	3	2	5	1	1
	Estimasi Sebaran		<b>50%</b>	15%	80%	50%	50%	50%	70%	70%

Sumber: Bagian SDA Setda Kolaka, 2021



Sumber: Bappeda Kab. Kolaka 2021

Gambar 2.9. Peta Potensi Pertambangan Kabupaten Kolaka

## 5. Wilayah Rawan Bencana

Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kolaka pada umumnya disebabkan oleh faktor alam dan kelalaian manusia seperti banjir, angin puting beliung dan kebakaran. Selama tahun 2019 tercatat frekuensi kejadian bencana banjir sebanyak 17 kali kejadian, angin puting beliung sebanyak 1 kali kejadian, kebakaran sebanyak 7 kali kejadian dan Gelombang pasang 2 kali kejadian.

Rekapitulasi kejadian bencana yang terjadi selama tahun 2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 10. Rekapitulasi Kejadian Bencana Kab. Kolaka Tahun 2015 – 2020

JENIS BENCANA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Angin Puting Beliung	6	1	5	5	1	2
Kebakaran						
<i>Rumah</i>	15	21	10	16	7	4
<i>Hutan</i>	7	-	-	-	-	-
<i>Lahan</i>	1	-	-	-	-	-
Banjir	2	32	2	11	17	-
Tanah Longsor	2	1	-	-	-	-
Gelombang Pasang	-	-	-	-	2	1

Sumber: BPBD Kab. Kolaka, 2021

Terkait penanganan bencana yang dilaksanakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga melakukan koordinasi pada instansi terkait seperti : BMKG, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kodim 1412 Kolaka, Polres Kolaka, Basarnas dan PMI Kolaka, Dinas Kehutanan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura pada saat terjadinya bencana dan kegiatan pasca bencana. Kegiatan pada saat terjadinya bencana antara lain pemberian bantuan darurat berupa bahan pangan dan obat-obatan. Sedangkan kegiatan pasca bencana yaitu rehabilitasi fisik sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana.

a. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kolaka selama tahun 2020 berstatus bencana lokal yaitu bencana yang dapat ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka sendiri.

b. Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Kolaka, potensi kejadian bencana yang mungkin terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Bencana banjir

Wilayah berpotensi banjir terdapat di Kecamatan Samaturu, Kecamatan Pomalaa, Kecamatan Baula, Kecamatan Tanggetada dan Kecamatan Kolaka.

2. Bencana tanah longsor

Wilayah berpotensi tanah longsor terdapat di Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Kolaka, Kecamatan Baula, dan Kecamatan Watubangga.

3. Bencana gelombang pasang

Wilayah berpotensi gelombang pasang terdapat di Kecamatan Iwoimendaa, Kecamatan Wolo, Kecamatan Samaturu, Kecamatan Latambaga, Kecamatan Tanggetada, Kecamatan Watubangga, dan Kecamatan Toari.

4. Bencana angin puting beliung

Wilayah berpotensi angin puting beliung terdapat di seluruh kecamatan utamanya kecamatan yang berada di pesisir pantai.

5. Bencana kebakaran rumah

Seluruh wilayah di Kabupaten Kolaka berpotensi terjadi kebakaran, khususnya pada musim kemarau.

- c.** Dalam mengantisipasi kejadian bencana yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, rusaknya aset dan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka melakukan pendekatan sistematis untuk mengantisipasi, mengkaji dan mengurangi resiko bencana dengan sosialisasi ke masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan membentuk forum-forum tanggap darurat bencana di tingkat desa/kelurahan serta bekerjasama dengan instansi terkait demi mengurangi resiko/dampak bencana.

### 2.1.1.2. Demografi dan Kependudukan

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Kolaka pada Tahun 2020 mencapai 237.587 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 120.143 jiwa dan perempuan mencapai 115.168 jiwa, dengan sex ratio mencapai 104,4 dimana. Lebih jelas kondisi kependudukan di Kabupaten Kolaka tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.11 berikut.

Tabel 2. 11. Kondisi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2020

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
Iwoimendaa	202,22	7.881	101	39
Wolo	395,03	20.481	106	52
Samaturu	659,08	24.901	105	38
Latambaga	224,46	31.441	105	140
Kolaka	134,45	40.201	102	299
Wundulako	172,61	21.160	105	127
Baula	107,90	12.829	106	113
Pomalaa	243,90	31.671	103	130
Tanggetada	237,70	15.600	106	66
Polinggona	124,02	5.890	108	48
Watubangga	351,97	15.741	107	45
Toari	105,37	9.690	104	92
<b>Jumlah</b>	<b>2.958,69</b>	<b>237.587</b>	<b>104</b>	<b>80</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kolaka 299 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian disusul Kecamatan Latambaga 140 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Wundulako 127 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Iwoimendaa 39 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Wolo 52 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Polinggona 48 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Watubangga 45 jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini menunjukkan persebaran penduduk masih belum merata antara

kecamatan yang dipengaruhi faktor masih tingginya keinginan untuk bekerja diperkotaan.

Data mengenai rasio jenis kelamin (*sex ratio*) berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Kemudian data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif (15-64 tahun) dan non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun) di suatu wilayah, sehingga dapat diketahui ratio ketergantungan. Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif, jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kolaka Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

Kelompok Umur (BPS)	Jumlah Penduduk 2020 Menurut Kelompok Umur		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
0-4	11.712	11.096	22.080
05-09	11.845	11.294	23.139
10-14	11.743	10.970	22.713
15-19	10.750	10.371	21.121
20-24	10.603	10.150	20.753
25-29	10.086	9.780	19.866
30-34	9.436	9.260	18.696
35-39	9.374	9.096	18.470
40-44	8.676	8.294	16.870
45-49	7.257	7.061	14.318
50-54	6.034	5.769	11.803
55-59	4.769	4.543	9.312
60-64	3.451	3.192	6.643
65-69	2.539	2.372	4.911
70-74	1.589	1.452	3.041
75+	1.457	1.548	3.023
<b>Jumlah</b>	<b>121.339</b>	<b>116.248</b>	<b>237.587</b>

Sumber: BPS Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

Berdasarkan data tersebut rasio ketergantungan di Kabupaten Kolaka sebesar 50,05% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan atau dianggap tidak produktif lagi.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdiri atas Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial serta Fokus Seni Budaya dan Olah Raga:

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Salah satu metoda yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Kolaka adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi. Komponen-komponen Indikator makro tersebut antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, PDRB, tingkat inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan.

Tabel 2. 13. Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Uraian	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	5,13	10,4	6,68	7,01	-3,40
<b>Inflasi (%)</b>	2,45	2,96	2,55	3,22	1,38
<b>IPM</b>	71,12	71,46	72,07	73,01	73,45
<b>TPT</b>	n/a	2,97	2,18	3,69	5,29
<b>Tingkat Kemiskinan (%)</b>	15,05	13,78	12,51	11,92	11,63

Sumber: BPS Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

#### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 2016 s/d 2020 menurut harga berlaku mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 18.377,83 Milyar, sedangkan di tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 25.550,94 milyar. Sektor pertambangan masih merupakan sektor yang paling banyak memberikan dukungan PDRB Kabupaten Kolaka yaitu sebesar 49,59 %. Diikuti oleh sektor pertanian 13,76%.

Kontribusi masing-masing sektor PDRB dapat dilihat dalam diagram berikut:

Gambar 2. 10. Kontribusi masing-masing sektor PDRB (BPS, 2020)



Sumber: BPS Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

Agar tidak terlalu tergantung dengan sektor pertambangan yang terbatas jangka waktunya, sektor pertanian harus ditingkatkan khususnya yang mengarah pada industrialisasi pertanian (agroindustri), karena jika mencermati dari serapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menyerap tenaga kerja 41,99 % dari seluruh angkatan kerja, sedangkan sektor pertambangan kontribusi tenaga kerjanya hanya sekitar 3,44 %. Secara keseluruhan perkembangan PDRB

Kabupaten Kolaka mengalami peningkatan, baik secara total PDRB maupun di masing-masing sektor.

Tabel 2. 14. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.628,76	2.806,64	3.045,68	3.349,83	3.516,91
Pertambangan dan Penggalian	8.196,56	10.425,00	11.829,23	13.446,51	12.671,24
Industri Pengolahan	1.848,60	2.001,70	2.255,94	2.541,76	2.187,28
Pengadaan Listrik dan Gas	2,68	3,21	3,31	3,46	3,55
Pengadaan Air, Pengelolaan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,10	20,51	21,75	23,38	24,90
Konstruksi	1.699,63	1.785,75	1.972,14	2.156,10	2.128,99
Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.818,87	1.990,41	2.194,42	2.377,82	2.309,67
Transportasi dan Pergudangan	399,27	422,82	467,47	511,08	497,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	72,61	78,44	81,30	86,18	84,90
Informasi dan Komunikasi	119,76	132,57	143,66	156,98	170,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	340,21	369,75	390,02	407,57	416,81
Real Estate	165,74	176,03	181,30	186,88	187,97
Jasa Perusahaan	21,79	23,67	25,70	27,31	26,93
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	461,45	487,11	516,39	562,69	580,90
Jasa Pendidikan	328,75	351,58	380,47	408,70	430,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	75,46	79,57	86,12	92,57	104,48
Jasa Lainnya	177,60	186,39	198,34	206,89	207,16
<b>Total PDRB ADHB</b>	<b>18.377,83</b>	<b>21.343,93</b>	<b>23.793,23</b>	<b>26.455,71</b>	<b>25.550,94</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Tabel 2. 15. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Lapangan Usaha</b>					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.031,51	2.090,75	2.229,00	2.349,76	2.429,62
Pertambangan dan Penggalian	7.068,69	8.364,40	8.931,68	9.685,03	8.953,84
Industri Pengolahan	1.551,86	1.613,22	1.747,76	1.853,74	1.653,47
Pengadaan Listrik dan Gas	3,01	3,19	3,24	3,33	3,41
Pengadaan Air, Pengelolaan, Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,66	15,68	16,57	17,59	18,78
Konstruksi	1.286,13	1.321,25	1.401,75	1.479,08	1.450,86

## Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.470,48	1.532,21	1.628,12	1.711,03	1.641,00
Transportasi dan Pergudangan	358,40	371,38	401,81	433,55	415,79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55,35	57,89	62,01	64,76	62,79
Informasi dan Komunikasi	121,52	131,77	142,57	154,79	170,53
Jasa Keuangan dan Asuransi	255,79	267,08	272,42	279,28	285,73
Real Estate	132,76	137,58	140,33	144,23	144,74
Jasa Perusahaan	17,45	18,44	19,40	20,23	19,41
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	362,44	374,97	377,95	400,56	400,31
Jasa Pendidikan	272,89	281,09	299,60	321,26	334,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	63,98	66,10	69,97	74,78	82,12
Jasa Lainnya	151,48	155,50	163,92	169,95	164,69
<b>Total PDRB ADHK</b>	<b>15.219,39</b>	<b>16.802,49</b>	<b>17.908,11</b>	<b>19.162,96</b>	<b>18.231,56</b>

Sumber: BPS, Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

Tabel 2. 16. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku dan Harga Konstan kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

URAIAN	2016		2017		2018		2019		2020	
	HB	HK								
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,3	13,35	13,15	12,44	12,80	12,45	12,66	12,26	13,76	13,33
Pertambangan dan Penggalian	44,6	46,45	48,85	49,78	49,72	49,88	50,83	50,54	49,59	49,11
Industri Pengolahan	10,06	10,22	9,38	9,60	9,48	9,76	9,27	9,67	8,56	9,07
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,11	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
Konstruksi	9,25	8,45	8,37	7,86	8,29	7,83	8,15	7,72	8,33	7,96
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,90	9,66	9,33	9,12	9,22	9,09	8,99	8,93	9,04	9,00
Transportasi dan Pergudangan	2,17	2,35	1,98	2,21	1,96	2,24	1,93	2,26	1,95	2,28
Penyediaan Akomodasi dan makan minum	0,40	0,36	0,37	0,34	0,34	0,35	0,33	0,34	0,33	0,34
Informasi dan Komunikasi	0,65	0,80	0,62	0,78	0,60	0,80	0,59	0,81	0,67	0,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,85	1,68	1,73	1,59	1,64	1,52	1,54	1,46	1,63	1,57
Real Estate	0,90	0,87	0,82	0,82	0,76	0,76	0,71	0,75	0,74	0,79
Jasa Perusahaan	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,11
Administrasi Pemerintahan	2,58	2,38	2,28	2,23	2,17	2,11	2,13	2,09	2,27	2,20
Pertahanan dan Jaminan jasa pendidikan	1,76	1,79	1,65	1,67	1,60	1,67	1,54	1,68	1,69	1,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	0,41	0,42	0,37	0,39	0,36	0,39	0,35	0,39	0,41	0,45
Jasa lainnya	0,96	1,00	0,87	0,93	0,83	0,92	0,78	0,89	0,81	0,90
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

## B. Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga dari sekelompok barang dan jasa secara terus menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau spekulasi, serta akibat adanya ketidaklancaran suplai dan distribusi barang. Jika besarnya tidak terkendali, inflasi akan mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat.

Laju inflasi Kabupaten Kolaka menggunakan pendekatan laju inflasi Kota Kendari, selengkapnya ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 2. 17. Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Inflasi (%)	3,07	2,96	2,55	3,22	1,38

Sumber: BPS, Kab. Kolaka Dalam Angka 2021

Perkembangan inflasi di Kabupaten Kolaka dipengaruhi oleh harga-harga komoditas yang terjadi ditingkat lokal Sulawesi Tenggara. Pada kurun waktu tahun 2018-2019 menunjukkan tren kenaikan, tahun 2019-2020 laju inflasi kembali turun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya sejumlah harga-harga komoditas seperti cabai, bawang merah, bawang putih dan kebutuhan sandang lainnya.

## C. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kolaka tahun 2020 diangka 71,40, capaian tersebut masih sama ditahun 2019 yakni diangka 71,40. Bila dilihat dari capaian tersebut Kabupaten Kolaka berada pada kategori tinggi. Berbagai program kegiatan ditahun 2020 diharapkan dapat mengungkit kenaikan IPM, mengalami penyesuaian akibat dampak pandemik tersebut. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, berdampak pada pelaksanaan program kegiatan yang mana pemerintah daerah harus melakukan menyesuaikan penganggaran program kegiatan yang lebih difokuskan untuk penanganan wabah pandemik tersebut. Demikian pula kegiatan - kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang

(berkerumun) tidak dapat terlaksana karena dampak pandemik tersebut. Namun IPM yang telah dicapai menunjukkan tingkat status pembangunan manusia Kabupaten Kolaka yang baik karena capaian IPM berada pada kategori tinggi yakni sebesar 71,40 pada tahun 2020 walaupun ditahun 2020 ini Kabupaten Kolaka sedikit berada dibawah IPM Sulawesi Tenggara yakni sebesar 71,45 dan IPM Nasional yakni sebesar 71,94.

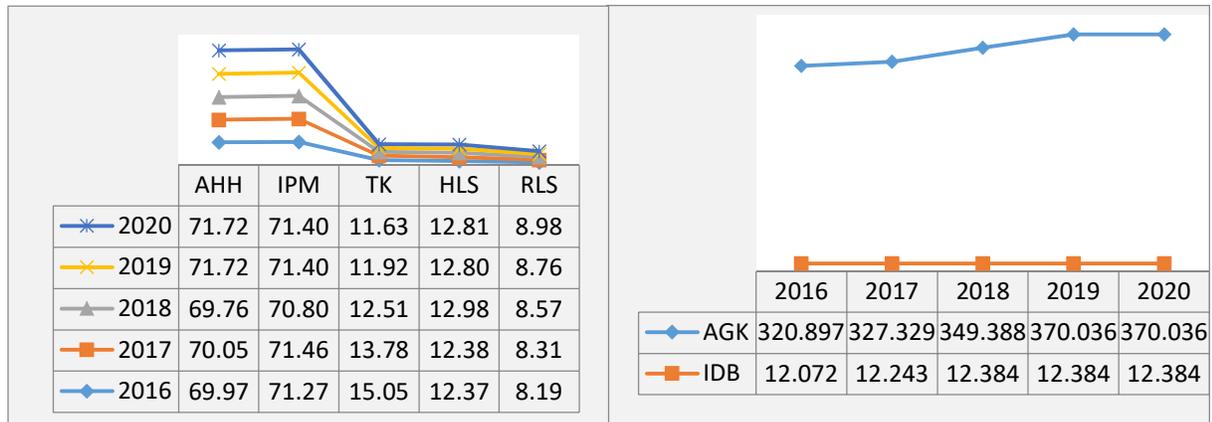
Tabel 2. 18. Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Angka Harapan Hidup	69,97	69,52	69,76	71,72	71,72
Harapan Lama Sekolah	12,37	12,38	12,98	12,80	12,81
Rata-rata Lama Sekolah	8,19	8,31	8,57	8,76	8,98
IPM	71,27	71,46	70,8	71,4	71,4
Angka Garis Kemiskinan	320.897	327.329	349.388	370.036	406.911
Tingkat Kemiskinan	15,05	13,78	12,51	11,92	11,63
Indeks Daya Beli (Rp)/Org	2.072	2.243	12.384	12.384	12.384
Peringkat Provinsi	3	3	3	3	3

Sumber: BPS dan BAPPEDA (diolah), 2021

Dengan Sembilan Prioritas Pembangunan yang dilaksanakan melalui pendekatan Strategi Mekongga Sejahtera Bekerja dan Berkarya (SMS Berjaya yang semakin maju) Jilid II diharapkan ditahun mendatang IPM Kabupaten Kolaka akan terus berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk ditingkatkan sehingga SDM Kolaka mampu bersaing sehingga dapat berperan sebagai pelaku dalam pembangunan daerah di berbagai bidang baik ditingkat lokal maupun nasional.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masih banyak indikator IPM yang perlu terus ditingkatkan, Pemerintah Daerah bertekad untuk tetap mendorong peningkatan IPM sebagai prioritas utama dalam RPJMD tahun 2019 - 2024.

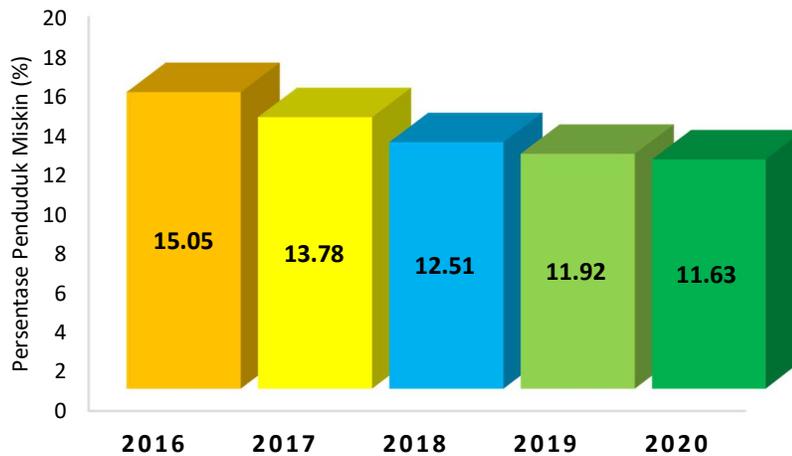


Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2.11. Capaian Perkembangan IPM Kabupaten Kolaka Tahun 2016 - 2020

#### D. Tingkat Kemiskinan

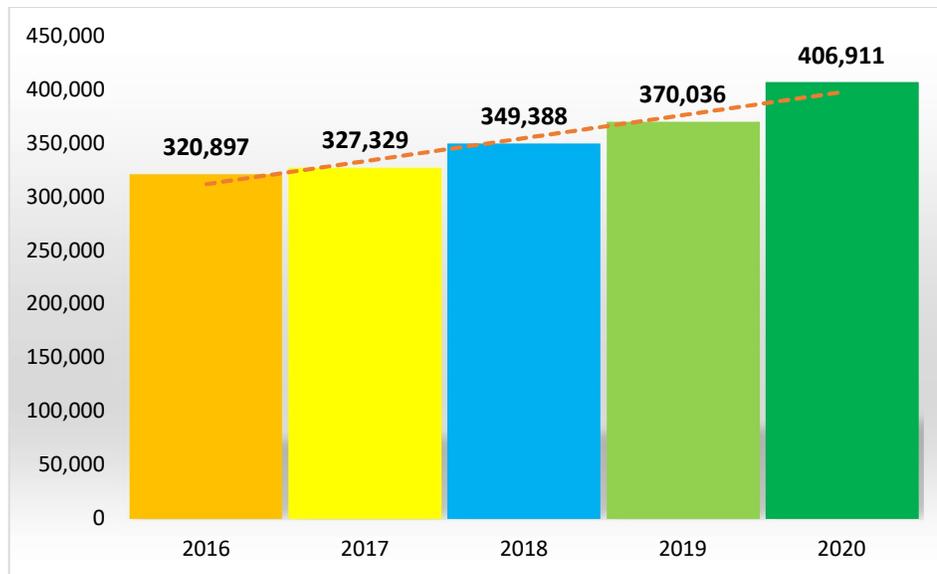
Membaiknya kinerja perekonomian daerah yang didukung dengan pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang terintegrasi dengan upaya penanggulangan kemiskinan mampu mendorong menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka dari 15,05% pada tahun 2016 menjadi 11,63% pada tahun 2020. Capaian ini telah melampaui target RPJMD yang ditetapkan yaitu 13,02%. Hasil capaian ini sejalan dengan target jangka menengah Pemerintah Kabupaten Kolaka yang bertekad untuk menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka menjadi kurang dari 10%, sesuai grafik berikut.



Sumber : BPS Kolaka 2021

Gambar 2. 12. Persentase Penduduk Miskin Kab. Kolaka 2016-2020

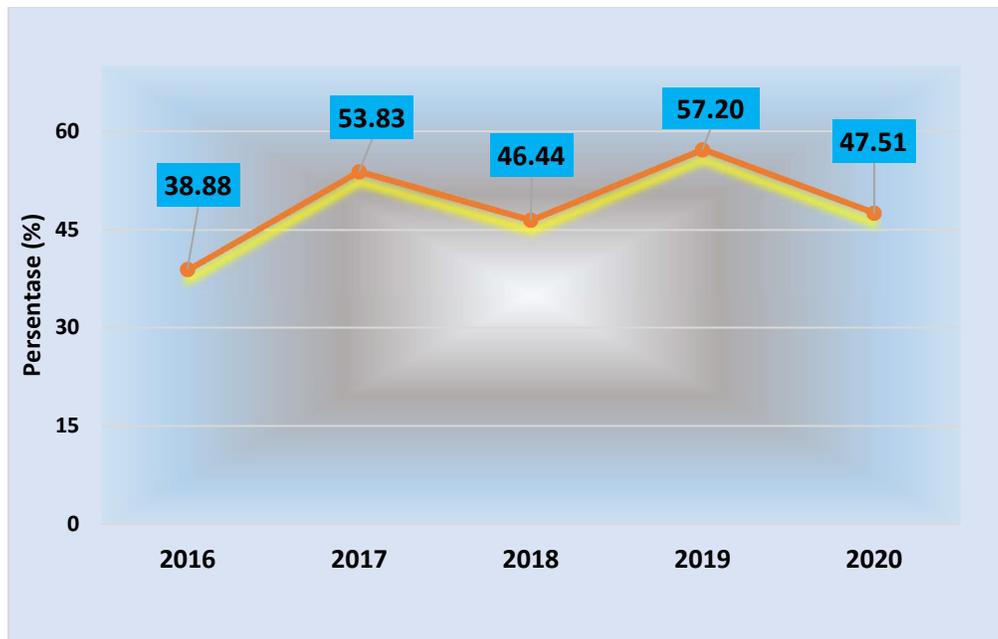
Tingkat kemiskinan di daerah juga dipengaruhi oleh meningkatnya angka garis kemiskinan yang terus naik setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 angka garis kemiskinan kabupaten kolaka sebesar Rp. 320.897,- sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 406.911,- sehingga dalam kurun waktu lima tahun mengalami kenaikan sebesar Rp. 86.014,-. Ini berarti bahwa setiap satu orang yang memenuhi kebutuhan sandang pangan dalam satu bulan sebesar Rp. 406.911,- maka orang tersebut dikategorikan miskin, seperti tergambar pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kolaka 2021

Gambar 2.13. Perkembangan Angka Garis Kemiskinan Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Salah satu upaya penurunan kemiskinan dalam lima tahun terakhir adalah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan indikator utama. Dimana pada tahun 2020, realisasi penanganan PMKS di Kabupaten Kolaka mencapai 47,51%. Capaian ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 57,20. Hal ini disebabkan oleh persentase PMKS yang memperoleh bantuan (anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, anak bermasalah, anak kedisabilitas dan lain-lain) yang persentasenya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni capaian tahun 2019 sebesar 40,30% dan capaiannya turun menjadi 29,54% pada tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan capaian persentase PMKS Lansia yang memperoleh manfaat dengan capaian pada tahun 2019 sebesar 16,90% naik menjadi 17,97% pada tahun 2020 sehingga apabila diakumulasi capaiannya menjadi 47,51%. Sebagaimana tersaji pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Sosial Kab. Kolaka, 2021

Gambar 2.14. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (%) Kab. Kolaka 2016 - 2020

Capaian PMKS yang tergambar pada grafik di atas masih di bawah target RPJMD, akan tetapi pencapaian ini diharapkan tetap memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya kemandirian para penyandang untuk keluar dari kategori PMKS.

Faktor lain yang berpengaruh tingkat kemiskinan adalah dari sektor ketenagakerjaan. Ketersediaan / peluang kerja di suatu daerah dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat yang tentunya mampu memberikan dampak positif pada penurunan angka kemiskinan. Sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada berbagai lapangan pekerjaan di Kabupaten Kolaka mencapai 6.566 orang. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang baik, meskipun terjadi penurunan yang sangat kecil dari tahun sebelumnya tercatat sebesar 6.571 orang.

Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan sebagaimana tersebut diatas juga nampak pada adanya penurunan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Dimana pada tahun 2019, angka TPAK Kabupaten Kolaka tercatat

sebesar 72,68% yang kemudian turun menjadi 70.45% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang mengalami kerugian, akibat dari dampak covid 19 yang mengakibatkan penurunan omset produksi, sehingga para pelaku usaha mensiasati dengan melakukan pengurangan tenaga kerja di berbagai sektor usaha.

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Pelaksanaan pembangunan daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat yang terintegrasi dalam 9 Prioritas Pembangunan daerah meliputi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Capaian indikator pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Pendidikan

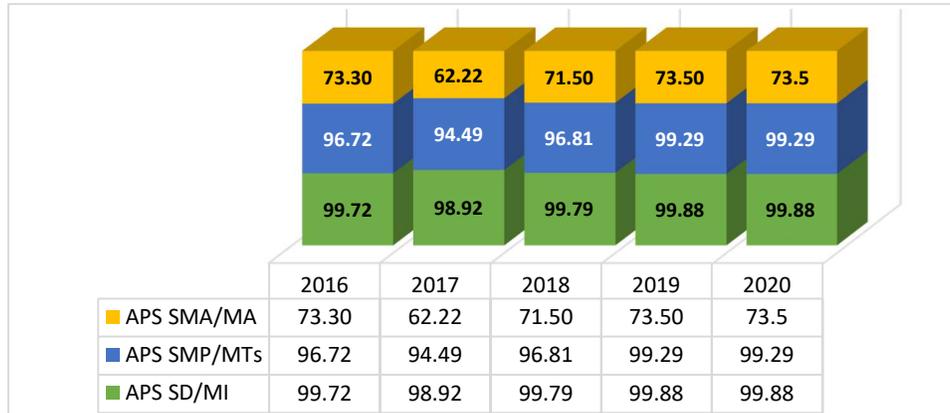
##### 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah, semakin tinggi APS semakin besar penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Angka APS di Kabupaten Kolaka sebagaimana Tabel 2.19 berikut.

Tabel 2. 19. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Kab. Kolaka Tahun 2016–2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APS SD/MI	99,72	98,92	99,79	99,88	99,88
APS SLTP/MTs	96,72	94,49	96,81	99,29	99,29
APS SMA/MA	73,30	62,22	71,50	73,50	73,50

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

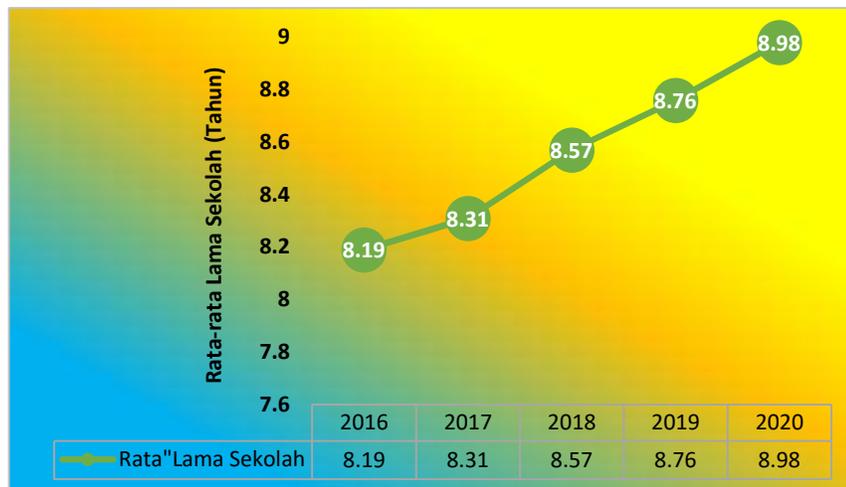


Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 15. APS Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

## 2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator Rata-rata Lama sekolah memberi gambaran tentang berapa capaian masyarakat dalam mengakses pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Rata-rata lama sekolah yang dicapai tahun 2016-2020 sebagaimana pada gambar berikut :



Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2. 16. Rata-Rata Lama Sekolah Kab. Kolaka 2016-2020

Berdasarkan gambar pada grafik di atas dapat dijelaskan bahwa adanya kecenderungan disetiap tahun terjadi peningkatan angka rata -

rata lama sekolah di Kabupaten Kolaka meskipun rata-rata kenaikannya masih relatif kecil. Pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kolaka adalah 8.19 tahun, meningkat menjadi 8.98 tahun pada tahun 2020.

### 3. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan pada jenjang pendidikan tertentu. Indikator APK akan memberikan gambaran terhadap tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan:

Tabel 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APK SD/MI	112,39	102,50	120,07	109,25	103,91
APK SLTP/MTs	75,03	111,88	74,00	85,34	79,83
APK SMA/MA	88,47	103,16	88,23	88,66	77,62

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)



Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2. 17. Perkembangan APK Kab. Kolaka 2016 – 2020

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa APK pada semua jenjang pendidikan (SD/Mi, SMP/MTsN dan SMA/MA) di tahun 2020 mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan adanya dampak pandemik covid – 19 yang menyebabkan adanya perubahan pola pembelajaran dari pola tatap muka menjadi pola pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berdampak pada persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh bapak/ibu guru maupun siswa dalam pelaksanaan pola baru tersebut. Persolan tersebut telah terlihat di satu tahun terakhir ini dimana masih adanya siswa yang tidak memiliki Handphone (HP), karena ketidak mampuan orang tua, masih adanya sekolah kesulitan mengakses jaringan internet, adanya tingkat kejenuhan siswa/siswi dikarenakan banyaknya beban tugas yang diberikan dan adanya dampak ekonomi dengan menurunnya pendapatan keluarga akibat dampak pandemik ini. Persoalan-persoalan tersebut kecenderungannya akan berdampak pada anak didik untuk putus sekolah dan akan berpengaruh langsung pada tingkat partisipasi diseluruh jenjang pendidikan.

#### **4. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Indikator APM adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 15 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) juga memberi gambaran persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama, juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
APM SD/ MI	85.79	87.51	97,57	99,87	99,20
APM SLTP/MTs	80.02	81,80	76,64	76,95	72,15
APM SMA/MA	71,65	77,03	60,68	62.92	60,66

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda ( diolah ).



Sumber: BPS, Kabupaten. Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 18. Perkembangan APM Kab. Kolaka 2016–2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa, APM jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Kolaka mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, dimana capaian pada jenjang SD/MI ditahun 2020 sebesar 99,20% dan capaian pada tahun sebelumnya yakni sebesar 99,87% pada tahun 2019. Kemudian capaian APM pada jenjang SMP/MTsN ditahun 2020 sebesar 72,15%, kondisi tersebut juga terlihat mengalami penurunan pada tahun sebelumnya sebesar 76,95% pada tahun 2019. Kondisi tersebut diakibatkan karena adanya perubahan pola pembelajaran dari pola tatap muka menjadi pola pembelajaran jarakm jauh (PJJ), kebijakan pemerintah pusat tersebut dikarenakan adanya wabah pandemik covid-19 yang melanda negeri ini. Dengan demikian, kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru dan wajib menerapkan protokol kesehatan

dalam melaksanakan proses pembelajaran disekolah. Perubahan ke pola tersebut tentunya akan berdampak pada pelaksanaan proses belajar mengajar dalam suatu sistim pelaksanaan proses pembelajaran disekolah. Permasalahan tersebut diantaranya tidak semua siswa mempunyai Handphone (HP), karena ketidak mampuan orang tua siswa, infrastruktur jaringan internet yang tidak mendukung diwilayah tertentu, kecenderungan adanya kejenuhan siswa akibat banyaknya tugas-tugas yang diberikan, pendapatan ekonomi keluarga siswa yang menurun dimasa pandemik ini maupun permasalahan lain yang dapat menghambat proses pembelajaran daring/jarak jauh tersebut. Demikian pula pendidikan jenjang SMA/MA mengalami persoalan yang sama. Kondisi tersebutlah yang lebih mempengaruhi penurunan capaian APM disemua jenjang pendidikan ditahun 2020.

Adapun capaian APM Sulawesi Tenggara tahun 2020 yakni untuk jenjang SD/MI sebesar 97,70 % kemudian pada jenjang SMP/MTsN sebesar 77,64% serta jenjang SMA/MA yakni sebesar 63,41%. Bila melihat perbandingan capaian Kabupaten Kolaka terhadap capaian provinsi terlihat bahwa capaian Kabupaten Kolaka hanya pada capaian jenjang SMA/MA sebesar 60,66% yang masih berada dibawah capaian APM Provinsi Sulawesi Tenggara yakni sebesar 63,41%. Namun jika melihat capaian APM Nasional jenjang SD/MI sebesar 92,88% menunjukkan bahwa APM Kabupaten Kolaka sebesar 99,20% telah melampaui capaian Nasional. Sementara untuk jenjang SMP/MTsN dan jenjang SMA/MA masih berada dibawah capaian Nasional.

## B. Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Adapun jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tingkat Kabupaten/ Kota meliputi :

- (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin.
- (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- (4) Pelayanan kesehatan balita.
- (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus .
- (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
- (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis.
- (12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Beberapa capaian SPM Kesehatan Kabupaten Kolaka sejak Tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 2.22.

Realisasi Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTPUT DAN OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	CAPAIAN 2020
1	Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan	%	81,3	84,0	82,0	81,5	76,0

	kesehatan ibu hamil						
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	72,5	86,6	86,0	86,0	92,0
3	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	95,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	49,3	32,1	42,0	41,5	100,0
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,5	94,6	84,4	79,9	100,0
6	Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	-	35,9	13,0	12,9	100,0
7	Persentase warga negara	%	-	36,7	16,0	16,4	100,0

	usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan						
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,0	100,0	100,0	12,5	100,0
9	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,0	100,0	100,0	7,8	100,0
10	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan	%	100,0	33,8	100,0	100,0	100,0

	elayanan kesehatan sesuai standar						
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,0	100,0	86,9	31,0	100,0

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

Selain itu beberapa capaian kinerja indikator bidang kesehatan yang lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin/bayi. Kekurangan gizi tidak saja membuat stunting, tetapi juga menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktifitas.

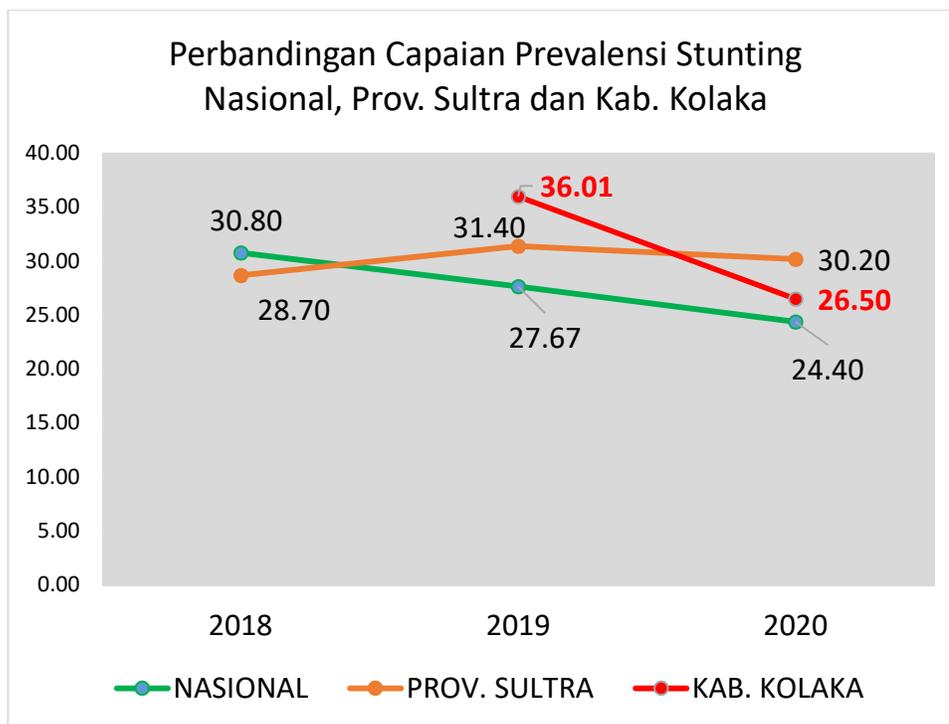
Dari hasil survey pemantauan status gizi (PSG), hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013 dan 2018 dan hasil integrasi Survey Kesehatan Nasional (SUSENAS) dan studi status gizi balita (SSGBI) tahun 2019 dan 2021 menunjukkan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Kolaka menunjukkan trend menurun dimana tahun 2019 prevalensi balita stunting sebesar 36,01% menurun menjadi 26,5% dengan persentase penurunan sebesar 9,51%, capaian prevalensi stunting berada dibawah angka prevalensi stunting Sulawesi Tenggara (30,2%) namun masih berada diatas standar WHO sebesar 20%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Angka Capaian Prevalensi Stunting Kabupaten Kolaka terhadap Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Riset dan Survei Tahun 2018-2021 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.23 Prevalensi Stunting Kabupaten Kolaka Tahun 2018-2021

	Riskesdas		SSGBI	
	2013	2018	2019	2021
Sultra	42,6	28,7	31,4	30,2
Kab. Kolaka	47,05	-	36,01	<b>26,5</b>

Sumber: Dinas Kesehatan dan Bappeda Kab. Kolaka, 2021 (diolah)



Sumber: Dinas Kesehatan dan Bappeda Kab. Kolaka, 2021 (diolah)

Gambar 2. 19. Perbandingan Capaian Stunting

Sedangkan pengukuran prevalensi balita stunting yang diperoleh melalui aplikasi system informasi gizi yaitu aplikasi Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dilakukan oleh petugas puskesmas di 14 puskesmas di 135 desa/kelurahan se-Kabupaten Kolaka menunjukkan data prevalensi balita stunting di Kabupaten Kolaka selama 4 tahun (Tahun 2018-2021) trendnya menurun dimana tahun 2018 dengan jumlah balita yang diukur sebesar 7.024 jiwa, jumlah balita stunting sebesar 1.891 jiwa atau prevalensi balita stunting sebesar 26,9% dan menurun di tahun 2021 dengan jumlah balita yang diukur sebesar 7.947 jiwa, jumlah balita stunting sebesar 970 jiwa atau prevalensi balita stunting sebesar 12,2% dengan persentase penurunan sebesar 14,7%, untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut.

## **2. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. AKB merupakan indikator derajat kesehatan yang sangat penting karena kelompok bayi merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kesakitan maupun kematian. AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun yang sama. Pada tahun 2020 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10 Per 1000 kelahiran hidup.

Perbandingan capaian tersebut bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 16 Per 1000 KH dapat dilihat pada grafik berikut:



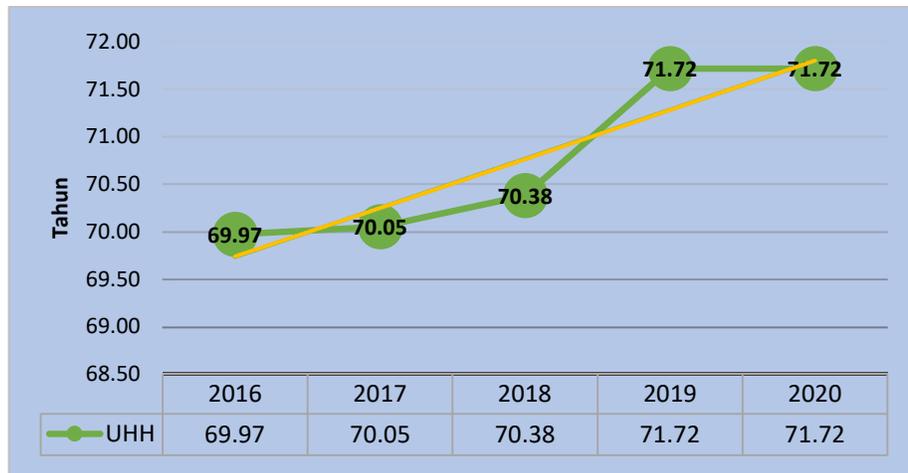
Sumber: BPS, Profil Kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 20. Perbandingan Angka Kematian Bayi (AKB) Kab. Kolaka dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Pada gambar diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terlihat fluktuatif, namun kita patut bersyukur bila dilihat sejak satu tahun terakhir terlihat mengalami penurunan jumlah kasus yang cukup baik. Dimana pada tahun 2020 sebesar 10/1000 KH, sementara tahun 2016 sebesar 12,3/1000 KH. Capaian tersebut menunjukkan adanya penurunan kasus dan telah berada dibawah target RPJMD sebesar 12,44 serta telah berada dibawah target Nasional sebesar 16/1000 KH. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa, semakin baiknya kinerja pelayanan tenaga kesehatan khususnya dr, tenaga Bidan serta sarana pendukung yang semakin baik dan memadai. Diharapkan ditahun-tahun mendatang intervensi secara komprehensif dan terintegrasi yang lebih fokus untuk dapat meminimalisir kematian bayi sehingga dapat mendeteksi sejak dini dari kemungkinan penyebab utama maupun penyebab lain kematian bayi di daerah.

### 3. Angka Harapan Hidup

Kondisi Angka Harapan Hidup (AHH) Kab. Kolaka Tahun 2020 mencapai 71,20 tahun meningkat 1,75 Tahun dibanding Tahun 2016 yaitu 69,97 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



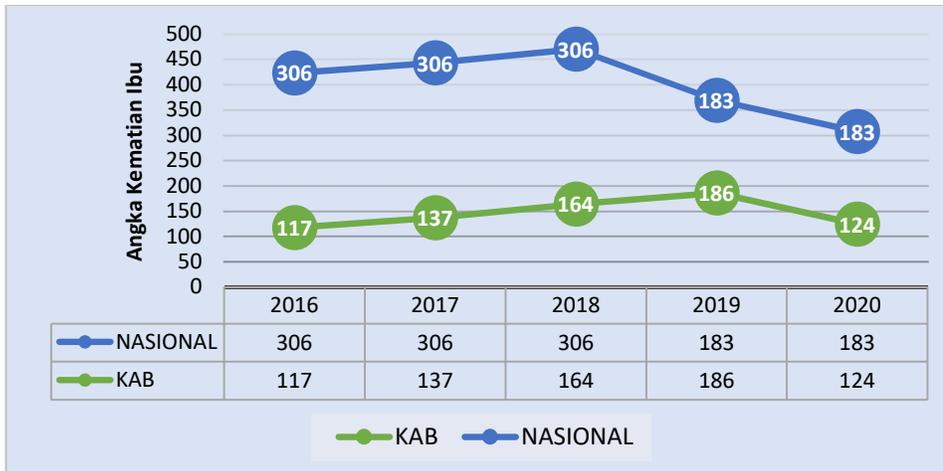
Sumber: BPS, Kabuapten. Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 21 Angka Harapan Hidup Kab. Kolaka 2016-2020

Dari grafik tersebut di atas diketahui bahwa capaian Indikator AHH Kab. Kolaka Tahun 2020 masih lebih tinggi dari capaian Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu 70,72 tahun dan juga telah berada diatas target nasional sebesar 71,50 tahun.

#### 4. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator AKI adalah jumlah ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per100.000 Kelahiran Hidup dalam kurun waktu satu tahun. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Kolaka Interval tahun 2016 sampai 2020, sebagai berikut:



Sumber: BPS, Kab. Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 22. Perbandingan Angka Kematian Ibu Kab. Kolaka dan Nasional Tahun 2016 – 2020

Dari grafik diatas dapat di ketahui bahwa AKI melahirkan tahun 2016 sebanyak 117/100.000 KLH, kemudian terjadi peningkatan angka kematian ibu di 3 tahun terakhir yakni pada tahun 2017 sebesar 137/ 100.000 KLH, pada tahun 2018 sebesar 164/100.000 KLH serta di tahun 2019 sebesar 186/100.000 KLH dan alhamdulillah diakhir tahun 2020 angka kematian ibu dapat diturunkan sebesar 124/ 100.000 KLH.

Adanya perubahan target Renstra oleh Kementerian Kesehatan ditahun 2020 yakni RPJMN tahun 2020 - 2024 sebesar 183 dibanding target tahun sebelumnya yakni sebesar 306. Kondisi ini yang mempengaruhi capaian Kabupaten Kolaka ditahun 2019, namun pada tahun ke II RPJMN 2020-2024 yakni ditahun 2020 capaian angka kematian ibu Kabupaten Kolaka dapat diturunkan kembali dan telah berada diatas target Nasional bahkan telah mencapai target RPJMD Kabupaten kolaka yakni sebesar 124/ 100.000 KH dari target sebesar 129/100.000 KH. Capaian penurunan tersebut dipengaruhi oleh karena adanya penyebab langsung yakni Asfiksia sebanyak 18 kasus BBLR 13 kasus Demam/Febris sebanyak 3 kasus, aspirasi sebanyak 2 kasus, kemudian premature, sepsis, kelainan kongenital, gastroenteritis masing-masing 1 kasus.

## 5. Prevalensi Balita Kurang Gizi

Persentase Balita Kurang Gizi adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk ditambah dengan persentase balita gizi kurang terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

- a. Rendah = di bawah 10 %
- b. Sedang = 10 -19 %
- c. Tinggi = 20 - 29 %
- d. Sangat Tinggi = 30 %

Upaya Pemerintah Daerah untuk menekan Prevalensi Gizi buruk di daerah melalui pendekatan dan sinergitas program telah menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi bagi balita namun ditengah pandemik yang melanda dinegeri ini berdampak kurang baiknya capaian prevalensi gizi buruk karena cenderung adanya peningkatan kasus pada tahun 2020. Capaian prevalensi gizi buruk bagi balita sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut :



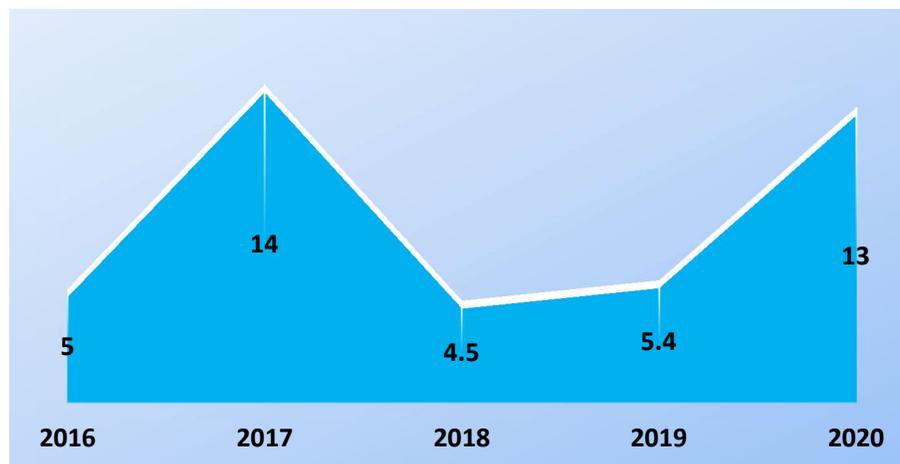
Sumber: BPS, Profil Kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 23. Persentase Gizi Buruk Kab. Kolaka 2016 -2020

Dari gambar diatas capaian prevalensi gizi buruk pada anak balita pada tahun 2020 sebesar 0,02% kondisi tersebut cenderung mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 0,01% ditahun 2019. Penurunan capaian tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni adanya wabah pandemik covid-19, dimana pendapatan ekonomi keluarga ikut tergerus akibat susahnya mencari pekerjaan dimasa pandemik ini. Instansi terkait melalui Dinas Kesehatan tidak henti-hentinya dan terus berupaya melakukan bimbingan penyuluhan tentang pentingnya pola asupan gizi yang sehat dan melakukan pendampingan untuk memberikan asupan gizi pada balita melalui diversifikasi pemanfaatan bahan lokal sebagai upaya untuk pemenuhan pangan yang berkualitas berbasis karakteristik dan kearifan lokal daerah melalui Program Makanan Tambahan (PMT).

## 6. Angka Kematian Anak Balita (AKABA)

Indikator AKABA pada tahun 2020 sebesar 13/1000 KH. Kondisi tersebut terlihat adanya tren peningkatan kasus bila dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 5,4/1000 KH ditahun 2019. Adapun trend AKABA (usia 1-5 Tahun) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: BPS, Kab. Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 24. Angka Kematian Anak Balita Kab. Kolaka 2016–2020

Dari Grafik tersebut di atas dapat diketahui angka kematian balita di 5 tahun terakhir terlihat sangat fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebanyak 5/1.000 KH, tahun 2017 naik tinggi ke angka 14/1.000 KH, tahun 2018 kembali turun drastis ke angka 4,5/1.000 KH, kemudian naik sedikit ditahun 2019 keangka 5,4/1.000 KH dan kemudian kembali mengalami kenaikan yang cukup drastis di tahun 2020 ke angka 13/1.000 KH. Adanya tren peningkatan di 2 (dua) tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius agar kondisi tersebut bisa diturunkan. Olehnya itu, perlu ada peningkatan upaya penanganan kematian balita misalnya pada program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Diteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK).

### **7. Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga profesional untuk ibu hamil selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan. Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, hingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Capaian Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan atau cakupan ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kesehatan (K1) dalam kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut :



Sumber: Profil Dinkes, 2021, Bappeda diolah

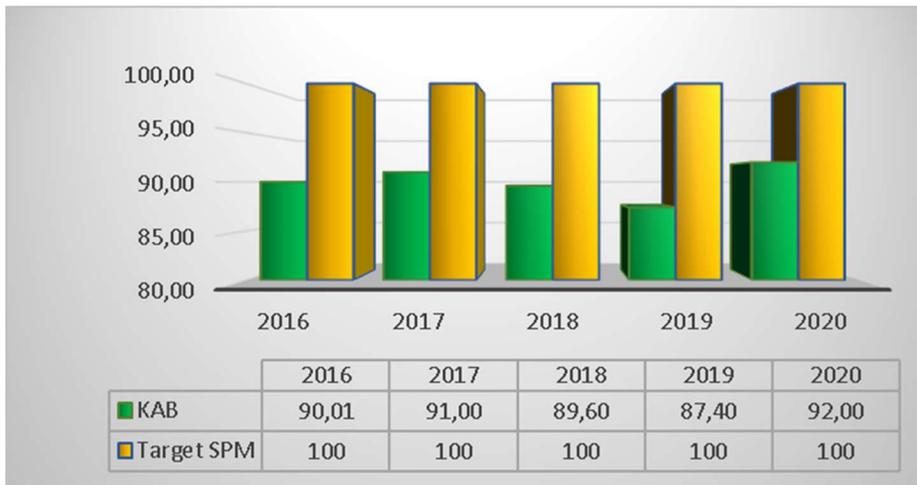
Gambar 2. 25. Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan /pemeriksaan Kesehatan (K1) Kab. Kolaka 2016 – 2020

Bila dilihat gambar diatas capaian Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan / pemeriksaan kesehatan di dua tahun terakhir sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana capaian sudah mencapai diatas 100 %. Angka tersebut menunjukkan kesan adanya tren peningkatan yang baik dari tahun ketahun dan dalam ketegori baik (tercapai). Capaian ini melampaui angka proyeksi ibu hamil yang diperkirakan. Kondisi ini dipengaruhi adanya kesepahaman dan kemudahan baik dari segi pencatatan dan pelaporan untuk Ibu hamil maupun persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **8. Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Terlatih di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.**

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan data jumlah persalinan yang ada dan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 4.368 orang atau 92%, angka ini belum mencapai target SPM . Capaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih difasilitas

pelayanan kesehatan dalam kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut :



Sumber: BPS, Profil Kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 26. Persentase Angka Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020

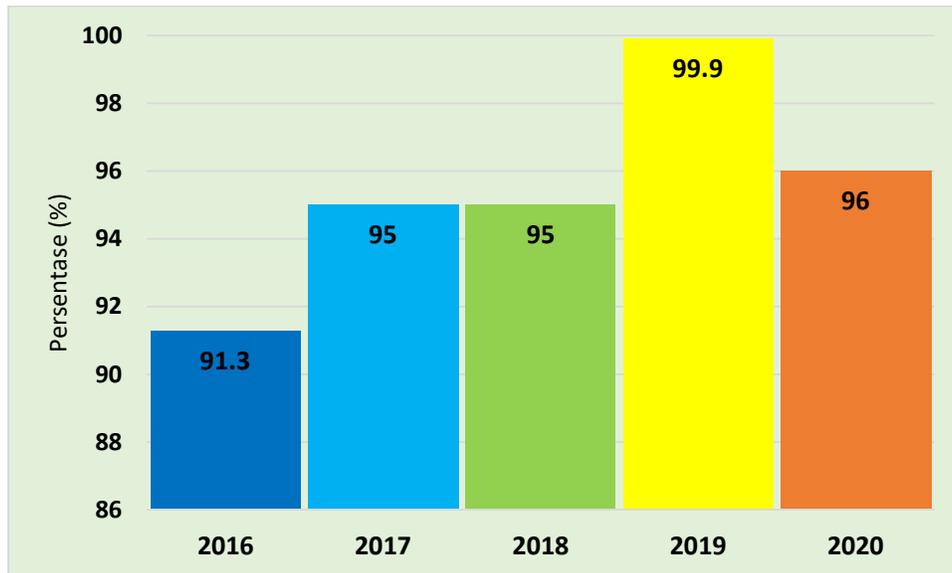
Berdasarkan Gambar diatas capaian persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih menunjukkan adanya tren peningkatan diakhir tahun 2020 sebesar 92,00 % bila dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebesar 87,40 %, Namun capaian tersebut belum mencapai target SPM ditahun 2020 sebesar 100%.

Upaya pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan khususnya dalam persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dengan menempatkan 1 desa 1 tenaga bidan dan tenaga kesehatan lainnya melalui Program Gerakan Masyarakat Mandiri (Gemari) Kesehatan, mengoptimalkan peran dan fungsi posyandu serta secara bertahap meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan.

### 9. Bayi baru lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah Pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh petugas kesehatan yang kompeten kepada neonatal/bayi baru lahir sekurang-

kurangnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir, baik di fasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Capaian Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: BPS, Profil Kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

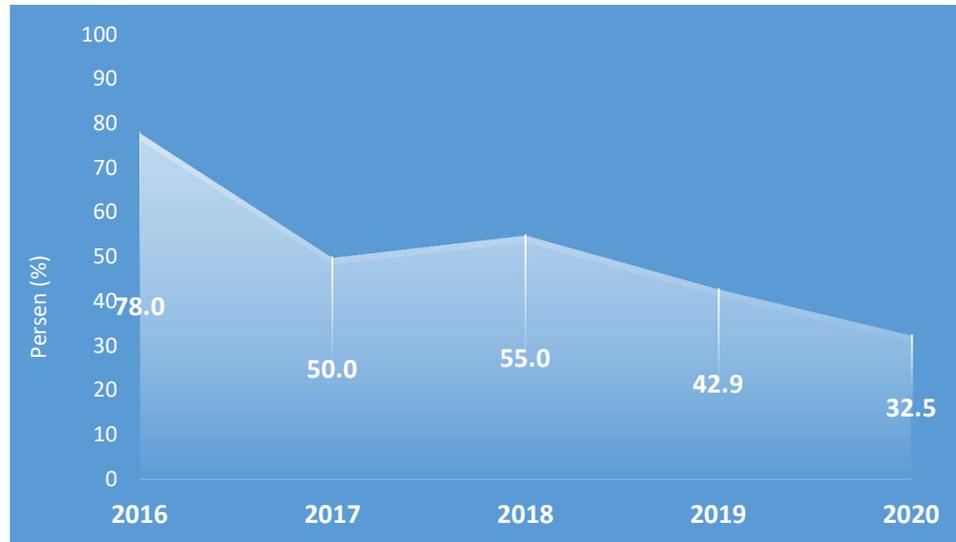
Gambar 2. 27. Persentase Angka Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020

Berdasarkan Gambar diatas capaian persalinan bayi baru lahir, dalam kuru tahun 2016 s/d tahun 2019 menunjukkan adanya tren peningkatan capaian, namun di tahun 2020 terjadi penurunan capaian sebesar 96,0%. Kondisi ini akan dijadikan perhatian khusus untuk lebih fokus dalam penanganan program kegiatan tersebut agar tren penurunan capaian tersebut tidak terulang ditahun mendatang dan harus diupayaka kedepannya untuk menaikkan capaiannya.

## 10. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan Balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan

pemerintah maupun swasta, dan UKBM. Capaian Persalinan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut :



Sumber: BPS, Profil Kesehatan, 2021, Bappeda (diolah)

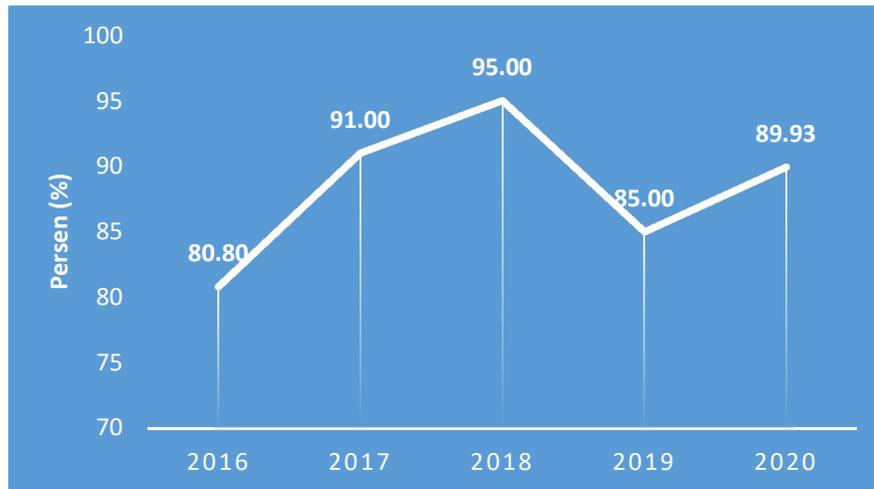
Gambar 2. 28. Persentase Angka Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar Kab. Kolaka 2016 – 2020

Berdasarkan Gambar diatas adalah capaian angka pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang menunjukkan adanya tren penurunan capaian dipriode lima tahun terakhir, dimana capaian ditahun 2016 sebesar 78,0% , dan ditahun 2020 menjadi 32,5%. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor perilaku yang tidak lagi mengontrol tumbuh kembang anak balitanya, dengan alasan anaknya telah mendapatkan pelayanan imunisasi lengkap sewaktu diusia dibawah satu tahun. Perilaku buruk ini yang perlu diperbaiki melalui penyuluhan kesehatan yang intens di masyarakat- tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak balita dipelayanan kesehtan terutama diposyandu.

### **11. Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan**

Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan adalah setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar melalui Penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia

pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 jenjang SD/MI, kelas 7 pada jenjang SMP/MTs dan kelas 10 SMA/MA yang dilakukan oleh puskesmas. Capaian anak usia pendidikan yang mendapat pelayanan kesehatan tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: BPS, Profil Kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 29. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020

Bila dilihat gambar diatas capaian Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terlihat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan diakhir tahun 2020 sebesar 89,93% . Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar. Dengan adanya kecenderungan peningkatan capaian diakhir tahun 2020 dikarenakan adanya upaya dari SKPD teknis oleh Dinas Kesehatan terus mengupayakan semaksimal mungkin penyuluhan kesehatan ke sekolah-sekolah dan juga dengan melibatkan secara komprehensif guru, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, aparat desa/kelurahan, bidan desa dan pimpinan puskesmas. Selanjutnya tidak kala pentingnya adanya keseriusan pemerintah dengan menempatkan tenaga perawat pengelola UKS (usaha kesehatan sekolah) disetiap sekolah dan setiap tahunnya jumlahnya terus bertambah, kebijakan tersebut adalah untuk memudahkan anak sekolah memperoleh akses pelayanan

kesehatan dan terlebih lagi penjangkaran/pelayanan kesehatan disekolah dapat terlaksana semaksimal mungkin serta dapat meningkatkan cakupannya.

## 12. Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan

Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan adalah Pelayanan kesehatan lanjut usia yang merupakan upaya kesehatan yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu wadah dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Capaian Warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagai berikut:



Sumber: BPS, Profil kesehatan 2021, Bappeda (diolah)

Gambar 2. 30. Persentase Warga negara usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Kab. Kolaka 2016 – 2020

Skrining kesehatan pada tahun 2016 sebesar 67 % dan pada tahun 2020 sebesar 81,95 %. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian pelayanan bagi usia lanjut yang sangat baik bila dilihat dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian dikarenakan program tersebut menjadi salah

satu program yang masuk dalam SPM dan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.

Tabel 2. 24 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSBG di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian RPJMD Kabupaten Kolaka pada RKPD tahun ke-					Ket.
			2016 K	2017 K	2018 K	2019 K	2020	
Pelayanan Kesehatan Sekunder	Cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur ( BOR)	%	72,32	63,23	65,09	68,20	50,85	
	Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS)	hari	4	4	4	3,8	4,19	
	Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI)	hari	2	3	3	2,1	4,8	

Sumber: Profil Kesehatan 2021

Penilaian indikator capaian kinerja Rumah Sakit Benyamin Guluh (RSBG) ditentukan dengan indikator cakupan Pemanfaatan Tempat Tidur ( BOR), cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) dan cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI). Adapun capaian pemanfaatan tempat tidur (BOR) pada tahun 2016 sebesar 72,32%, tahun 2017 sebesar 63,23, tahun 2018 sebesar 65,09, tahun 2019 sebesar 68,20% dan tahun 2020 sebesar 50,85% ( Idealnya 60 s/d 85% Depkes RI 2005 ) dan masih berada dibawah target RPJMD sebesar 70,28%. Untuk Indikator Cakupan Rata-rata Lama Perawatan (LOS) pada tahun 2016 rata-rata 4 hari, tahun 2017 rata-rata 4 hari, tahun 2018 rata-rata 4 hari, tahun 2019 rata-rata 3,8 hari dan tahun 2020 rata-rata 4,19 hari ( Idealnya 6 s/d 9 Hari) namun kondisi ini telah mencapai target RPJMD sebesar 4,64 Hari. Untuk indikator Cakupan Selang Waktu Penggunaan Tempat Tidur (TOI) pada tahun 2016 rata-rata 2 hari, tahun 2017 rata-rata 3 hari, tahun 2018 rata-rata 3 hari, tahun 2019 rata-rata 2,1 hari dan ditahun 2020 mengalami peningkatan akibat pandemik Covid-19 rata-rata 4,8 hari ( idealnya 1 s/d 3 hari ) dan masih berada diatas target RPJMD diatas rata-rata 2,21 Hari.

### C. Ketenagakerjaan

Bidang ketenagakerjaan difokuskan untuk menekan tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, penempatan tenaga kerja serta membuka lapangan kerja baru. Sejak tahun 2016 s/d 2020 penurunan tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut :

Tabel 2. 25. Capaian Serapan Pencari Kerja di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

URAIAN	TAHUN					Total
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah pencari kerja (org)	4.369	4.508	4.495	6.781	7.757	27.910
Pencari kerja yang ditempatkan (org)	1.644	1.060	1.645	1.188	1.009	6.546
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,58	74,9	75,6	72,68	70,45	70,45
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,68	2,97	2,18	2,10	2,10	2,10
Penempatan tenaga pendamping gemari (org)	100	100	100	100	100	100
Penempatan tenaga medis gemari (org)	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, 2021 Dinas Nakertrans

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2016 s/d 2020 jumlah pencari kerja sebanyak 27.910 orang dan berhasil ditempatkan sebanyak 6.546 orang atau 23,45% dari total pencari kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,45% dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,10%.

### D. Seni, Budaya, Pemuda Dan Olahraga

Pembangunan Seni Budaya dan Olahraga difokuskan pada dua aspek yaitu: Seni dan Budaya, serta Pemuda dan Olahraga.

#### (1) Seni dan Budaya

Kabupaten Kolaka sebagai daerah perjuangan, religi dan budaya, pembangunan budaya ditujukan dan diarahkan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai dan norma budaya daerah serta menjadikannya sebagai

norma dalam hubungan sosial kemasyarakatan ditengah derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kolaka sejak periode I hingga periode ke II tahun pertama SMS Berjaya telah memperlihatkan kemajuan signifikan, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya pada heterogenitas masyarakat Kolaka sehingga hidup damai, tentram dan kondusif. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Kolaka seperti halnya solidaritas sosial, rasa kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya masih perlu terus ditingkatkan terutama di kalangan generasi muda agar nilai budaya yang diwariskan leluhur tidak tergerus. Oleh karena itu diperlukan strategi dan upaya yang lebih kongkrit, agar generasi muda dan masyarakat dapat mengenal, mencintai budaya sesuai dengan kearifan lokal sehingga terbentuk generasi yang berkarakter dan berwawasan cinta budaya, cinta daerah dan cinta NKRI, yang diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2. 26. Capaian Pembangunan Seni dan Budaya di Kabupaten Kolaka  
Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sanggar Seni	Sanggar	9	19	22	22	22
Pembinaan Pemangku Adat	Orang	24	30	32	32	32
Pelestarian Aktualisasi Budaya	Unit	25	25	5	5	5
Pelestarian Cagar dan Benda Budaya	Unit	50	83	160	235	235

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kolaka, 2021

Dalam mendorong pengembangan dan pelestarian budaya di daerah sebagaimana tabel di atas, Pemerintah Daerah telah menjadikan program pembangunan budaya menjadi prioritas pertama yang disinergikan dengan

pendidikan dan agama. Dengan demikian eksistensi Kolaka sebagai daerah perjuangan, daerah religius dan daerah berbudaya dapat terpelihara.

## (2) Urusan Kepemudaan & Olahraga

Pembinaan generasi pemuda dilaksanakan melalui beberapa kegiatan seperti Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor, peningkatan peran pemuda dalam pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan pembinaan kepemudaan di daerah dalam kurun waktu 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 27. Indikator kegiatan Kepemudaan di Kab. Kolaka Tahun 2016 - 2020

No	Uraian Kegiatan	Volume Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Terdata	33	35	40	40	36
2	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Aktif	33	35	40	40	36
3	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Mandiri	5	10	10	10	10
4	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Nasional	-	3	4	5	5
5	Jumlah Pemuda yang Berprestasi Tk. Kab, Tk. Provinsi dan Nasional	-	10	14	15	8

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka, 2021

Sementara pembinaan dan pelaksanaan even pertandingan maupun lomba berbagai kegiatan olahraga ditahun 2020 ini tetap dilaksanakan namun dari segi jumlah dan jenis olahraga yang dipertandingkan maupun yang diperlombakan berkurang jumlah dan intensitasnya, bahkan beberapa kegiatan dihilangkan dikarenakan adanya pandemik covid-19.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum Kabupaten Kolaka merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka

dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini dibahas mengenai capaian kinerja aspek pelayanan umum yang meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

### 2.1.3.1 Layanan Umum

#### Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

##### A. Urusan Pendidikan

- **Angka Partisipasi Sekolah**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), APK dan APM. Indikator ini memberikan gambaran seberapa besar anak usia sekolah menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS, APK dan APM di hitung berdasarkan jumlah murid kelompok pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Capaian urusan wajib bidang pendidikan dasar wajar 9 tahun yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014. Indikator Capaian urusan wajib pelayanan dasar sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 28. APS, APK, APM SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>PAUD</b>						
	APS	99,72	99,72	99,83	99,88	99,78
Sekolah	APK	99,00	99,88	99,17	109,07	103,91
SD/MI	APM	85,79	85,79	86,54	88,60	99,20
Sekolah SLTP / MTs	APS	90,56	96,72	94,49	96,81	96,81
	APK	97,71	97,01	97,71	104,07	79,86
	APM	76,81	80,02	87,09	78,60	72,15

Sumber: BPS, Kolaka Dalam Angka 2021, Bappeda diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah Kabupaten Kolaka sudah di atas 90% hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam jenjang pendidikan tertentu.

Demikian juga APK maupun APM SD/MI telah mencapai diatas 85%. Meskipun demikian perlu upaya untuk peningkatan Angka Partisipasi tersebut khususnya APM SMP yang belum mencapai angka 100%.

- **Ketersediaan Gedung Sekolah/ Penduduk**

Selain indikator capaian kinerja bidang pendidikan peningkatan ketersediaan, infrastruktur sarana dan prasarana untuk mendukung capaian indikator pelayanan dasar di bidang pendidikan wajar 9 tahun telah menjadi komitmen pemerintah daerah yang telah dituangkan dalam 9 prioritas pembangunan daerah guna pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Kolaka terus mendorong untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 29. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Fasilitas Sekolah SD/MI						
	-Jumlah Gedung.	Unit	198	198	198	198	198
	-Jumlah RKB	Lokal	1.216	1.216	1.464	1.470	1.470
2	Fasilitas Sekolah SLTP/MTs						
	-Jumlah Gedung	Unit	74	74	74	74	74
	-Jumlah RKB	Lokal	363	363	363	582	893

Sumber: BPS, Kolaka Dalam Angka 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- **Rasio Guru/ Murid**

Rasio Guru/ Murid dalam hal ini adalah perbandingan jumlah guru dengan jumlah murid untuk masing-masing tingkat pendidikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 - 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 30. Rasio Guru/Murid di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
SD Sederajat					
- Guru/Murid	1/20	1/16	1/16	1/16	1/16
SMP Sederajat					
- Guru/Murid	1/16	1/14	1/14	1/14	1/14
SMA Sederajat					
- Guru/Murid	1/12	1/16	1/16	1/16	1/16

Sumber: BPS, Kolaka Dalam Angka 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- **Jumlah Lulusan dan Angka Kelulusan Siswa**

Meningkatnya jumlah angka kelulusan siswa pada berbagai jenjang pendidikan setiap tahun ajaran, menjadi harapan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Namun jika terjadi penurunan, hal tersebut perlu dicermati secara bijak dengan melihat korelasi dan sinergitas di antara siswa, guru serta orang tua dan keberhasilan yang dibangun tersebut telah memperlihatkan persentase angka kelulusan dan jumlah kelulusan siswa di Kabupaten Kolaka per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016 – 2020 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 31. Perkembangan Jumlah Lulusan Sekolah Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

Tahun	Angka Lulusan (%)	
	SD/MI	SLTP/MTs
2016	100,00	100,00
2017	100,00	100,00
2018	100,00	100,00
2019	100,00	100,00
2020	100,00	100,00

Sumber: BPS, Kolaka Dalam Angka 2021, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan data tersebut, persentase kelulusan siswa SD/MI di Kabupaten Kolaka tahun 2016 - 2020 sebesar 100% yang artinya siswa seluruhnya lulus pada jenjang pendidikan dasar.

## B. Urusan Kesehatan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- **Rasio Rumah Sakit dan Rasio Tempat Tidur Pasien per Satuan Penduduk**

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh

pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kolaka sampai awal tahun 2020 sebanyak 2 unit, terdiri dari rumah sakit milik pemerintah daerah sebanyak 1 unit dan rumah sakit BUMN sebanyak 1 unit. Angka rasio rumah sakit per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0.0084179 artinya satu rumah sakit melayani 84.179 jiwa, idealnya 1 rumah sakit melayani 100.000 penduduk, sehingga Kabupaten Kolaka dengan penduduk sebesar 237.587 jiwa maka idealnya saat ini masih membutuhkan 1 RS baru.

Sementara Rasio tempat tidur Rumah Sakit di Kabupaten Kolaka sampai tahun 2020 ketersediaan tempat tidur perawatan bagi penduduk, idealnya 1 tempat tidur untuk 1000 penduduk, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 32. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Tempat Tidur	144	144	144	221	221
Jumlah Penduduk	246.918	251.250	256.827	261.664	237.587
Rasio RS Per 1.000 penduduk	1:80.999	1:79.602	1:77.873	1:76.434	1:84.179
Rasio TT terhadap penduduk	1:5.832	1:5.731	1:5.607	1 :8.446	1:9.302

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2021

Dari gambaran tabel di atas, dalam jangka panjang kondisi rasio tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang diikuti dengan penambahan penduduk. Namun ditahun 2020 berkurangnya jumlah penduduk disebabkan karena pada tahun 2020 ini badan pusat statistik menggunakan data riil yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sementara ditahun-tahun sebelumnya menggunakan data estimasi. Kita patut bersyukur oleh karena pemerintah daerah pada tahun 2017 telah membangun rumah sakit yang berstandar nasional untuk menjawab tuntutan dan peningkatan pelayanan kesehatan

dimasa - masa mendatang yang semakin kompleks dan alhamdulillah di awal tahun 2020 rumah sakit baru tersebut telah difungsionalkan.

- **Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu terhadap Penduduk**

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Adapun Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka pada tahun 2020 adalah sebagai berikut : Angka rasio Puskesmas/Pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,535 artinya satu Puskesmas melayani 53.504 jiwa, Adapun rasio Puskesmas terhadap jumlah kecamatan pada tahun 2019 mencapai 1 : 1,17. Ini artinya bahwa terdapat beberapa kecamatan yang mempunyai Puskesmas lebih dari 1 unit.

Berikut adalah data secara lengkap mengenai rasio Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2020.

Tabel 2. 33. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	14
Jumlah Puskesmas Pembantu	37	37	37	37	37
Puskel	-	-	-	-	-
Jumlah Puskesmasdes	70	69	70	70	70
Jumlah Puskel/Pustu/Puskesmas	120	120	120	120	120
Jumlah Penduduk	246.918	251.250	256.827	261.664	237.587
Rasio Puskesmas per 1000 penduduk	1:48.6	1:47.8	1:54.5	1:53.5	1:58,9
Rasio Pustu per 1000 penduduk	1:15.0	1:14.7	1:14.4	1:14.1	1:15,5
Jumlah Kecamatan	12	12	12	12	12
Jumlah Desa/Kelurahan	135	135	135	135	135
Rasio Puskesmas per Kecamatan	1:1,7	1:1,17	1:1,17	1:1,17	1:1,17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, 2021

Dari gambaran tabel di atas, dalam jangka panjang kondisi rasio tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat yang begitu cepat. Namun data jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang dirilis BPS (Kabupaten Kolaka dalam Angka) pada tahun 2020 justru berkurang jumlahnya yang disebabkan karena data jumlah penduduk yang digunakan oleh BPS data ril, berdasarkan data jumlah penduduk sesuai yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka, sementara bila dibandingkan tahun sebelumnya selalu menggunakan data estimasi. Untuk menjawab tuntutan peningkatan pelayanan kesehatan dimasa akan datang yang semakin kompleks akan melanjutkan penguatan dan peningkatan jejaring pelayanan kesehatan pada tahun-tahun yang akan datang.

### **C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi pelayanan pemenuhan akses jalan, dan jembatan, pengelolaan air irigasi, pemenuhan pelayanan ruang terbuka hijau, pemenuhan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman.

#### **a. Kondisi Jaringan Jalan**

Program Prioritas Infrastruktur Jalan di Kabupaten Kolaka terus ditingkatkan, agar terjadi koneksi antar pedesaan, kecamatan, kawasan produktif dan kawasan setrategis untuk mempermudah akses urusan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan kualitas khususnya panjang jalan mantap yang terus diperhatikan pembangunannya.

Penambahan indikator penilaian kemantapan jalan kabupaten dari 4 indikator menjadi 5 indikator, merupakan strategi dari pemerintah pusat dalam melakukan penilaian terhadap kinerja jalan. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka, kondisi jalan mantap hingga tahun 2020 mencapai 60,85% atau sekitar 533 km, dengan demikian

jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat semakin berkurang selama 6 tahun terakhir dan tersisa kurang dari 1% di tahun 2020. Namun demikian untuk meningkatkan kinerja jalan kabupaten, tentu masih membutuhkan anggaran yang tidak sedikit karena masih tersisa 39% jalan kabupaten yang berada dalam kondisi rusak ringan dan 32,56% jalan kabupaten dalam kondisi sedang.

Secara terperinci kondisi infrastruktur jalan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 34. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi di Kab. Kolaka

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Panjang jalan (km)	876,82	877,42	876.81	876.81	876.81
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap (km)	296.21 (33.78%)	409.40 (46.69%)	487.982 (55.65%)	515.415 (58.78%)	533.566 (60.85%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (km)	157.051 (17.91%)	191.192 (21.81%)	197.291 (22.50%)	220.49 (25.15%)	248.051 (28.29%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi sedang (km)	139.163 (15.87%)	218.210 (24.88%)	290.691 (33.15%)	294.93 (33.63%)	285.515 (32.56%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan (km)	377.431 (23%)	285.773 (32.59%)	254.146 (28.98%)	327.00 (37.29%)	342.381 (39.05%)
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat (km)	203.172 (23.17%)	181.642 (20.72%)	134.689 (20.72%)	34.40 (3.92%)	0.870 (0.0009%)
Panjang Jalan Nasional (km)	361,00	361,00	361,00	361,00	361,00
Panjang jalan Provinsi (km)	18	18	18	18	18

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2021



Gambar 2. 31. Peta Jaringan Jalan Kab. Kolaka (Bappeda Kolaka, 2020)

**b. Kondisi Jembatan**

Jembatan di Kabupaten Kolaka selama kurun waktu 7 tahun (2014 - 2020) mengalami kenaikan dari 152 jembatan yang dibangun pada tahun 2014 menjadi 245 jembatan atau terjadi kenaikan 93 jembatan. Namun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak ada lagi penambahan jembatan baru. Fokus penanganan jembatan lebih kepada kegiatan rehabilitasi jembatan, sehingga jumlah jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat hingga tahun 2020 berkurang dari 113 unit ditahun 2016 dan tersisa 88 unit di tahun 2020. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan jembatan baru mengakibatkan masih banyaknya jembatan yang masih butuh pendanaan. Perincian kondisi jembatan mulai tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 35. Jumlah Jembatan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 - 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jembatan Kondisi baik (unit)	102	102	100	100	117
Jembatan Kondisi sedang (unit)	30	30	31	31	40
Jembatan Kondisi rusak ringan (unit)	43	43	44	44	31
Jembatan Kondisi rusak berat (unit)	70	70	70	70	57
Total Jumlah Jembatan (unit)	245	245	245	245	245
Persentase Jembatan Kondisi Baik (%)	41.63	41.63	40.82	40.82	47.75
Persentase Jembatan Kondisi Sedang (%)	12.24	12.24	12.65	12.65	16.33
Persentase Kondisi Rusak Ringan (%)	17.55	17.55	17.96	12.65	12.65
Persentase Kondisi Rusak Berat (%)	28.57	28.57	28.57	28.57	23.26

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2020

### c. Kondisi Jaringan Irigasi

Pembangunan irigasi yang dibangun di Kabupaten Kolaka bertujuan untuk mempertahankan produktivitas pertanian dan kelestarian kawasan lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B) seluas kurang lebih 7.400 Ha dan LP2B cadangan sebesar kurang lebih 8.100 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Kolaka. Lahan LP2B ini merupakan sawah yang berada pada Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Kolaka. Luasan sawah fungsional yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kurang lebih 51% dari luasan LP2B atau seluas 3.765 ha.

Berdasarkan data tabel di bawah, rasio jaringan irigasi dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Pengurangan jumlah Daerah Irigasi (DI) dari 72 DI menjadi 35 DI menyebabkan meningkatnya kinerja Daerah Irigasi. Sebelum dilakukan pemetaan dengan menggunakan sistem informasi geografis, data luas sawah fungsional hanya berdasarkan informasi dari para petani/pemilik lahan sehingga luasan fungsional lebih dari 7.000 ha. Namun setelah dilakukan pemetaan maka luas sawah fungsional hanya 3.765 ha. Luas fungsional yang diperkirakan inilah yang menyebabkan rendahnya rasio jaringan irigasi sebelum tahun 2019.

Tabel 2. 36. Perkembangan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kolaka

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Jaringan	%	8.72	8.72	48.85	67.74	73.96
Luas Fungsional	Ha	7.567	7.912	8.315	3.765,00	3.765,00
- Baik	Ha	659.69	689.76	4.061,93	2.550,48	2.784,70
- Sedang	Ha	2017.87	2191.02	2.580,52	288,92	120,20
- Rusak	Ha	4.889.45	5031.22	1.672,56	1.053,00	987,81

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2021

Tabel 2. 37. Perkembangan Layanan Sanitasi dan Air Minum di Kabupaten Kolaka

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Layanan Sanitasi (%)	83,39	81,58	80,64	81,70	82,71
Layanan Air Minum (%)	76,22	77,51	79,47	54,48	79,77

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2021

#### d. Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang diukur melalui ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten beserta rencana rincinya. Saat ini Kabupaten Kolaka telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kolaka Tahun 2012 – 2032, sedangkan untuk rencana rincinya berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan sedang dalam proses legalisasi Peraturan Daerah yaitu Rencana Detail Tata Ruang BWP 1 Kolaka yang meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wundulako dan Baula. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya Rencana Rinci Bagian Wilayah Perkotaan 2 yang meliputi Kecamatan Pomalaa, Rencana Rinci Kawasan Industri Pertambangan, Rencana Rinci Kawasan Bandara dan Rencana Rinci Pusat Kawasan Industri Pertambangan Pomalaa. Minimnya ketersediaan informasi tata ruang tersebut dapat menjadi penyebab penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan perencanaan fungsi ruang, selain itu juga berpengaruh terhadap kurangnya

informasi detail ketersediaan lahan untuk investasi. Capaian kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 38. Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Kab. Kolaka Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Revisi RTRW Kabupaten	Buah	-	1	1	1	1
RTRW Kab. Kolaka yang telah berkekuatan hukum (Perda)	Buah	1	1	1	1	1
RTRK/RDTR IKK	Buah	-	-	-	-	-
Yang belum berkekuatan hokum (Draft Perda)	Buah	-	1	1		
Yang belum ada RDTRK	Buah	4	4	4		
	Buah	-	-	-		

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Kolaka, 2021

#### D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pembangunan prasarana dasar permukiman pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan menyediakan pelayanan dasar. Pembangunan prasarana dasar permukiman meliputi penyediaan prasarana air bersih, sanitasi, drainase, rumah layak huni dan kawasan permukiman bebas kumuh.

Kebutuhan perumahan diperkirakan akan bertambah dari tahun ke tahun diakibatkan sebagai konsekuensi pertumbuhan penduduk dan seiring dengan perkembangan kemajuan Kabupaten Kolaka, Kondisi kebutuhan rumah bagi seluruh masyarakat Kolaka tercatat sebesar 16.236 pada tahun 2020, sedangkan rumah tidak layak huni Tahun 2020 sebanyak 3.295 unit.

Selain itu, kawasan kumuh perkotaan di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga sebesar 105,23 Ha dan yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 76,73 Ha. Turunnya presentase kawasan kumuh perkotaan sejak tahun 2016 sebesar 101,27 turun menjadi 34,72 tahun 2018 diakibatkan adanya intervensi pemerintah melalui Program KOTAKU yang menysasar 14 (empat belas) kelurahan di 2 (dua) kecamatan di wilayah perkotaan yaitu Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga.

Tabel 2. 39. Capaian sektor Perumahan dan Kawasan Perkotaan Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rumah Tidak Layak Huni (unit)	5.584	5.244	4.136	3.672	3.295
Back Log Rumah (unit)	19.785	18.215	16.715	16.613	16.236
Rumah Layak Huni (unit)	42.601	43.527	45.277	46.191	47.018
Kawasan Kumuh Perkotaan (Ha)	101,27	90,17	34,72	30,7	28,5
Bantuan RTLH (unit)	105	340	1.108	464	377
Lampu Penerangan Jalan Umum (unit)			2.089		3328

Sumber: Dinas PKP Kabupaten Kolaka, 2021

### **E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sangat berperan dalam kesinambungan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Fungsi peran menciptakan kondisi yang kondusif dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

### **F. Urusan Sosial**

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang bersifat lintas OPD terdiri atas :

Tabel 2. 40. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

NO	URAIAN INDIKATOR	VOLUME CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	15,05	13,78	12,51	11,92	11,63
2	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan (Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak Bermasalah, dll (%))	12,41	23,39	16,21	40,30	29,54
3	Persentase PMKS Lansia Yang Memperoleh Manfaat Program (%)	26,47	30,44	30,23	16,90	17,97

Sumber: Dinas Sosial Kab. Kolaka, 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa urusan sosial yang terintegrasi berbagai program lintas SKPD telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan daerah dari 15,05 % pada tahun 2016 menjadi 11,63% pada tahun 2020. Untuk total penanganan PMKS Anak Terlantar, Anak Jalanan, Anak Nakal, Anak Bermasalah, dan lain-lain, serta PMKS Lansia dari tahun 2016 sebesar 38,88% menjadi sebesar 47,51% pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,63% dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016 s/d 2020).

## Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan Pelayanan Dasar

### A. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan di bidang tertentu yang berbasis masyarakat. Hal ini sangat mendukung upaya memperluas lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja mandiri yang berkualitas.

Gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari dapat dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Tabel 2. 41. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

URAIAN	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pencari kerja (org)	4.369	4.508	4.495	6.781	7.757
Pencari kerja yang ditempatkan (org)	1.644	1.060	1.645	1.188	1.009
Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	73,58	74,9	75,6	72,68	70,45
Jumlah Penduduk Usia Kerja (org)	109.061	90.067	92.846	94.519	132.930
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,68	2,97	2,18	2,10	2,10
Penempatan tenaga pendamping gemari (org)	100	100	100	100	100
Penempatan tenaga medis gemari (org)	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Tahun 2021 / Dinas Nakertrans

Dari tabel di atas menunjukkan sejak tahun 2016 – 2020 total pencari kerja mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 4,68% pada tahun 2016 menjadi 2,10 pada tahun 2020. Selain itu pemerintah daerah melakukan pengangkatan tenaga Gemari (Gerakan Masyarakat Mandiri) tenaga pendamping desa dan tenaga medis Gemari masing-masing 100 orang pertahun.

## **B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

Pemberdayaan Perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Kolaka dilakukan dengan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu fasilitasi pemberdayaan perempuan menuju keluarga sehat dan sejahtera dengan meningkatkan keterampilan perempuan dan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Tabel 2. 42. Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka

No	Uraian Kegiatan	Volume Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Perempuan di Lembaga Pemerintahan(%)	0,45	3,10	8,8	8,8	35,45
2	Rasio KDRT	0,38	0,52	1,75	0,09	0,004
3	Indeks Pembangunan Gender	n/a	89,77	89,59	89,87	89,78
4	Persentase Partisipasi Perempuan dalam lembaga politik	13	13	13	20	20
5	Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak kekerasan	n/a	17	21	11	29

Sumber: Dinas PP-PA Kab. Kolaka, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa prosentase peran perempuan di lembaga pemerintahan dari tahun 2016 sebesar 0,45% meningkat menjadi 35,45% pada tahun 2020, demikian juga rasio KDRT dari 0,38 pada tahun 2016 menurun menjadi 0,004 di tahun 2020, sementara Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2016 BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum mengukur sampai level Kabupaten/ Kota nanti pada tahun 2017 telah dilakukan release data dimana IPG Kabupaten Kolaka sebesar 89,77 dan meningkat menjadi 89,87% pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun 2020 menjadi 89,78.

Tabel 2. 43. Realisasi Kegiatan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak tahun 2016 - 2020

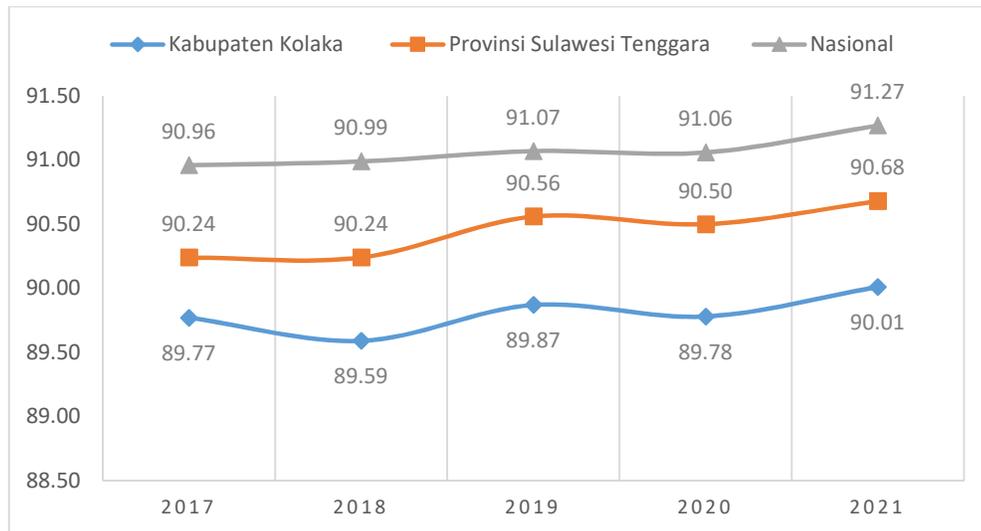
No	Uraian Kegiatan	Volume Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Program P2WKSS (Unit)	115	154	256	200	-
2	Pembinaan Ekonomi Perempuan Kegiatan P2WKSS (Org)	N/A	70	85	50	-
3	Sosialisasi Sasaran Pug (Org)	30	30	90	75	50
4	Penyuluhan Rmh Sehat Pada Masyarakat (Org)	300	311	256	265	-
5	Pembinaan Kec. Sayang Ibu (Kali)	3	3	3	2	2
6	Pemb. Forum Anak Kabupaten (Org)	200	217	192	128	288
7	Mengikuti Kongres Fan (Org)	4	4	1	1	-
8	Pendataan & Pembinaan Kasus Kekerasan Anak (Kasus)	2	4	20	5	22

9	Pendataan & Pemb. Kekerasan Rt (Kasus)	2	9	10	6	7
10	Pendataan & Pemb. Plchn Sexual Perempuan Dibawah Umur (Kasus)	7	6	7	5	19
11	Konseling Korban Perempuan Dewasa (Kasus)	-	1	5	6	4
12	Lembaga P2TP2A	0	1	1	1	1
13	PATBM	0	0	2	4	0

Sumber: Dinas PP-PA Kab. Kolaka, 2021

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

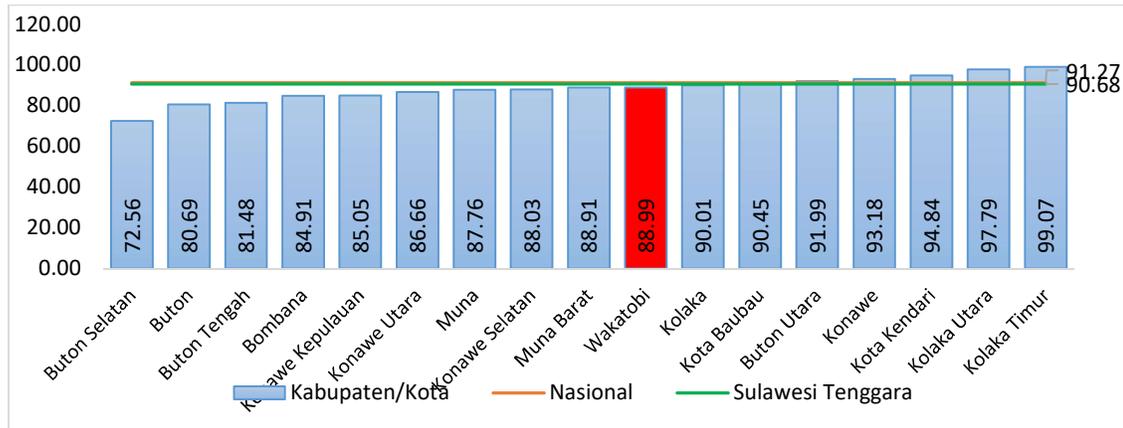
IPG Kabupaten Kolaka ditahun 2021 sebesar 90,01 meningkat dari sebelumnya tahun 2020 sebesar 98,78. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia perempuan di Kabupaten Kolaka sudah baik. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi dan Nasional, Kabupaten Kolaka masih berada di bawah IPG Provinsi dan Nasional.



Sumber: BPS kabupaten Kolaka, 2021

Gambar 2. 32. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kolaka Tahun 2017-2021

Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, IPG Kabupaten Kolaka berada dibawah IPG Provinsi dan IPG Nasional. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota IPG Kabupaten Kolaka menempati urutan ke-8 tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara.



Sumber: BPS kabupaten Kolaka, 2022

Gambar 2. 33. Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kolaka Tahun 2021

### C. Urusan Ketahanan Pangan

Mengacu pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan mengamatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, dalam kaitan ini pemerintah melakukan: pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Ketahanan pangan juga menyangkut lembaga/ instansi, dalam menyelenggarakan operasional yang sesuai dengan potensi dan budaya setempat, mengingat cakupan yang multi sektor dan multi wilayah dalam peragaman kegiatan ketahanan pangan sangat membutuhkan adanya koordinasi lintas sektoral yang mantap dan dukungan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Kolaka, guna mewujudkan ketahanan pangan daerah maupun lokal wilayah.

Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial. Berikut gambaran realisasi kinerja urusan ketahanan pangan yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 44. Realisasi Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Realisasi Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Score PPH	93,7	80,7	90,4	86,70	96,7
Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita Kabupaten						
Ketersediaan Energi per Kapita Kabupaten	(kcal/kapita/thn)	4.015	3.876	3.636	3.600	3.815
Ketersediaan Protein per Kapita Kabupaten	(gram/kapita/thn)	141,52	145,16	80,26	95,51	116,3
Penguatan Kapasitas Cadangan Pangan Masyarakat dan Pemerintah	Ton	53.980	53.088	45.611	46.000	53.929
Prosentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah	Persentase	75	75	80	85	86
Jumlah Lumbung Pangan	Unit	3	3	3	9	10
Kapasitas Lumbung	Ton	120	120	120	360	400
Rice Milling Unit (RMU)	Unit	2	2	2	6	6
Kapasitas RMU	Ton/hari	2	2	2	6	6

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2021

#### D. Urusan Pertanahan

Terkait dengan urusan pertanahan, Pemerintah Kabupaten Kolaka secara bertahap dan berkesinambungan untuk melakukan penyelesaian masalah pertanahan baik tanah milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat hak milik maupun penyelesaian masalah tanah milik masyarakat melalui mediasi bila terjadi konflik pemamfaatan dan penggunaan. Sampai dengan tahun 2020 penyelesaian hak tanah milik Pemda sebagaimana pada table berikut.

Tabel 2. 45. Data Pertanahan Milik Pemda di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

<i>Tahun</i>	Tanah yang sudah tersertifikasi (Bidang/M2)	Jumlah sertifikat (Persil)
2016	2.088.446	288
2017	2.098.448	289
2018	2.098.448	289
2019	2.234.156	303
2020	2.521.186	331

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kolaka, 2021

### **E. Urusan Lingkungan Hidup**

Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat harus memperhatikan aspek keselarasan, keserasian dan keseimbangan dengan fungsi lingkungan, yang dapat menjamin pembangunan daerah berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan mutu lingkungan dengan pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal.

Salah satu tugas dan fungsi lingkungan hidup adalah terkait pengelolaan persampahan. Cakupan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka saat ini baru mencapai tiga kecamatan yaitu Kecamatan Kolaka, Latambaga dan Wundulako. Jumlah produksi sampah perkotaan sebesar 18.343,55 ton dan jumlah sampah yang ditangani sebesar 15.256,33 ton atau persentase penanganan sebesar 83,2%, rincian per kecamatan pada tabel berikut.

Tabel 2. 46. Volume Sampah dan Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH VOLUME PRODUKSI SAMPAH (ton)	JUMLAH SAMPAH YANG DITANGANI (ton)	PERSENTASE (%)
1	Kolaka	10.057,4	8.364,7	83,2
2	Latambaga	6.961,4	5.789,8	83,2
3	Wundulako	859,4	714,7	83,2
4	Pomalaa	465,2	386,9	83,2
<b>Jumlah</b>		<b>18.343,4</b>	<b>15.256,33</b>	<b>83,2</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Persentase penanganan sampah perkotaan sebesar 83,2% dengan rincian Persentase Penanganan sampah (pengangkutan ke TPA) sebesar 72,65%, penanganan melalui Kompos sebesar 1,1% Bank Sampah / TPS3R sebesar 4,75% dan Pengurangan sampah melalui Daur Ulang sebesar 4,67% sedangkan persentase sampah yang tidak tertangani sebesar 16,83%. Pengelolaan sampah meliputi 4 kegiatan utama yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sementara di TPS, sedangkan tempat pengangkutan dan pengolahan akhir di TPA Patioso Kelurahan Mangolo seluas 10 ha.

Selain itu, terkait kualitas lingkungan di Kabupaten Kolaka, berikut ini gambaran umum dari beberapa indikator umum lingkungan hidup di Kabupaten Kolaka tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 47. Kondisi Indikator Lingkungan Hidup Kab. Kolaka 2016 – 2020

INDIKATOR	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1. Persentase Penanganan Sampah Perkotaan	97,7	98,0	93,3	95,8	83,2
2. Cakupan Pelayanan Sampah (Kecamatan)	3	3	3	3	4
3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah	3,18	2,05	1,76	1,76	0,67
4. Indeks Pencemaran Air	5,73	7,75	6,61	2,75	1,97 (skor Rata2: 56,7)

5. Indeks Pencemaran Udara	83	83	n/a	85,88	88,66
6. Indeks Tutupan Hutan	59	59	n/a	68,64	68,64
7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	50,90	51,05	n/a	73,85	72,23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

## F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Kependudukan dan Catatan sipil diarahkan untuk pemenuhan administrasi kependudukan bagi semua masyarakat agar mendapat kepastian hukum kependudukan berupa penerbitan kartu penduduk, kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian, akte perceraian dan kartu identitas anak (KIA) sebagai pendataan diri dan status seseorang sehingga dapat digunakan untuk keperluan persyarikatan penyelesaian yang berkaitan dengan status diri. Khusus untuk data KIA mulai dilaksanakan pelayanan pada tahun 2019.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (tahun 2016-2020), peningkatan pelayanan kependudukan yang dilaksanakan melalui kegiatan jemput bola (jebol). jumlah penduduk yang telah memiliki administrasi kependudukan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, dari hasil pelayanan yang dilakukan kantor pelayanan kantor kependudukan dan pelayanan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 48. Capaian Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

Jenis Pelayanan	2016	2017	2018	2019	2020
KTP	216	125.790	136.360	156.789	159,339
Kartu Keluarga (KK)	7.388	70.307	57.740	59.846	68,550
Akta kelahiran	1.658	39.496	147.265	103.876	109,490
Akta Perkawinan	984	1.280	425	509	101
Akta kematian	205	349	353	493	903
Akta perceraian	20	15	32	42	15
Akta pengangkatan anak	2	4	0	6	-
Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	0	0	0	3.718	13,542

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

### G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk meningkatkan peran kelembagaan desa dan lembaga pendukungnya, meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan, meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan peran Bumdes dan ketahanan sosial serta ketahanan lingkungan melalui pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis kearifan lokal. Perkembangan desa di Kabupaten Kolaka sampai dengan tahun 2020 mendapat nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yakni 0,6454. Dari 100 desa dimana perkembangan status desa di kabupaten kolaka terjadi peningkatan yang cukup baik dari tahun sebelumnya yakni adanya desa dengan status desa maju sebanyak 9 desa berkembang sebanyak 85 desa, tertinggal 6 desa dan desa sangat tertinggal 0 desa. Oleh karena itu fokus pemerintah daerah pada tahun 2019 – 2024 menaikkan status desa minimal 55 desa kategori desa mandiri. Rincian penyebaran status desa perkecamatan sebagaimana berikut:

Tabel 2. 49. Jumlah Lembaga BUMDES di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah lembaga BumDes	100	100	100	100	100

Sumber: DPMD Kab. Kolaka, 2021

Tabel 2. 50. Perkembangan Status Desa Kabupaten Kolaka

SPEKIFIKASI	2019	2020	2021
MANDIRI	0	0	0
MAJU	1	9	19
BERKEMBANG	66	84	78
TERTINGGAL	30	7	3
SANGAT TERTINGGAL	3	0	0

Sumber: DPMD Kab. Kolaka, 2021

## H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator kinerja untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Kolaka adalah perkembangan rasio akseptor KB aktif pada Pasangan Usia Subur (PUS). Kesadaran akan pentingnya mengatur jumlah anak pada masyarakat Kabupaten Kolaka saat ini sudah cukup baik. Berkaitan dengan itu pemerintah daerah terus melakukan penyuluhan dan pembinaan lintas instansi terkait guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran yang lebih tinggi di masyarakat agar mau ikut ber KB. Jumlah peserta KB di Kabupaten Kolaka pada tahun 2020 sebanyak 30.300 peserta dari 40.610 pasangan usia subur. Capaian indikator perkembangan peserta KB aktif tahun 2016 sampai 2020 sebagai berikut:

Tabel 2. 51. Cakupan Peserta KB Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PUS	41.471	41.471	44.721	43.477	40.610
Peserta KB (Akseptor KB)	26.859	29.612	31.533	33.600	30.300
Ratio TFR	2,92	2,82	2,6	2,6	2,68
Ratio CPR	95	96	72,00	77,28	74,61
Cakupan Peserta KB Aktif	94	95	100	96,19	87,07

Sumber: Dinas PPKB Kab. Kolaka, 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) pada tahun 2016 sebanyak 41.471 pasangan, dan yang telah mengikuti program KB atau peserta KB sebanyak 26.859 akseptor atau (64,77%), sedangkan tahun 2020 jumlah PUS sebanyak 40.610 pasang dengan jumlah akseptor KB sebanyak 30.300 akseptor (74,61%). Untuk perkembangan rasio Total Fertily Rate (TFR) mengalami penurunan dari 2016 sebesar 2,92% menjadi 2,68% pada tahun 2020, ini berarti bahwa dalam satu rumah tangga rata-rata memiliki 2 s/d 3 orang anak. Sementara untuk rasio Contraceptive Prevalence Rate (CPR) sebesar 64,77% pada tahun 2016 naik menjadi 74,61% pada tahun 2020, ini berarti bahwa persentase pemakaian perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu

metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu (tahun 2016 s/d 2020) terjadi peningkatan sebesar 9,84%.

Tabel 2. 52. Jumlah Peserta KB Per-Alkon sejak tahun 2016 - 2020

NO	KONTRASEPSI	2016	2017	2018	2019	2020
1	IUD	799	867	997	1.090	855
2	MOW	373	408	414	474	477
3	MOP	16	20	46	49	55
4	KONDOM	883	826	731	883	579
5	IMPLANT	4.633	5.310	6.282	7.081	6.893
6	SUNTIKAN	11.406	12.796	14.240	14.872	13.327
7	PIL	8.749	9.385	8.820	9.151	8.114

Sumber : Dinas PPKB 2021

### I. Urusan Perhubungan

Program prioritas perhubungan di Kabupaten Kolaka masuk dalam 9 Program prioritas SMS Berjaya ke 5 yaitu perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas. Urusan wajib perhubungan non pelayanan dasar sangat penting peranannya dalam meningkatkan aksesibilitas jasa transportasi, perdagangan, pengembangan industri lokal maupun investasi sehingga roda perekonomian sudatu daerah lebih maju. Transportasi angkutan antar propinsi di Kabupaten Kolaka pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 101 bus tahun 2016 naik menjadi 111 pada tahun 2020. Transportasi angkutan antar kabupaten dalam propinsi pada setiap tahunnya tidak mengalami kenaikan cenderung mengalami penurunan. Transportasi angkutan antar kecamatan dalam kabupaten pada setiap tahunnya mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kondisi transportasi darat dapat dilihat secara terperinci pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 53. Perkembangan Transportasi Darat Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

Uraian		Tahun				
Angkutan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Antar Propinsi	Bus	101	111	111	111	111
Antar Kabupaten	Bus	245	241	241	241	241
Dalam Prop	MPV	117	117	117	117	117
	Bus	77	29	29	20	20

Antar Kecamatan Dalam Kabupaten	MPV Kota dan Desa	35	35	35	59	59
		25	25	25	47	47

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Kolaka, 2021

Kabupaten Kolaka telah memiliki satu bandara bernama bandara Sangia Ni Bandera sejak tahun 2010 yang terletak di Kecamatan Tanggetada dengan jarak 60 km dari ibu kota Kabupaten Kolaka, jarak tempuh kendaraan darat 45 menit. Panjang landasan semula kurang lebih 900 m dan sejak tahun 2016 panjang landasan bertambah menjadi 1.400 m. Pada awal operasi pesawat udara yang mendarat di bandara tersebut 1 pesawat type ATR 72 dan saat ini pesawat yang beroperasi 2 pesawat. Perkembangan jumlah penerbangan sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 mengalami konstan rata-rata hanya 2 pesawat dengan rata-rata penerbangan 2.200 kali dalam setahun. Tahun 2017 penerbangan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan hanya 1 pesawat yang beroperasi. Secara terperinci perkembangan transportasi dan jumlah penumpang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 54. Perkembangan Transportasi Darat, Laut, dan Udara Kab. Kolaka Tahun 2016 – 2020

Urian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penerbangan (PP)	2.224	1.434	1.692	1.173	598
Jumlah Penumpang	113,004	88,500	104.430	114.008	60.258
Jumlah Penumpang Kapal laut					305.240
Jumlah Kendaraan terangkut					60.151

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Kolaka, 2021

## J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi suatu organisasi dalam mendukung kegiatan organisasi untuk pencapaian tujuan yang berkaitan dengan peningkatan mutu proses kerja di bidang pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi pada saat sekarang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju transparansi dan akuntabilitas organisasi dan menuju terciptanya good governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka. Fungsi pengembangan teknologi dan komunikasi berbasis elektronik (*e-commerce*) yang meliputi:

- (1) Pengembangan dan pembangunan Sistem Teknologi Informasi Pengembangan Jaringan dan Pusat Data;
- (2) Layanan Jasa Akses Internet;
- (3) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi kecamatan;
- (4) Pembuatan audio visual profil Kabupaten Kolaka.

Gambaran jaringan informasi dan komunikasi di Kabupaten Kolaka adalah sebagai berikut: SKPD yang berjaring internet dalam kurun waktu 4 tahun (2014-2017) mengalami kenaikan dari 20 (58,8%) tahun 2014 menjadi 29 (88 %) pada tahun 2018. Jaringan internet di Kecamatan mulai tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dari 11 (83%) tahun 2014 menjadi 11 (92%) dengan kata lain hampir semua kecamatan ada jaringan internet tinggal 1 kecamatan yang belum internet yaitu Kecamatan Polinggona. Desa yang tersambung internet setiap tahunnya cukup pesat, pada tahun 2014 31%, tahun 2015 46%, tahun 2016 61%, 2017 88% dan 2018 88%. Kondisi yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55. Urusan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Tahun 2015 – 2020

Indikator	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
SKPD Yang berjaringan internet	Jumlah SKPD/%	24 (71%)	27 (79%)	29 (85%)	30 (88%)	32 (94%)	33 (97%)
Kecamatan yg tersambung internet	Kecamatan	10 (83%)	11 (92%)	11 (92%)	11 (92%)	11 (92%)	11 (92%)
Covered Desa Internet	%	46%	61%	88%	88%		
Masyarakat komplain terhadap layanan public	%	28	24	18	18	18	18
SIM Aplikasi	Jumlah Aplikasi	12	18	22	22	24	26

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Kolaka, 2021

## K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

### 1. Jumlah Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berkembangnya ekonomi rakyat berbasis kearifan lokal, menurunnya angka kemiskinan dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Keberadaan koperasi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Jumlah koperasi aktif di kabupaten Kolaka ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 56. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Kolaka 2015-2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Aktif (unit)	27	38	42	57	82	50

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

## 2. Usaha Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sangat berperan mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja, kinerja usaha kecil dan menengah di Kabupaten Kolaka terus mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Tabel 2. 57. Jumlah Pertumbuhan UKM Tahun 2015 – 2020

Uraian	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pertumbuhan UKM	1.842	219	1.690	4.482	4.541	12.937

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM, 2021

### L. Urusan Penanaman Modal

Dalam rangka mengoptimalkan perekonomian daerah, maka Pemerintah kabupaten Kolaka masih memerlukan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan keaneka ragaman Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kolaka, pemerintah Kabupaten Kolaka menawarkan kepada Investor untuk menanamkan modalnya di kabupaten Kolaka. Data capaian Investasi yang masuk di Kabupaten Kolaka terdapat pada jumlah izin usaha yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kolaka, suasana yang kondusif juga mutlak diperlukan bagi suatu daerah guna keutuhan dan menjaring penanaman modal. Untuk mewujudkannya dengan memberikan kontribusi dan pelayanan yang prima melalui:

- (1) Pengembangan dan promosi potensi sumberdaya disegala bidang;
- (2) Mengoptimalkan dan pemberdayaan masyarakat sekitar potensi dan produk unggulan;

- (3) Pengawasan Penanaman modal;  
 (4) Peningkatan professional aparat penanaman modal;

Tabel 2. 58. Jumlah Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan tahun 2016 – 2020

U R A I A N	Satuan	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
Pelayanan Perizinan	Izin	1653	987	885	2696	2605
Pelayanan Non Perizinan	Lembar	1103	423	-	494	112

Sumber: Dinas PMPTSP, 2021

Dari beberapa hal tersebut diatas, indikator kinerja terkait dengan penanaman modal dapat dilihat dari perkembangan nilai investasi di Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 59. Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2020

No	Uraian	2019	2020
1	Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	58,2	78,5

Sumber: Dinas PM PTSP, 2021

### M. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran kondisi daerah berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Kolaka, dapat dilihat dari jumlah organisasi olahraga dan banyaknya sarana prasarana olahraga, dimana semakin banyak jumlah organisasi olahraga di daerah akan mendorong meningkatnya kepedulian dan keterlibatan pemuda dalam berolah raga. Namun sejak diawal-awal tahun 2019 sampai diakhir tahun 2020 berbagai kegiatan baik dikepemudaan maupun dikeolahragaan mengalami hambatan dan pembatasan diberbagai kegiatannya dikarenakan adanya pandemik Kovid – 19 bahkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana akibat dampakm pandemik tersebut. Beberapa kegiatan yang tetap terlaksana wajib mengacu pada protokol kesehatan.

Adapun jumlah organisasi olahraga tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kolaka sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 60. Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Jumlah organisasi olahraga	32	32	32	32	32

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga Tahun 2021

Kehadiran Pemerintah Daerah dalam membina, memfasilitasi, membangun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga serta mendukung penyelenggaraan berbagai event kegiatan olah raga di daerah sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang telah dilakukan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 61. Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2020

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Stadion	Buah	1	1	1	1	1
Gedung Olah Raga	Unit	8	9	9	9	9
Lapangan Sepak Bola	Lapangan	32	31	31	31	31
Lapangan Tennis	Lapangan	12	9	9	9	9
Lapangan Volly Ball	Lapangan	28	28	26	26	26
Lapangan Basket	Lapangan	13	13	13	13	13
Lapangan Takraw	Lapangan	16	16	16	17	17
Kolam Renang	Kolam	1	1	1	1	1
Lapangan Futsal	Lapangan	-	-	-	4	4

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka, 2021

## **N. Urusan Kebudayaan**

Kondisi daerah Kabupaten Kolaka terkait dengan urusan kebudayaan dapat dilihat dari indikator kinerja jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Urusan Kebudayaan diarahkan untuk menggali, mengembangkan, menanamkan dan melestarikan budaya daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, bahkan ditahun 2021 pemerintah daerah Kabupaten Kolaka telah

menganggarkan pembuatan master plan dan museum budaya yang akan dibangun di Kecamatan Wundulako. Komitmen tersebut merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah melalui membangun budaya yang terintegrasi dengan pembangunan pendidikan dan agama. Namun rencana pelaksanaan berbagai festival dan lomba seni dan kegiatan budaya lainnya di tahun 2020 mengalami sedikit hambatan akibat dampak pandemik covid – 19 dan hanya sebagian yang terlaksana dan pelaksanaan kegiatan tersebut tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kemeriahannya berkurang karena jumlah kepesertaan juga terbatas yang harus menyesuaikan protokol kesehatan tersebut.

Tabel 2.62. Jumlah Penyelenggaraan Seni Budaya dan Situs Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	7	7	7	7	7
2	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	9	19	19	19	19
3	Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	50	83	160	235	235

Sumber : Dinas Pariwisata dan Dinas Dikbud, 2021

## O. Urusan Perpustakaan

Gambaran umum terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

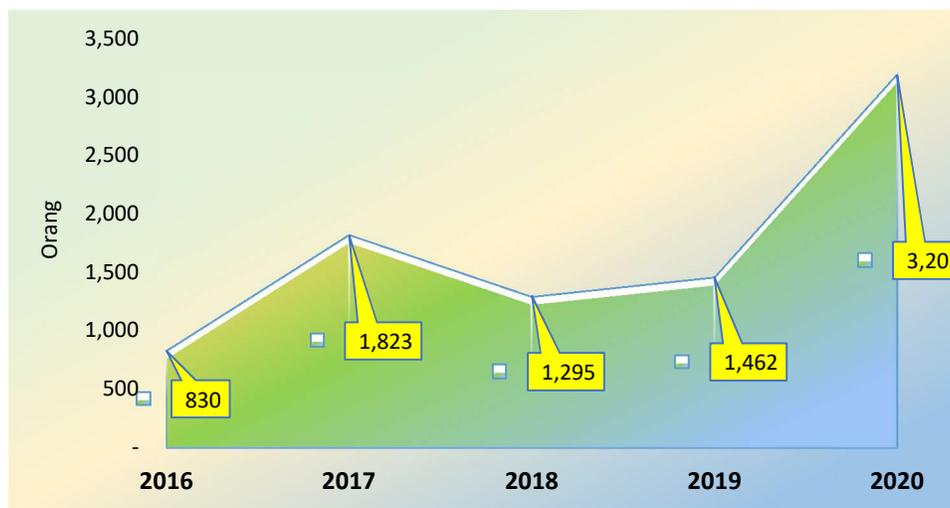
### a. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan salah satu wadah untuk menarik minat baca masyarakat karena didalamnya terdapat bahan pustaka sebagai bahan bacaan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai sarana penunjang kelangsungan pendidikan. Banyaknya jumlah perpustakaan yang terdapat di suatu daerah dapat memberikan gambaran sebagai komitmen kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum untuk menumbuhkan minat baca. Pemerintah Daerah dalam memberikan

mendorong minat baca masyarakat saat ini memiliki perpustakaan 1 unit, 1 unit perpustakaan keliling dan mendorong pada semua desa/kelurahan untuk membangun perpustakaan, saat ini sudah terbentuk perpustakaan di 135 desa/kelurahan.

### **b. Pengunjung Perpustakaan**

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya minat budaya baca masyarakat di daerah. Jumlah pengunjung ke perpustakaan milik Pemda Kabupaten Kolaka pada tahun 2020 adalah sebanyak 3.202 orang dan menunjukkan adanya progress peningkatan bila dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,462 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kolaka, 2021

Gambar 2. 34. Kunjungan Perpustakaan 2016 – 2020

Dalam urusan kearsipan ditujukan pada peningkatan pengelolaan kearsipan dengan melakukan pembinaan kearsipan dan melaksanakan akuisisi arsip dari instansi-instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka. Dengan melakukan manajemen kearsipan yang baik akan lebih memudahkan dalam menyimpan maupun pengambilan data sehingga lebih efisien, aman dan efektif.

### **2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

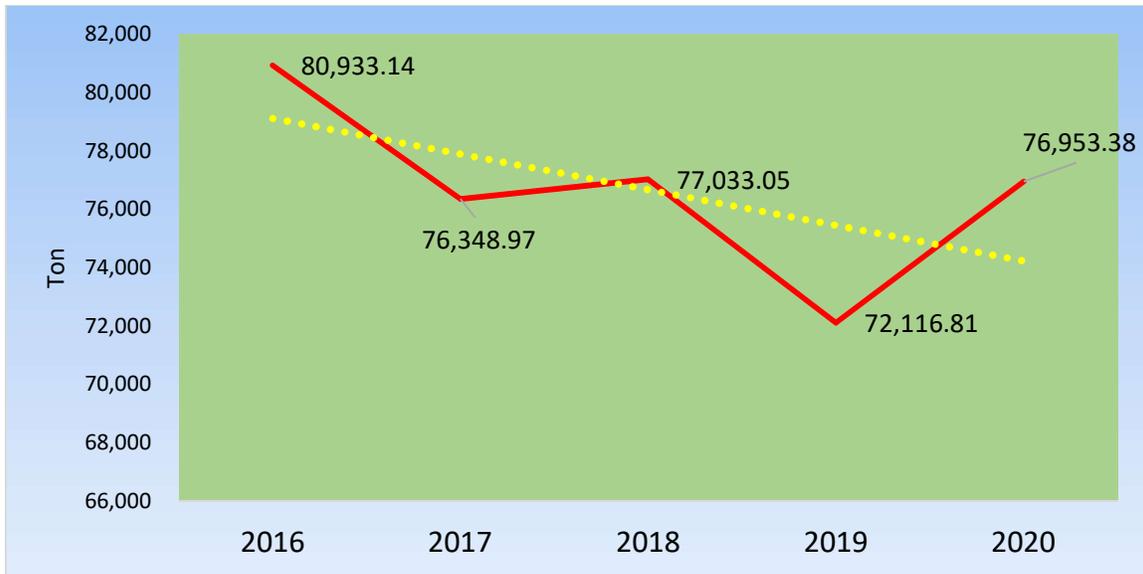
#### **A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Guna mewujudkan pembangunan pada urusan perikanan di Kabupaten Kolaka, upaya-upaya yang perlu mendapat perhatian dalam mencapai tujuan tersebut adalah peningkatan efisiensi, produksi dan produktifitas usaha tani yang berbasis perikanan.

Sasaran urusan Kelautan Perikanan adalah meningkatnya produksi perikanan serta terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumberdaya kelautan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kolaka cukup besar dan masih terbuka peluang untuk pengembangannya.

Trend produksi perikanan selama 5 tahun (Tahun 2016-2020) mengalami trend menurun baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya. Namun jika disandingkan dengan produksi tahun 2019 menunjukkan kinerja positif di tahun 2020 dimana terjadi peningkatan produksi baik produksi perikanan tangkap maupun produksi perikanan budidaya, hal tersebut dapat tercapai melalui dukungan program dan kegiatan melalui bantuan sarana produksi perikanan budidaya, bantuan sarana prasarana penangkapan ikan serta perbaikan infrastruktur perikanan baik itu pembangunan/rehabilitasi jalan produksi maupun rehabilitasi tambak dan saluran irigasi tambak.

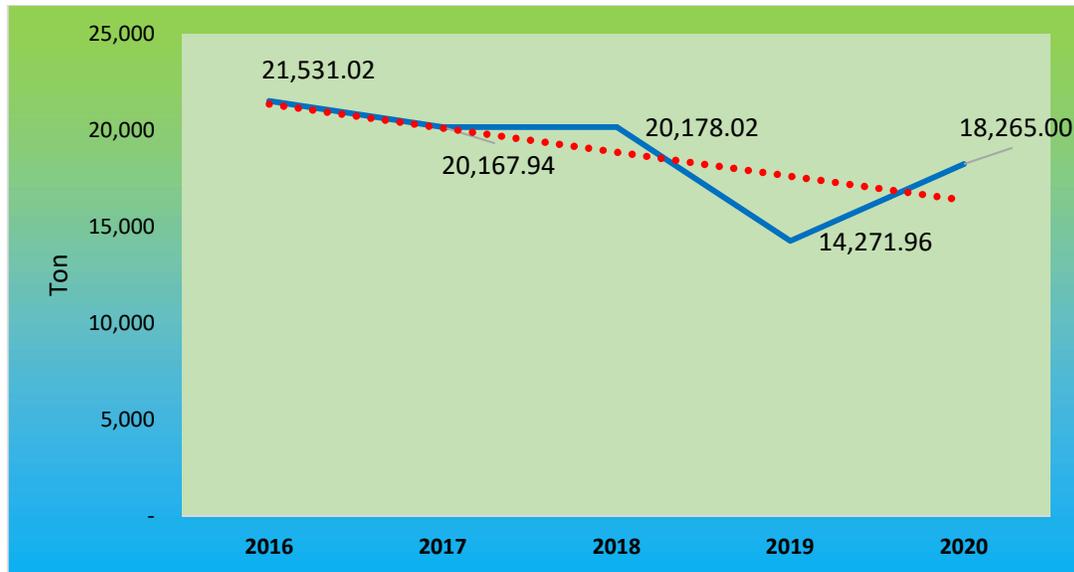
Data produksi perikanan di Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 2. 35. Total Produksi Perikanan Kab. Kolaka 2016 – 2020



Gambar 2. 36. Produksi Perikanan Budidaya Kab. Kolaka 2016-2020



Gambar 2. 37. Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kolaka 2016 – 2020

## B. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan suatu alat strategi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan pariwisata suatu daerah akan mudah di kenal sekaligus potensi - potensi unggulannya sehingga secara tidak langsung pariwisata merupakan alat promosi bagi daerah untuk menarik minat investasi.

Perkembangan kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 ini jumlah wisatawan menurun karena adanya pandemi covid 19, pemerintah melakukan kebijakan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 tersebut dimana salah satu kebijakan yaitu pembatasan sosial yang sangat berdampak pada pariwisata di kabupaten kolaka, Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kolaka pada tahun 2019 tercatat sebesar 18.760 orang dan pada tahun 2020 menurun 12.731 orang atau menurun sekitar 32 %. Namun demikian penyediaan amenities yang memadai disetiap destinasi wisata perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan waktu kunjungan wisata. Kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Kolaka perlu terus dikembangkan melalui revitalisasi maupun pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) serta

penataan yang menyeluruh termasuk fasilitas pendukung wisata, sehingga dapat berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Selain itu penyediaan akomodasi berkualitas bagi para wisatawan sangat diperlukan sehingga dapat meningkatkan *length of stay* wisatawan baik nusantara maupun manca negara yang berdampak pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat.

Potensi kepariwisataan di Kabupaten Kolaka terdiri dari wisata alam, Wisata Budaya, dan Agrowisata, serta kegiatan luar atau even.

Tabel 2. 63 Perkembangan Jumlah Objek Wisata dan Jumlah Wisatawan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
<b>A. Objek Wisata</b>					
1. Wisata Alam	20	20	20	20	21
2. Wisata Budaya	20	20	20	20	20
3. Agro Wisata	2	2	2	2	2
<b>B. Jumlah Wisatawan</b>	4.744	5.952	17.824	18.760	12.731

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Kolaka, 2021

### C. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian (dalam arti luas mencakup pertanian, perkebunan dan peternakan) di Kabupaten Kolaka dihadapkan pada tantangan dan persaingan yang semakin kuat, sehingga usaha tani diarahkan agar dapat menghasilkan produk yang bermutu, berdaya saing dan memenuhi kebutuhan pasar baik domestik maupun mancanegara.

Tabel 2. 64. Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan di Kabupaten Kolaka Tahun 2016–2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Tanaman Pertanian					
	Produksi tanaman pangan (ton)					
	Padi Sawah	97.835,69	85.877,14	114.202,68	94.330,06	75.450,53
	Jagung	11.641,17	15,00	15.303,60	16.516,35	10,066.32
	Kedelai	4.024	7.055	3.257,36	236,44	0
	Ubi Kayu	4.207,14	7.773,60	4.250,83	8.829,88	7,896.26
	Ubi Jalar	584,28	381,76	501,06	1.627,11	1,291.64
	Kacang Hijau	19,513	-	28,95	22,55	22.24
2.	Produksi Hortikultura (kw):					
	Produksi Sayur–sayuran (Kw)					

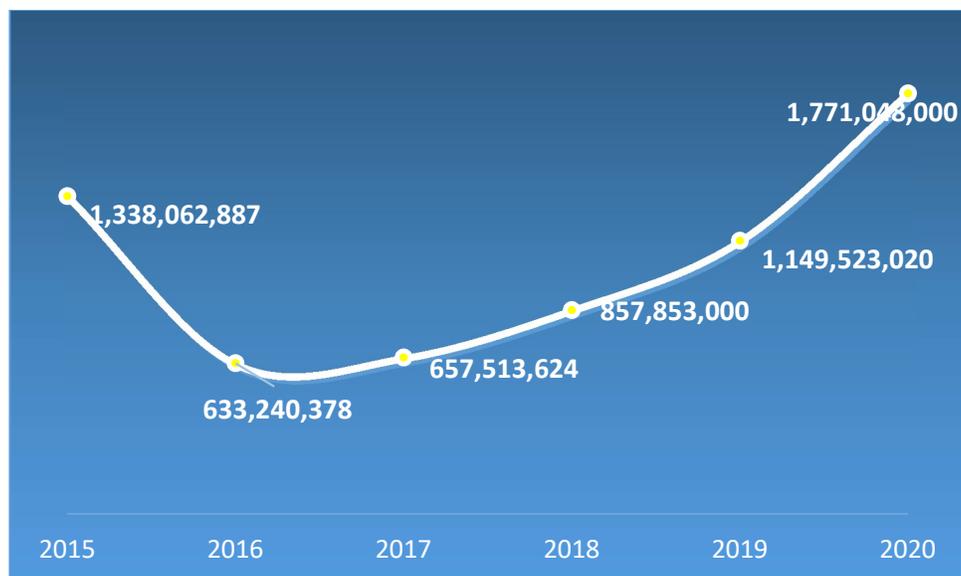
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	a.Kacang Panjang	1.963	2.000	2.809	1.692	2,090
	b.Kangkung	1.556	1.700	5.101	2.709	3,231
	c. Cabe Rawit	779	850	2.017	2.529	7.057
	d.Tomat	934	1000	1.600	822	1,378
	e. Bayam	820	1000	3.356	1.956	2,527
	Produksi Buah– buahan : (Kw)					
	a.Durian	10.615	5.067	14.644	61.446	25.465
	b.Mangga	19.565	8.948	28.281	44.692	15.813
	c.Langsat	9.602	746	7.260	17.841	22.616
	d.Jeruk Siam/Keprok	15.883	5.112	3.003	28.625	59.204
	e.Pisang	14.919	14.007	23.956	63.578	46.158
3.	Produktivitas Lahan Pertanian					
	Produktivitas Tanaman pangan (ton/ha)					
	Padi Sawah	5,31	5,23	5,21	50,03	44.48
	Jagung	5,19	1,60	5,40	62,38	47.96
	Kedelai	2,00	5,00	1,52	20,74	-
	Ubi Kayu	25,97	37,92	37,92	305,11	283.63
	Ubi Jalar	10,82	11,93	11,93	277,19	230.65
	Kacang Hijau	0,75	0,82	0,82	8,35	9,04
	Hortikultura :					
	Produktivitas Sayur–sayuran (Kw/Ha)					
	a.Kacang Panjang	7,32	7,2	22,1	6,24	22
	b.Kangkung	7,9	8,4	35,9	13,96	36
	c.Cabe Rawit	6,13	6,5	14,8	4,09	191
	d.Tomat	5,99	6,2	21,1	5,2	21
	e. Bayam	5,09	6,0	28,4	11,44	28
	Produktivitas Buah– buahan: (Kw/Ha)					
	a.Durian	496	73	33	140	140
	b.Mangga	198	58	79	100	109
	c.Langsat	546	64	37	177	248
4.	Produksi komoditi Perkebunan (Ton)					
	a. Kopi	202.26	203.19	152,42	147,76	148,06
	b. Lada	1.190,30	1.223,92	1.253,31	1.257,77	1,362,26
	c. Jambu Mete	283,79	275,33	288,57	290,49	374,56
	d. Vanili	3,03	0,53	0,53	0,55	0,55
	e. Kakao	10.039,54	9.496,23	9.152,03	9.594,75	10,346,9
	f. Kepala Sawit	572.41	1.811,48	7.135,75	3.580,71	3,679,78
	g. Cengkeh	6.843.01	5.947,40	6.327,01	6.466,04	6.621,14
	h. Kelapa Dalam	3.561.86	3.585,11	3.634,56	3.655,02	3.720,31
5	Luas Tanam Perkebunan(Ha)					
	a. Kopi	524.55	515,05	505,55	508,70	517,04
	b. Lada	2.014,32	2.168,97	2.265,39	2.277,69	2.277,19
	c. Jambu Mete	1.721,93	1.667,13	1.664,88	1.509,43	1.516.43
	d. Vanili	77,85	46,50	46,50	46,50	46,50
	e. Kakao	29.570,44	29.391,29	29.515,66	29.449,16	29.506,77
	f. Kepala Sawit	4.924,02	4.938,22	4.954,07	4.923,94	4.923,94
	g. Cengkeh	12.887,32	13.600,62	13.727,34	13.744,72	13.761,97
	h. Kelapa Dalam	3.793,92	3.996,57	4.019,87	4.024,12	4.015,12
6.	Produksi Hasil Ternak(Kg)					
	a. Daging	1.154.487	1.249.252	1.594.281	1.185.783	1.443.174
	b. Telur	501.179	516.501	539.219	123.107	1.574.621

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2021  
Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Kolaka, 2021

#### D. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Kolaka saat ini berada di urutan keempat dalam berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kolaka. Fasilitasi sektor perdagangan melalui penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk menarik investor, pengembangan dan perluasan guna akselerasi perdagangan serta memperkuat dan memperbaiki struktur perdagangan baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung.

Untuk perdagangan antar pulau, Kabupaten Kolaka telah mengantarpulaukan beberapa komoditas hasil bumi dan laut diantaranya hasil tanaman perkebunan, hasil hutan, perikanan dan peternakan. Nilai perdagangan antar pulau Kabupaten Kolaka ditunjukkan sebagai berikut:



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka, 2021

Gambar 2. 38. Nilai Perdagangan Antar Pulau Kab.Kolaka 2015-2020 (Rp.000)

Disisi sarana perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kolaka telah membangun sarana perdagangan untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat baik yang bersumber dari dana APBN maupun dana APBD.

Tabel 2.65. Jumlah Pasar yang terbangun di Kab.Kolaka 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pembangunan Pasar dan Gudang (unit)	5	3	-	3	2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka,2021

Dalam kurun 5 tahun terakhir 2016-2020 di Kabupaten Kolaka telah terbangun 13 unit pasar dan 1 unit gudang. Jumlah Pasar di Kabupaten Kolaka sampai dengan tahun 2020 berjumlah 28 unit yang terdaftar di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pasar rakyat memerlukan perhatian khusus agar eksistensi pasar rakyat betul-betul tetap bisa survive di antara pasar modern.

### E. Urusan Perindustrian

Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Adapun capaian urusan perindustrian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.66. Realisasi Capaian Urusan Perindustrian Kab. Kolaka 2015-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Bantuan Peralatan (Set)	3	8	11	4	21
Pembangunan Sentra IKM (unit)	2	24	-	-	-
Pembangunan Workshop Tenun Adat (unit)	1	-	-	-	-
Pembangunan Gedung Saos Cabe (unit)	-	1	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kolaka,2021

### 2.1.3.3. Fokus Urusan Penunjang Pemerintahan

#### A. Penunjang Perencanaan

Untuk melaksanakan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kolaka, mempunyai kewenangan :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang Perencanaan Kabupaten Kolaka.

Tabel 2. 67. Capaian Kinerja Bidang Perencanaan Tahun 2016 – 2020

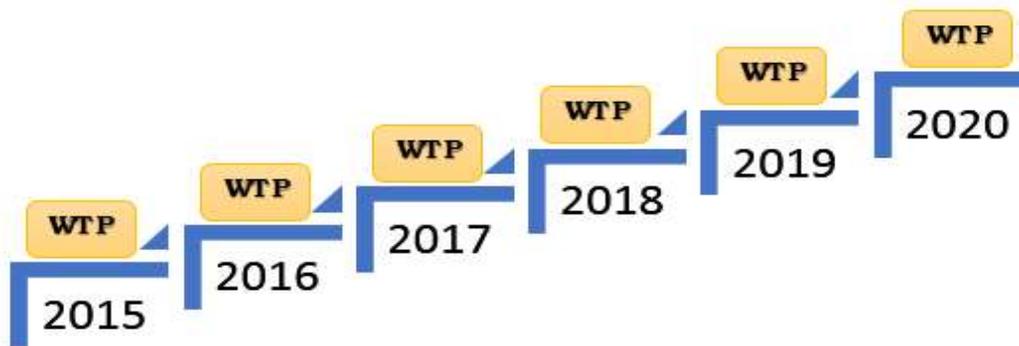
No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJPD 2005-2025)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (RPJMD 2014-2019)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda (RTRW 2012-2032)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : Bappeda, 2021

## B. Penunjang Keuangan

Pemerintah kabupaten Kolaka telah memiliki laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sejak 5 tahun berturut-turut. Hal ini merupakan komitmen bersama eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan anggaran yang baik, transparan dan akuntabel, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta bentuk kerja keras seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam mengelola keuangan dengan baik, Kesesuaian laporan keuangan yang telah dilaksanakan sesuai standard akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kolaka terus berkomitmen dalam melakukan tata kelola keuangan yang baik.



Sumber : BKAD,2021

Gambar 2. 39. Capaian kinerja bidang keuangan Tahun 2015 – 2020

## C. Penunjang Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia dimana arah kebijakannya melakukan tertib administrasi kepegawaian ASN yang terintegrasi dengan system informasi kepegawaian, melaukan pendidikan dan pelatihan formal serta pendidikan penjenjangan. Sampai dengan tahun 2020 pelayanan urusan kepegawaian yang telah dilakukan sebagai mana pada table berikut:

Tabel 2. 68. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian Kabupaten Kolaka

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	34	34	34	34	34
2	Jumlah mutasi ASN pada Instansi pemerintah	295	767	125	239	87
3	Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat pimpinan pada instansi pemerintah	19	12	13	19	26
4	Jumlah seleksi JPT Pratama pada instansi pemerintah	9	7	0	12	0

Sumber: BKPSDM Kab. Kolaka, 2021

### E. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan di daerah dilaksanakan Inspektorat Kabupaten dengan fokus pengawasan diarahkan pada pembinaan, tata kelola administrasi keuangan serta mengevaluasi hasil tindak lanjut dari hasil rekomendasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK. Kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana pada table berikut :

Tabel 2.69. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang Pengawasan Kabupaten Kolaka

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemeriksaan Reguler (KALI)	20	16	20	20	24
2	Penyelesaian terhadap temuan (%)	85	85	30	75	79
3	Pemeriksaan Khusus (KALI)	69	71	6	8	8

Sumber: Inspektorat Kab. Kolaka, 2021

### F. Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Unsur fungsi penunjang penelitian dan pengembangan di daerah dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka yang diharapkan dapat memberikan telaahan dan kajian terhadap berbagai

permasalahan yang dihadapi oleh daerah sebagai masukan dalam proses penyusunan perencanaan. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Balitbang Kabupaten Kolaka sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2. 70. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan pengembangan Kabupaten Kolaka

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kajian dan penelitian yang dijadikan bahan perumusan kebijakan	-	6	7	2	1
2	Jumlah hasil kajian dan penelitian yang telah didesiminasi	-	-	1	1	-

Sumber: Balitbang Kab. Kolaka, 2021 (diolah)

#### 2.1.3.4 Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat nilai nilai kebangsaan bagi seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi konflik sosial, terbangunnya rasa kebangsaan, toleransi antara suku agama dan ras sehingga tercipta hubungan sosial kemasyarakatan yang saling menghormati, gotong royong, suasana yang kondusif di dalam masyarakat.

Tabel 2. 71. Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Tahun 2016 – 2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah LSM (lembaga)	26	28	28	30	43
Jumlah Ormas (lembaga)	18	21	21	21	14
Jumlah OKP (lembaga)	5	5	5	5	6
Jumlah Lembaga keagamaan (Lembaga)	5	5	5	5	5
Jumlah Partai Politik (Parpol)	12	12	12	12	12

Sumber: Badan Kesbangpol Kab. Kolaka, 2021

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek daya saing daerah pada umumnya terkait dengan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

Aspek kemampuan ekonomi daerah untuk memicu daya saing daerah dapat dilihat melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Adapun angka konsumsi rumah tangga perkapita Kabupaten Kolaka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 72. Perkembangan komponen Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Kolaka Tahun 2016 – 2019

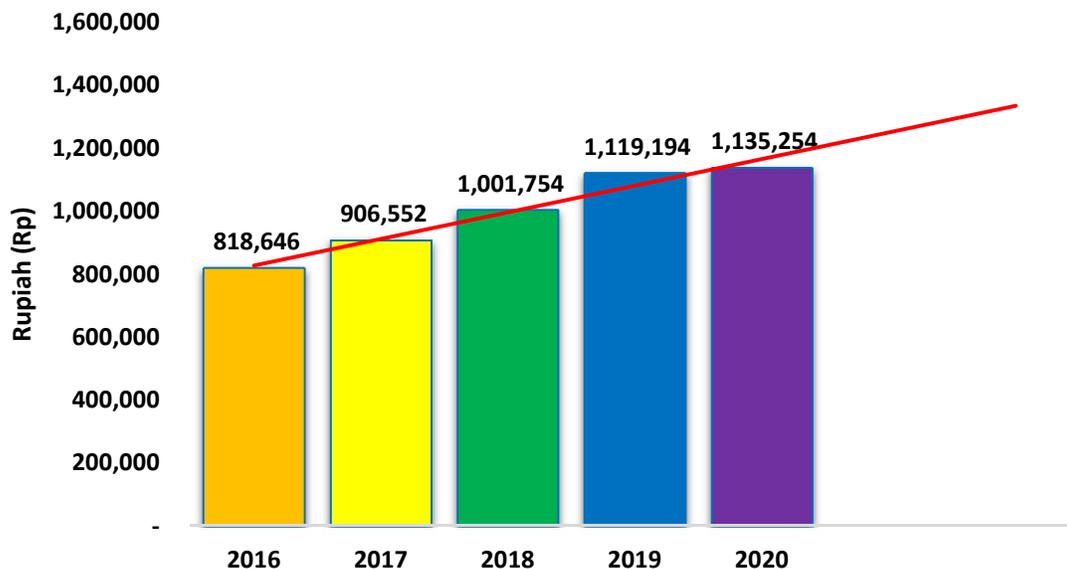
URAIAN	2016	2017	2018	2019
ADHB (milyar)	4.927,66	5.382,27	5.856,68	6.386,97
ADHK (milyar)	3.923,88	4.116,03	4.346,35	4.596,45
Proporsi terhadap PDRB (ADHB)	26,82	25,22	24,61	24,14
Proporsi terhadap PDRB (ADHK)	25,78	24,50	24,27	23,99
Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga (ADHB)	9,78	9,23	8,81	9,05
Pertumbuhan Konsumsi Rumah tangga (ADHK)	7,04	4,90	5,60	5,75

Sumber: BPS Kolaka Dalam Angka, 2021

### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun di luar negeri. Termasuk pula di sini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga. Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi/pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk.



Sumber: Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2. 40. Pengeluaran per kapita sebulan (Rp) Kab. Kolaka 2016 - 2020

Tabel 2.73. Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan menurut kelompok Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2020

No.	Komoditas/Comodities	Pengeluaran (Rp) Expenditure	Persentase Percentage
1	Padi-Padian/Grains	75.542	12,79
2	Umbi-Umbian/Tubers	5.105	0,86
3	Ikan, Udang, Cumi, Kerang/ Fish, Shrimp, Squid, Scallop	79.752	13,50
4	Daging/ Meats	9.136	1,55
5	Telur dan Susu/Eggs and Milk	37.921	6,42
6	Sayur-Sayuran/Vegetables	35.055	5,94
7	Kacang-Kacangan/Beans	8.084	1,37
8	Buah-Buahan/Fruits	48.010	8,13
9	Minyak dan Kelapa/Oil and Coconut	12.021	2,04
10	Bahan Minuman/ Beverage Ingredients	16.575	2,81
11	Bumbu-Bumbuan/ Spices	15.281	2,59
12	Bahan Makanan Lainnya/Other Consumption	8.224	1,39
13	Makan Minuman Jadi/ Prepared Foods and Beverages	163.143	27,62
14	Rokok dan Tembakau/Cigaret and Tobacco	76.776	13,00
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>590.624</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Tabel 2.74. Rata-rata Pengeluaran per Kapita sebulan menurut kelompok bukan Makanan (rupiah) Kab, Kolaka Tahun 2020

No.	Komoditas Comodities	Pengeluaran (Rp) Expenditure	Persentase Percentage
1	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga/ Housing and Household Equipment	268.436	49,29
2	Aneka Barang dan Jasa/ Miscellaneous, Goods and Services	102.537	18,83
3	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	44.304	8,13
4	Barang Tahan Lama/ Durable Goods	74.790	13,73
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi/ Taxes, Retribution and Insurance	33.297	6,11
6	Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri/ Party and Ceremonial Supplies	21.266	3,90
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>544.630</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

Tabel 2. 75. Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita sehari (kkal) Menurut kelompok makanan di Kabupaten Kolaka Tahun 2020

No.	Komoditas	Rata-Rata Konsumsi Kalori Perkapita
1	Padi-Padian/Grains	1.005,37
2	Umbi-Umbian/Tubers	77,00
3	Ikan, Udang, Cumi, Kerang/Fish, Shrimp, Squid, Scallop	116,92
4	Daging/Meats	25,35
5	Telur dan Susu/Eggs and Milk	66,59
6	Sayur-Sayuran/Vegetables	42,96
7	Kacang-Kacangan/Beans	36,80
8	Buah-Buahan/Fruits	94,36
9	Minyak dan Kelapa/Oil and Coconut	234,09
10	Bahan Minuman/Beverage Ingredients	101,43
11	Bumbu-Bumbuan/Spices	15,46
12	Bahan Makanan Lainnya/Other Consumption	57,66
13	Makanan Minuman Jadi/Prepared Foods and Beverages	477,80
14	Rokok dan Tembakau/Cigaret and Tobacco	-
<b>Jumlah/ Total</b>		<b>2.351,79</b>

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

## B. Fokus Kewilayahan/Infrastruktur

Gambaran terhadap aspek daya saing Kabupaten Kolaka dalam hal kewilayahan dan infrastruktur dapat dijabarkan sebagai berikut:

### a. Fokus Kewilayahan

Daya saing daerah dalam fokus kewilayahan dapat digambarkan salah satunya melalui luasan wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam konteks tata ruang, penggunaan lahan di suatu daerah terbagi menjadi menjadi dua jenis kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya inilah yang kemudian menjadi potensi wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pembangunan dan aktivitas masyarakat.

Tabel 2.76. Luasan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kab. Kolaka

Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
	(ha)	%
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
Hutan Lindung	109.174,8	43.92
Sempadan Sungai	2.391,2	0.96
Hutan Suaka	8.070,0	3.25
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
Hutan Produksi	74.538,6	29.98
Perkebunan	23.755,2	9.56
Sawah	8.520,5	3.43
Lahan Kering/Hortikultura	665,5	0.27
Permukiman	13.075,8	5.26
Pertambangan	83.99,7	3.38
<b>JUMLAH</b>	<b>328.364,3</b>	<b>100</b>

Sumber: Revisi RTRW Kab. Kolaka

#### b. Fokus Infrastruktur

Dalam konteks daya saing infrastruktur, Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah yang cukup baik, hal ini dapat dilihat dari infrastruktur daerah yang diuraikan dalam tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.77. Kondisi Infrastruktur Jalan di Kab. Kolaka

Kondisi Jalan	Panjang Jalan	
	Km	%
Baik	260,559	29,72
Sedang	264,992	30,22
Rusak	262,326	29,92
Rusak Berat	88,94	10,14
	<b>876,817</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, 2021

Tabel 2.78. Kondisi Infrastruktur Irigasi di Kab. Kolaka

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio Jaringan Primer	Km/ha	1,37	1,59	1,59	1,6	1,6
Panjang Saluran	Km	14,29	17,88	17,88	18,00	18,00
- Baik	Km	7,43	10,55	12,16	13,68	13,68
- Sedang	Km	1,57	4,11	2,86	1,80	1,80
- Rusak	Km	5,29	3,22	2,86	2,52	2,52
Persentase						
Baik		52%	59%	68.09%	76%	76%
Sedang		11%	23%	15.02%	10%	10%

	Kurang		37%	18%	16,89%	14%	14%
Rasio Jaringan Sekunder	Km/ha		0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Panjang Saluran	Km		141,63	149,03	158,00	160,77	160,77
- Baik	Km		73,65	87,93	107,59	122,18	125,00
- Sedang	Km		15,58	34,28	23,73	16,08	15,77
- Rusak			52,4	26,83	26,70	22,51	20,00
Persentase							
	Baik		52%	59%	68,09%	76%	77,75%
	Sedang		11%	23%	15,02%	10%	9,81%
	Rusak		37%	18%	16,89%	14%	12,44%
Rasio Jaringan Tersier	Km/ha		n/a	0,02	0,02	0,02	0,02
Panjang Saluran	km		206,34	206,34	206,34	206,34	206,34
- Baik	km		7,11	9,24	37,31	42,11	42,11
- Tanah	km		199,23	197,10	169,03	164,23	164,23
Persentase							
	- Baik	3,5%	4%	18%	20%	20,41%	20,41%
	- Tanah	96,5%	96%	82%	80%	79,59%	79,59%

Sumber: Dinas PUPR & Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Kolaka, 2021

## C. Fokus Iklim Berinvestasi

### 1. Angka Kriminalitas

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi Akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong investasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka akan memberikan jaminan keamanan yang kondusif kepada semua investor yang akan menanamkan modalnya, kenyamanan berusaha, ketertiban pada lokasi usaha dan memfasilitasi bila muncul permasalahan di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas usaha investasinya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan rasa aman tersebut baik ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa, melalui koordinasi yang terpadu disemua tingkatan, sosial kegiatan, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam berbagai aktivitas di masing-masing wilayah, sehingga tumbuh rasa memiliki dan pada akhirnya akan dapat di

wujudkan suasana kondusif, Untuk memperkuat daya saing daerah di bidang investasi.

Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan. Terkait dengan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kolaka relatif terkendali, yang ditunjukkan dengan kecilnya angka kejahatan dan kekerasan yang terjadi pada kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020. Berikut ini gambaran keamanan dan ketertiban yang terjadi di Kabupaten Kolaka selama 5 (lima) tahun terakhir.

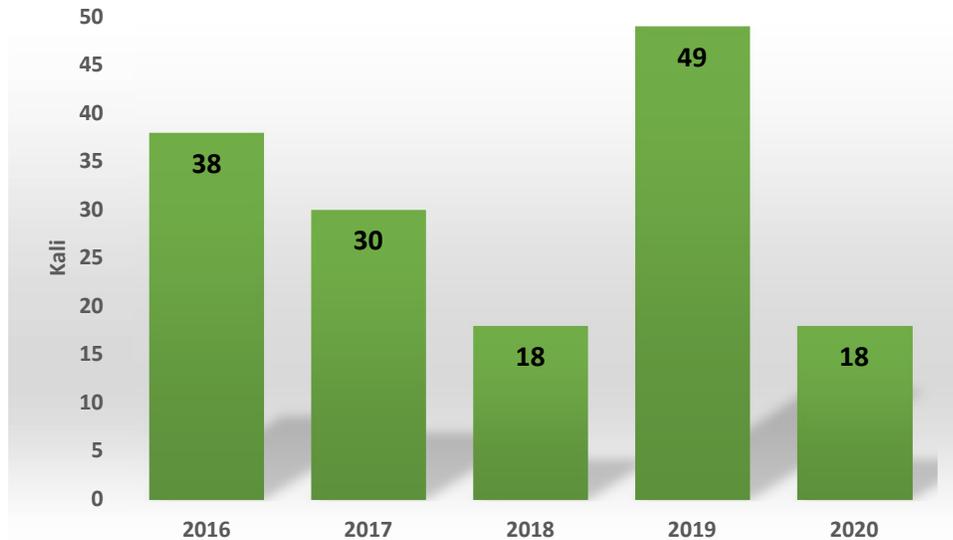
Tabel 2.79. Jumlah Tindak Kriminal Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Narkoba	28	82	23	26	30
2	Kasus Pembunuhan	1	-	1	-	4
3	Kasus Kejahatan Seksual	24	21	2	4	2
4	Kasus penganiayaan	125	90	51	1	3
5	Kasus pencurian	158	196	23	38	26
6	Kasus penipuan	45	34	18	15	9
7	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	769	574	299	341	258
8	Angka kriminalitas (tindak kriminal/jml Pddk)	0,003	0,002	0,001	0,001	0,001

Sumber : BPS, Kolaka Dalam Angka 2021

## 2. Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok



Sumber : BPS, Kolaka Dalam Angka 2021

Gambar 2.41. Jumlah Demonstrasi/Unjuk rasa Kabupaten Kolaka Tahun 2016-2020

#### D. Fokus Sumber Daya Manusia

##### Tingkat Pendidikan Penduduk

Salah satu indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu daerah adalah tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah.

Tabel 2. 80. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2020

Karakteristik	Tidak/ belum pernah bersekolah	Masih Sekolah			Tidak Bersekolah lagi	Jumlah
		SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Keatas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis Kelamin						
Laki-laki	4,91	14,61	5,32	8,92	66,23	100,00
Perempuan	5,43	14,90	6,07	7,32	66,28	100,00
Kelompok Pengeluaran						
40 Persen terbawah	6,43	20,22	6,26	6,54	60,55	100,00
40 Persen tengah	4,37	12,91	5,58	10,04	67,09	100,00
20 Persen teratas	4,37	6,35	4,83	7,45	74,99	100,00
Kabupaten Kolaka	5,16	14,75	5,68	8,15	66,26	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Kolaka Dalam Angka 2021

## **BAB III**

### **GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya mendukung pembiayaan pelaksanaan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada bab ini disajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah meliputi gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir, dan kerangka pendanaan proyeksi APBD lima tahun kedepan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

#### **3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu**

Kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat pencapaian realisasi keuangan yang mencakup pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Analisis kinerja keuangan masa lalu juga dilakukan terhadap penerimaan

daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui trend yang terjadi dalam pengelolaan keuangan guna menentukan proyeksi pendapatan yang akan diterima dan belanja yang akan dikeluarkan pada masa yang akan datang.

### **3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Kolaka tahun 2014 – 2020 disajikan berikut ini:

#### **3.1.1.1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
2014	830.461.654.484,69	786.146.691.539,18	94,66	-
2015	1.173.999.359.790,69	1.051.038.969.703,04	89,53	33,70
2016	1.237.300.224.951,00	1.060.246.937.012,98	85,69	0,88
2017	1.155.004.172.504,00	1.083.491.774.906,79	93,81	2,19
2018	1.163.021.556.384,00	1.155.131.428.043,92	99,32	6,61
2019	1.333.673.162.027,00	1.285.755.146.905,95	96,41	11,31
2020 <sup>*)</sup>	1.320.689.584.985,00	1.217.640.949.135,00	92,20	-5,30
<b>RATA-RATA</b>			<b>93,09</b>	<b>8,23</b>

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Selama tahun 2014-2020, secara umum kinerja pendapatan daerah Kabupaten Kolaka realisasinya mengalami peningkatan dari Rp. 786,14 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 1,21 triliun pada tahun 2020, dengan tingkat realisasi pendapatan rata-rata mencapai 93,09% dan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 8,23%.

Tabel 3.2  
Kontribusi Komponen Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP REALISASI PENDAPATAN DAERAH (%)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>*)</sup>	RATA - RATA
Pendapatan Asli Daerah	8,62	6,31	6,82	11,30	8,76	8,73	9,64	<b>8,60</b>
Dana Perimbangan	74,86	81,77	82,37	74,98	74,14	76,39	72,06	<b>76,65</b>
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16,52	11,91	10,81	13,72	17,10	14,88	18,30	<b>14,75</b>

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi pendapatan daerah selama tahun 2014-2020 didominasi oleh sumber Dana Perimbangan dengan proporsi rata-rata sebesar 76,65%, disusul Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 14,75%, sedangkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah baru mencapai 8,60%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur penerimaan pendapatan daerah masih belum kokoh atau tingkat kemandirian rendah, karena ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat masih sangat tinggi.

Tabel 3.3  
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

URAIAN	KINERJA REALISASI TAHUN (%)							RATA-RATA
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)	
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>100,96</b>	<b>111,07</b>	<b>75,07</b>	<b>98,10</b>	<b>95,67</b>	<b>96,18</b>	<b>86,06</b>	<b>94,73</b>
Pajak daerah	88,49	113,68	61,28	117,64	112,89	125,27	95,37	102,09
Retribusi daerah	63,51	50,53	57,23	84,58	70,14	41,89	38,05	57,99
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	100	100	117,40	100	97,83	106,64	91,16	101,86
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	147,70	142,94	82,02	95,59	93,06	93,12	94,12	106,94
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>101,27</b>	<b>96,94</b>	<b>91,30</b>	<b>97,38</b>	<b>103,68</b>	<b>99,49</b>	<b>103,99</b>	<b>99,15</b>
Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	112,52	79,48	123,52	73,68	152,52	108,16	151,61	114,50
Dana alokasi umum	100	100	100	100	100	99,64	99,14	99,83
Dana alokasi khusus	100	100	69,27	96,00	96,53	93,94	98,50	93,46
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>71,28</b>	<b>55,00</b>	<b>62,14</b>	<b>75,86</b>	<b>85,41</b>	<b>83,27</b>	<b>65,43</b>	<b>71,20</b>
Pendapatan hibah	-	-	-	-	99,87	91,74	36,40	32,57
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	103,13	112,40	133,02	186,30	46,53	52,06	49,23	97,52
Dana penyesuaian dan otonomi khusus / dana transfer lainnya	100	85,42	100	100	100	100	99,52	97,85
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	90,77	103,17	94,66	101,58	100	-	-	70,03
Pendapatan lainnya yang sah	24,61	10,02	16,17	29,47	102,44	-	-	26,10

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Kinerja realisasi pendapatan daerah tahun 2014-2020 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah kinerja realisasinya mencapai rata-rata 94,73%, Dana Perimbangan sebesar 99,15% dan kinerja realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 71,20%. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menunjukkan kinerja tertinggi mencapai 106,94%, sementara Retribusi Daerah menunjukkan kinerja terendah sebesar 57,99%. Untuk komponen Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak menunjukkan kinerja tertinggi mencapai 114,50%, sedangkan Dana Alokasi Khusus menunjukkan kinerja terendah sebesar 93,46%. Pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus/Dana Transfer Lainnya menunjukkan kinerja tertinggi mencapai 97,85%, sementara Pendapatan lainnya yang sah menunjukkan kinerja terendah sebesar 26,10%.

Rincian realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014-2020 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

URAIAN	REALISASI (Rp)							RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>786.146.691.539,18</b>	<b>1.051.038.969.703,04</b>	<b>1.060.246.937.012,98</b>	<b>1.083.491.774.906,79</b>	<b>1.155.131.428.043,92</b>	<b>1.285.755.146.905,95</b>	<b>1.217.640.949.135,00</b>	<b>8,23</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>67.736.378.890,18</b>	<b>66.365.244.972,04</b>	<b>72.323.532.837,98</b>	<b>122.419.728.540,79</b>	<b>101.143.712.550,92</b>	<b>112.252.727.632,95</b>	<b>117.401.742.530,00</b>	<b>12,40</b>
Pajak daerah	11.239.818.647,00	13.468.690.269,00	19.473.081.222,00	21.709.254.556,00	26.840.689.637,00	37.442.463.464,00	35.574.740.549,00	22,34
Retribusi daerah	15.474.043.043,00	6.722.624.315,00	6.469.870.326,00	10.877.707.724,00	7.588.637.291,00	6.181.101.861,00	7.520.314.704,00	-3,22
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	6.967.282.790,00	7.635.197.237,00	8.963.835.169,00	10.697.823.072,00	10.466.131.383,00	12.019.453.382,00	11.479.604.880,00	9,09
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	34.055.234.410,18	38.538.733.151,04	37.416.746.120,98	79.134.943.188,79	56.248.254.239,92	56.609.708.925,95	62.827.082.397,00	17,41
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>588.539.667.464,00</b>	<b>859.446.803.132,00</b>	<b>873.287.766.802,00</b>	<b>812.455.981.080,00</b>	<b>856.406.097.729,00</b>	<b>982.174.788.342,00</b>	<b>877.457.005.293,00</b>	<b>8,35</b>
Bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak	66.138.071.464,00	105.064.921.132,00	64.788.541.235,00	38.901.754.505,00	105.899.786.043,00	150.980.884.548,00	121.963.768.315,00	29,36
Dana alokasi umum	454.342.506.000,00	572.933.352.000,00	593.123.363.000,00	582.704.093.000,00	582.742.370.000,00	611.181.698.000,00	550.288.497.000,00	3,80
Dana alokasi khusus	68.059.090.000,00	181.448.530.000,00	215.375.862.567,00	190.850.133.575,00	167.763.941.686,00	220.012.205.794,00	205.204.739.978,00	31,04
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>129.870.645.185,00</b>	<b>125.226.921.599,00</b>	<b>114.635.637.373,00</b>	<b>148.616.065.286,00</b>	<b>197.581.617.764,00</b>	<b>191.327.630.931,00</b>	<b>222.782.201.312,00</b>	<b>10,64</b>
Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	32.619.200.000,00	35.710.290.135,00	45.612.692.447,00	6,20
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya	21.912.948.185,00	23.881.862.199,00	37.274.092.373,00	33.702.497.286,00	30.007.167.153,00	38.260.381.796,00	36.186.598.265,00	11,10
Dana penyesuaian dan otonomi khusus / dana transfer lainnya	88.629.697.000,00	88.938.003.000,00	61.871.545.000,00	78.405.600.000,00	91.174.449.000,00	117.356.959.000,00	140.982.910.600,00	10,30
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya	2.100.000.000,00	2.386.968.000,00	2.190.000.000,00	10.157.968.000,00	11.000.000.000,00	0,00	0,00	46,26
Pendapatan lainnya yang sah	17.228.000.000,00	10.020.088.400,00	13.300.000.000,00	26.350.000.000,00	32.780.801.611,00	0,00	0,00	2,24

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2014-2020 mengalami peningkatan dari Rp. 67,73 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 117,40 milyar di tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,40%. Selama periode tersebut pertumbuhan PAD disumbang paling tinggi oleh pertumbuhan pos Pajak Daerah rata-rata sebesar 22,34%, kemudian pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah rata-rata sebesar 17,41% dan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan rata-rata sebesar 9,09%, sedangkan pos Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar -3,22%.

Realisasi Dana Perimbangan selama tahun 2014-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,35%. Selama periode tersebut Dana Perimbangan naik dari Rp. 588,53 milyar menjadi Rp. 877,45 milyar. Pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan disumbang oleh pertumbuhan pos Dana Alokasi Khusus yang mencapai rata-rata 31,04%, kemudian pos Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak rata-rata sebesar 29,36% dan yang terendah pertumbuhan pos Dana Alokasi Umum rata-rata sebesar 3,80%.

Selama tahun 2014-2020 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan peningkatan dari Rp. 129,87 milyar menjadi Rp. 222,78 milyar dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 10,64%. Pada periode tersebut, pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tumbuh rata-rata sebesar 46,26%, pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya rata-rata sebesar 11,10%, pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Dana Transfer Lainnya rata-rata sebesar 10,30% dan pos Pendapatan Hibah rata-rata sebesar 6,20% serta pos Pendapatan Lainnya yang Sah rata-rata sebesar 2,24%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah selama tahun 2014-2020, antara lain :

- 1) Belum optimalnya realisasi retribusi daerah.
- 2) Tingkat kesadaran wajib retribusi yang belum maksimal.
- 3) Adanya perubahan peraturan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK).
- 4) Belum optimalnya bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi.

5) Adanya kebijakan-kebijakan terkait wabah Covid-19 pada tahun 2020.

### 3.1.1.2. Belanja Daerah

Selain dari sisi sumber pendapatan, kinerja pelaksanaan APBD juga dapat dilihat pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari kas umum daerah, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi dan pengesahan.

Secara umum komponen belanja terdiri dari :

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT REALISASI (%)	PERTUMBUHAN REALISASI (%)
2014	814.471.943.466,36	824.057.433.779,00	101,18	-
2015	1.182.344.830.287,54	1.046.447.926.610,00	88,51	26,99
2016	1.248.736.938.540,89	1.052.680.350.859,00	84,30	0,60
2017	1.166.738.472.247,87	1.081.752.241.817,00	92,72	2,76
2018	1.176.351.158.547,50	1.126.355.842.597,00	95,75	4,12
2019	1.369.795.381.847,42	1.276.340.969.550,00	93,18	13,32
2020 <sup>*)</sup>	1.362.657.747.967,37	1.245.409.359.439,00	91,40	-2,42
<b>RATA-RATA</b>			<b>92,43</b>	<b>7,56</b>

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Selama tahun 2014-2020, secara umum kinerja belanja daerah Kabupaten Kolaka realisasinya mengalami peningkatan dari Rp. 824,05 milyar pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp. 1,24 triliun pada tahun 2020, dengan tingkat realisasi serapan belanja rata-rata mencapai 92,43% dan rata-rata pertumbuhan realisasi belanja setiap tahunnya sebesar 7,56%.

Tabel 3.6  
Kontribusi Komponen Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

URAIAN	KONTRIBUSI TERHADAP REALISASI PENDAPATAN DAERAH (%)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	RATA - RATA
Belanja Tidak Langsung	52,32	45,59	49,39	51,63	50,60	45,08	45,09	<b>48,53</b>
Belanja Langsung	47,68	54,41	50,61	48,37	49,40	54,92	54,91	<b>51,47</b>

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuknya, realisasi belanja daerah selama tahun 2014-2020 didominasi oleh Belanja Langsung dengan proporsi rata-rata sebesar 51,47%, sementara Belanja Tidak Langsung sebesar 48,53%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur alokasi belanja daerah lebih dari setengahnya digunakan untuk belanja publik.

Tabel 3.7  
Kinerja Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka  
Tahun 2014-2020

URAIAN	KINERJA REALISASI TAHUN (%)							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>	RATA-RATA
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>97,81</b>	<b>95,47</b>	<b>89,91</b>	<b>95,27</b>	<b>97,07</b>	<b>93,71</b>	<b>87,98</b>	<b>93,89</b>
Belanja pegawai	97,14	95,44	89,66	93,81	96,21	91,98	90,30	93,51
Belanja hibah	226,29	94,95	91,48	96,21	96,05	91,54	86,49	111,86
Belanja bantuan sosial	46,37	75,79	96,37	89,96	97,45	97,85	72,65	82,35
Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa	97,66	98,51	91,89	99,89	99,83	98,64	89,81	96,60
Belanja tidak terduga	32,50	48,68	0,00	34,65	86,62	54,45	57,48	44,91
<b>Belanja Langsung</b>	<b>105,15</b>	<b>83,41</b>	<b>79,46</b>	<b>90,13</b>	<b>94,43</b>	<b>92,75</b>	<b>94,41</b>	<b>91,39</b>
Belanja pegawai	106,39	94,40	97,03	91,76	96,85	91,15	95,36	96,13

Belanja barang dan jasa	111,26	91,46	86,69	94,80	92,29	90,64	92,64	94,25
Belanja modal	98,79	76,67	73,63	86,33	95,92	94,79	95,98	88,88

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Kinerja realisasi belanja daerah tahun 2014-2020 menunjukkan bahwa Belanja Tidak Langsung kinerja realisasinya mencapai rata-rata 93,89% dan kinerja realisasi Belanja Langsung sebesar 91,39%. Pada komponen Belanja Tidak Langsung, Belanja Hibah menunjukkan kinerja tertinggi mencapai 111,86%, sementara Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa terendah sebesar 0%. Untuk komponen Belanja Langsung, Belanja Pegawai menunjukkan kinerja tertinggi mencapai 96,13%, sedangkan Belanja Modal menunjukkan kinerja terendah sebesar 88,88%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014-2020 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

URAIAN	REALISASI (Rp)							RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)	
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>824.057.433.779,00</b>	<b>1.046.447.926.610,00</b>	<b>1.052.680.350.859,00</b>	<b>1.081.752.241.817,00</b>	<b>1.126.355.842.597,00</b>	<b>1.276.340.969.550,00</b>	<b>1.245.409.359.439,00</b>	<b>7,56</b>
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>431.125.286.668,00</b>	<b>477.114.822.999,00</b>	<b>519.931.281.285,00</b>	<b>558.537.392.286,00</b>	<b>569.925.857.787,00</b>	<b>575.339.492.386,00</b>	<b>561.500.622.503,00</b>	<b>4,61</b>
Belanja pegawai	386.350.207.268,00	410.564.528.199,00	414.258.050.960,00	392.679.800.211,00	377.696.078.689,00	396.476.093.330,00	387.529.250.318,00	0,14
Belanja hibah	11.778.451.400,00	6.200.000.000,00	3.278.764.000,00	12.705.400.000,00	42.990.776.398,00	11.337.710.000,00	12.644.720.750,00	61,55
Belanja bantuan sosial	2.415.653.000,00	2.577.968.000,00	5.019.584.000,00	1.344.000.000,00	5.724.000.000,00	4.559.000.000,00	1.594.000.000,00	44,78
Belanja bagi hasil kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0
Belanja bantuan keuangan kepada provinsi / kabupaten / kota dan pemerintahan desa	29.930.975.000,00	56.798.644.800,00	97.374.882.325,00	151.288.452.075,00	142.648.802.700,00	162.149.889.056,00	136.738.677.270,00	34,81
Belanja tidak terduga	650.000.000,00	973.682.000,00	0,00	519.740.000,00	866.200.000,00	816.800.000,00	22.993.974.165,00	454,31
<b>Belanja Langsung</b>	<b>392.932.147.111,00</b>	<b>569.333.103.611,00</b>	<b>532.749.069.574,00</b>	<b>523.214.849.531,00</b>	<b>556.429.984.810,00</b>	<b>701.001.477.164,00</b>	<b>683.908.736.936,00</b>	<b>11,10</b>
Belanja pegawai	42.392.126.760,00	52.128.620.775,00	51.938.818.396,00	59.345.462.330,00	62.325.594.207,00	70.675.195.187,00	85.006.949.418,00	12,59
Belanja barang dan jasa	185.054.632.645,00	223.834.406.241,00	176.154.271.018,00	207.861.027.383,00	238.228.644.579,00	276.415.957.108,00	300.184.109.229,00	9,48
Belanja modal	165.485.387.706,00	293.370.076.595,00	304.655.980.160,00	256.008.359.818,00	255.875.746.024,00	353.910.324.869,00	298.717.678.289,00	14,64

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Realisasi Belanja Tidak Langsung selama tahun 2014-2020 mengalami peningkatan dari Rp. 431,12 milyar pada tahun 2014 menjadi Rp. 561,50 milyar di tahun 2020 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,56%. Selama periode tersebut realisasi pos Belanja Tidak Langsung menunjukkan pertumbuhan tertinggi rata-rata mencapai 454,31%. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan Belanja Tidak Langsung yang sangat signifikan pada tahun 2020 dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Sementara itu realisasi pos Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa menunjukkan pertumbuhan terendah sebesar 0%.

Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2014-2020 juga mengalami peningkatan dari Rp. 292,93 milyar menjadi Rp. 683,90 milyar, dengan pertumbuhan realisasi rata-rata sebesar 11,10%. Realisasi pos Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 14,64%, sementara realisasi pos Belanja Barang dan Jasa menunjukkan pertumbuhan rata-rata terendah sebesar 9,48%.

#### **3.1.1.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan/pengeluaran pembayaran diakui pada saat diterima/dikeluarkan pada/dari rekening kas umum daerah.

Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Kolaka terdiri dari :

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;

- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; dan
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Rincian realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014-2020 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

URAIAN	REALISASI (Rp)							RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)	
<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>54.256.212.736,67</b>	<b>8.845.670.496,85</b>	<b>8.667.713.589,89</b>	<b>11.590.069.073,71</b>	<b>13.346.634.373,50</b>	<b>36.122.219.820,42</b>	<b>41.161.950.805,37</b>	<b>24,63</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>67.267.453.400,67</b>	<b>16.345.670.496,85</b>	<b>9.167.713.589,89</b>	<b>16.090.069.073,71</b>	<b>13.346.634.373,50</b>	<b>42.122.219.820,42</b>	<b>44.730.516.605,37</b>	<b>26,77</b>
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	67.267.453.400,67	16.345.470.496,85	9.167.713.589,89	16.090.069.073,71	13.346.634.373,50	42.122.219.820,42	44.730.516.605,37	26,77
Penerimaan kembali dana bergulir	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>13.011.240.664,00</b>	<b>7.500.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>4.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>3.568.565.800,00</b>	<b>87,30</b>
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	9.130.000.000,00	7.500.000.000,00	500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	3.568.565.800,00	91,38
Utang perhitungan pihak ketiga	3.881.240.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Selama tahun 2014-2020, realisasi pembiayaan daerah mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2014-2016 realisasi pembiayaan daerah mengalami penurunan, setelah itu pada tahun 2017-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Secara keseluruhan selama periode 2014-2020, realisasi pembiayaan menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 24,63%. Realisasi pembiayaan tersebut didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang secara rata-rata tumbuh sebesar 26,77%.

### **3.1.2. Neraca Daerah**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah terkait aset, kewajiban dan ekuitas dana. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Kolaka selama tahun 2014-2020 selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10  
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

URAIAN	TAHUN							RATA-RATA PERTUMBUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>1)</sup>	
<b>ASET</b>								
<b>Aset Lancar</b>	<b>74.520.013.347,47</b>	<b>51.391.552.750,93</b>	<b>50.949.484.037,16</b>	<b>56.951.083.908,56</b>	<b>95.443.368.108,09</b>	<b>98.634.641.096,48</b>	<b>61.238.505.801,61</b>	<b>2,15</b>
Kas	16.481.550.577,85	19.199.152.142,05	17.400.609.707,87	13.453.227.589,50	42.129.037.639,42	45.564.645.168,37	13.562.120.976,06	22,58
Piutang	50.348.132.164,95	24.959.664.839,38	26.353.390.277,29	36.940.928.930,74	45.428.869.228,86	44.500.980.981,21	38.519.689.150,56	0,47
Persediaan	7.418.490.988,00	7.232.735.769,50	7.195.484.052,00	6.556.927.388,32	7.885.461.239,81	8.569.014.946,90	9.156.695.674,99	3,98
Belanja dibayar dimuka	271.839.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
<b>Aset Tetap</b>	<b>2.286.400.163.711,26</b>	<b>1.354.996.172.188,29</b>	<b>1.595.537.385.926,52</b>	<b>1.591.314.912.647,18</b>	<b>1.695.454.177.255,90</b>	<b>1.914.675.587.179,62</b>	<b>2.085.187.264.154,54</b>	<b>0,86</b>
Tanah	264.247.228.465,00	334.280.716.385,00	349.155.167.977,00	337.117.123.947,00	339.511.830.217,00	343.243.708.461,00	352.003.697.070,00	5,31
Peralatan dan mesin	317.774.617.595,85	280.773.612.103,41	313.043.754.936,41	328.865.219.571,37	319.511.908.621,30	374.872.863.607,40	433.018.319.148,70	5,82
Gedung dan bangunan	566.728.700.571,94	532.933.022.689,91	613.943.189.910,35	645.378.026.256,35	696.474.000.811,34	781.053.263.146,34	835.327.291.255,04	6,89
Jalan, irigasi dan jaringan	1.098.237.587.157,00	1.124.828.446.205,64	1.264.714.216.745,94	1.348.665.077.208,94	1.492.621.532.092,71	1.605.538.087.315,71	1.648.860.275.142,71	7,07
Aset tetap lainnya	27.101.024.736,41	17.942.881.330,41	20.327.863.315,41	26.735.495.965,41	32.195.018.080,41	38.598.323.057,41	42.655.623.831,41	10,31
Konstruksi dalam pengerjaan	12.311.005.185,06	19.848.916.675,44	60.471.331.296,70	98.556.818.910,70	120.533.731.213,40	225.603.062.893,00	305.451.492.838,40	78,96
Akumulasi penyusutan	0,00	(955.611.423.201,52)	(1.026.118.138.255,29)	(1.194.002.849.212,59)	(1.305.393.843.780,26)	(1.454.233.721.301,24)	(1.532.129.435.131,72)	8,30
<b>Aset Lainnya</b>	<b>39.195.493.299,00</b>	<b>128.217.154.601,80</b>	<b>40.517.944.028,72</b>	<b>170.307.257.441,95</b>	<b>182.865.122.266,71</b>	<b>101.721.691.577,25</b>	<b>95.664.479.878,47</b>	<b>72,68</b>
Aset tak berwujud	1.231.987.450,00	1.544.886.537,92	3.708.987.450,00	2.685.450.000,00	7.862.936.123,76	8.536.833.123,76	9.749.057.637,76	58,91
Akumulasi amortisasi	0,00	0,00	(1.348.956.157,08)	(791.938.750,00)	(1.578.232.362,39)	(2.431.915.674,77)	(3.406.821.438,55)	25,36
Kas yang dibatasi penggunaannya	0,00	167.105.000,00	167.105.000,00	167.105.000,00	163.235.000,00	163.235.000,00	163.235.000,00	-0,39
Aset lain-lain	37.963.505.849,00	126.505.163.063,88	177.113.730.690,95	168.246.641.191,95	213.111.607.157,26	239.021.752.163,26	306.412.331.248,26	55,87
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	0,00	0,00	(139.122.922.955,15)	0,00	(36.694.423.651,92)	(143.568.213.035,00)	(217.253.322.569,00)	40,43

URAIAN	TAHUN							RATA-RATA PERTU M-BUHAN
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 <sup>*)</sup>	
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>53.127.430.270,88</b>	<b>57.108.667.369,94</b>	<b>55.741.835.287,15</b>	<b>60.241.835.287,15</b>	<b>50.923.377.099,60</b>	<b>54.673.377.959,86</b>	<b>58.241.943.759,86</b>	<b>1,93</b>
Investasi non permanen	2.498.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
Investasi permanen	50.628.542.270,88	57.108.667.369,94	55.741.835.287,15	60.241.835.287,15	50.923.377.099,60	54.673.377.959,86	58.241.943.759,86	2,82
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2.453.243.100.628,61</b>	<b>1.591.713.546.910,96</b>	<b>1.742.746.649.279,55</b>	<b>1.878.815.089.284,84</b>	<b>2.024.686.044.730,30</b>	<b>2.169.705.297.813,21</b>	<b>2.300.332.193.594,48</b>	<b>0,52</b>
<b>KEWAJIBAN</b>								
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>128.037.823,00</b>	<b>81.084.034.032,16</b>	<b>89.007.325.310,33</b>	<b>33.888.043.446,66</b>	<b>12.824.698.939,47</b>	<b>23.429.937.548,49</b>	<b>21.053.880.999,48</b>	<b>10531,07</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	6.425.976,00	58.392.081,16	826.586.845,00	70.193.057,00	6.738.382,00	27.916.386,00	72.460.667,00	402,70
Pendapatan Diterima Di muka	0,00	636.789.349,00	1.674.936.680,33	3.111.493.394,66	1.712.347.297,00	613.367.474,42	313.028.465,01	15,11
Utang Belanja	0,00	80.106.852.602,00	86.223.801.785,00	30.424.356.995,00	11.105.613.260,47	22.788.653.688,07	20.668.391.867,47	-4,11
Utang Jangka Pendek Lainnya	121.611.847,00	282.000.000,00	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5,31
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.646.442,00</b>	<b>282.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29,71</b>
Utang Dalam Negeri – Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pusat	0,00	732.646.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	564.000.000,00	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	1.296.646.442,00	282.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,71
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>128.037.823,00</b>	<b>82.380.680.474,16</b>	<b>89.289.325.310,33</b>	<b>33.888.043.446,66</b>	<b>12.824.698.939,47</b>	<b>23.429.937.548,49</b>	<b>21.053.880.999,48</b>	<b>10699,61</b>
<b>EKUITAS DANA</b>	<b>2.453.115.062.805,61</b>	<b>1.509.332.866.436,80</b>	<b>1.653.457.323.969,22</b>	<b>1.844.927.045.838,18</b>	<b>2.011.861.345.790,83</b>	<b>2.146.275.360.264,72</b>	<b>2.279.278.312.595,00</b>	<b>0,76</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.453.243.100.628,61</b>	<b>1.591.713.546.910,96</b>	<b>1.742.746.649.279,55</b>	<b>1.878.815.089.284,84</b>	<b>2.024.686.044.730,30</b>	<b>2.169.705.297.813,21</b>	<b>2.300.332.193.594,48</b>	<b>0,52</b>

Sumber : Neraca Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui melalui analisis rasio / perbandingan antar elemen laporan keuangan berdasarkan neraca tersebut diatas. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari 1 (satu).

Rasio keuangan Kabupaten Kolaka tahun 2014-2020 selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.11  
Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

<b>RASIO</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020<sup>*)</sup></b>
Rasio lancar ( <i>current ratio</i> )	582,02	0,63	0,57	1,68	7,44	4,21	2,91
Rasio cepat ( <i>quick ratio</i> )	524,08	0,54	0,49	1,49	6,83	3,84	2,47
Rasio total hutang terhadap total aset	0,0001	0,0518	0,0512	0,0180	0,0063	0,0108	0,0092
Rasio hutang terhadap modal	0,0001	0,0546	0,0540	0,0184	0,0064	0,0109	0,0092

Sumber : Neraca Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kabupaten Kolaka menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2014 sebesar 582,02 dan tahun 2020 sebesar 2,91.

Rasio cepat (*quick ratio*) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick ratio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Rasio cepat Kabupaten Kolaka menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2014 sebesar 524,08 dan tahun 2020 sebesar 2,47.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun

jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri dari rasio total hutang terhadap total aset yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, dan rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain.

Besar rasio total hutang terhadap total aset Pemerintah Kabupaten Kolaka pada tahun 2014 sebesar 0,0001 dan pada tahun 2020 sebesar 0,0092. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil. Pada tahun 2014 rasio hutang terhadap modal Pemerintah Kabupaten Kolaka sebesar 0,0001 dan pada tahun 2020 sebesar 0,0092. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

### **3.2. Kebijakan Keuangan Masa Lalu**

Keuangan daerah yang digambarkan dari APBD, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang dipergunakan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik melalui kebijakan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-

besarnya untuk kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja. Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan (setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan) untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran daerah.

### 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Kolaka pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Proporsi belanja pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran selengkapny disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12  
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur  
Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

TAHUN	TOTAL BELANJA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA + PENGELUARAN PEMBIAYAAN)	PERSENTAS E
Tahun Anggaran 2014	485.758.978.557,00	837.068.674.443,00	58,03
Tahun Anggaran 2015	515.531.103.690,00	1.053.947.926.610,00	48,91
Tahun Anggaran 2016	500.426.203.707,00	1.053.180.350.859,00	47,52
Tahun Anggaran 2017	499.731.648.647,00	1.086.252.241.817,00	46,01
Tahun Anggaran 2018	487.579.765.643,00	1.126.355.842.597,00	43,29
Tahun Anggaran 2019	417.321.777.713,00	1.282.340.969.550,00	32,54
Tahun Anggaran 2020 <sup>a)</sup>	419.363.507.149,00	1.248.916.961.932,00	33,58

Sumber : LRA Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Kolaka pada kurun waktu tahun 2014 – 2020 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2014 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 58,03%, selanjutnya terus mengalami penurunan hingga

mencapai 32,54% pada tahun 2019, kemudian naik sedikit pada tahun 2020 menjadi sebesar 33,58%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa APBD Kabupaten Kolaka relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi pengeluaran dalam APBD, dan sebaliknya belanja publik meningkat dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat diberbagai bidang.

### **3.2.2. Analisis Pembiayaan**

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah dapat mengakibatkan terjadinya Surplus atau Defisit Anggaran. Surplus Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih besar daripada anggaran belanja, sedangkan Defisit Anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan lebih kecil daripada anggaran belanja.

Apabila terjadi Surplus Anggaran dapat dimanfaatkan melalui Pengeluaran Anggaran Pembiayaan untuk Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Cicilan Utang, Penyertaan Modal (investasi) dan atau menjadi Sisa Perhitungan Anggaran tahun berkenan. Sedangkan apabila terjadi Defisit Anggaran ditutup/dibiayai dari Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah dan atau Transfer/ Penarikan Dana Cadangan Daerah yang dianggarkan pada Penerimaan Anggaran Pembiayaan.

Perkembangan defisit riil Kabupaten Kolaka tahun 2014-2020 selengkapnya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.13  
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020

URAIAN	TAHUN (Rp)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*)
<b>Realisasi pendapatan daerah</b>	<b>786.146.691.539,18</b>	<b>1.051.038.969.703,04</b>	<b>1.060.246.937.012,98</b>	<b>1.083.491.774.906,79</b>	<b>1.155.131.428.043,92</b>	<b>1.285.755.146.905,95</b>	<b>1.217.640.949.135,00</b>
Dikurangi realisasi :							
Belanja daerah	824.057.433.779,00	1.046.447.926.610,00	1.052.680.350.859,00	1.081.752.241.817,00	1.126.355.842.597,00	1.276.340.969.550,00	1.245.409.359.439,00
Pengeluaran pembiayaan daerah	13.011.240.664,00	7.500.000.000,00	500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	6.000.000.000,00	3.568.565.800,00
<b>DEFISIT RIIL</b>	<b>(50.921.982.903,82)</b>	<b>(2.908.956.906,96)</b>	<b>7.066.586.153,98</b>	<b>(2.760.466.910,21)</b>	<b>28.775.585.446,92</b>	<b>3.414.177.355,95</b>	<b>(31.336.976.104,00)</b>
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :							
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	67.267.453.400,67	16.345.470.496,85	9.167.713.589,89	16.090.069.073,71	13.346.634.373,50	42.122.219.820,42	44.730.516.605,37
Penerimaan kembali dana bergulir	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>67.267.453.400,67</b>	<b>16.345.670.496,85</b>	<b>9.167.713.589,89</b>	<b>16.090.069.073,71</b>	<b>13.346.634.373,50</b>	<b>42.122.219.820,42</b>	<b>44.730.516.605,37</b>
<b>SILPA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>	<b>16.345.470.496,85</b>	<b>13.436.713.589,89</b>	<b>16.234.299.743,87</b>	<b>13.329.602.163,50</b>	<b>42.122.219.820,42</b>	<b>45.536.397.176,37</b>	<b>13.393.540.501,37</b>

Sumber : LRA APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2020; \*) data *unaudited*

Pada kurun waktu tahun 2014-2020, APBD Kabupaten Kolaka mengalami defisit, kecuali pada tahun 2016, 2018 dan 2019. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun waktu yang sama, maka digunakan penerimaan yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

### **3.3. Kerangka Pendanaan**

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Peranan APBD sebagai pendorong dan salah satu penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah, maka realisasi APBD pada masa lalu dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menyusun proyeksi kerangka pendanaan untuk perencanaan pembangunan daerah pada tahun selanjutnya.

Kerangka pendanaan memuat proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk menghasilkan informasi jumlah Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah yang ada tersebut merupakan modal Pemerintah Daerah dan rencana penggunaannya dalam membiayai prioritas pembangunan daerah.

#### **3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten

Kolaka yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

### **3.3.1.1. Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan**

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah yang diproyeksikan dapat meningkat setiap tahunnya melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya, meliputi :

#### (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
- b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi upaya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
- f. Melaksanakan pengawasan perizinan usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
- g. Melaksanakan pemutakhiran basis data PPB P2 melalui pendataan subyek dan obyek pajak.

#### (2) Pendapatan transfer :

- a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
- b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK);

#### (3) Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kebijakan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan dari dana bagi hasil pajak

dari provinsi, bantuan keuangan dari provinsi maupun hibah dari pemerintah melalui peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.14  
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.296.165.030.858,00</b>	<b>1.393.377.408.172,00</b>	<b>1.497.880.713.785,00</b>	<b>1.610.221.767.319,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>133.705.406.158,00</b>	<b>143.733.311.620,00</b>	<b>154.513.309.991,00</b>	<b>166.101.808.241,00</b>
Pajak daerah	42.670.238.054,00	45.870.505.908,00	49.310.793.851,00	53.009.103.390,00
Retribusi daerah	18.511.296.957,00	19.899.644.229,00	21.392.117.546,00	22.996.526.362,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.592.488.000,00	13.536.924.600,00	14.552.193.945,00	15.643.608.491,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	59.931.383.147,00	64.426.236.883,00	69.258.204.649,00	74.452.569.998,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.106.204.205.000,00</b>	<b>1.189.169.520.375,00</b>	<b>1.278.357.234.403,00</b>	<b>1.374.234.026.983,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.849.763.000,00	1.115.688.495.225,00	1.199.365.132.367,00	1.289.317.517.294,00
<i>Dana bagi hasil</i>	<i>99.696.202.000,00</i>	<i>107.173.417.150,00</i>	<i>115.211.423.436,00</i>	<i>123.852.280.194,00</i>
<i>Dana alokasi umum</i>	<i>560.585.321.000,00</i>	<i>602.629.220.075,00</i>	<i>647.826.411.581,00</i>	<i>696.413.392.449,00</i>
<i>Dana alokasi khusus</i>	<i>256.212.251.000,00</i>	<i>275.428.169.825,00</i>	<i>296.085.282.562,00</i>	<i>318.291.678.754,00</i>
<i>Dana insentif khusus</i>	<i>34.101.216.000,00</i>	<i>36.658.807.200,00</i>	<i>39.408.217.740,00</i>	<i>42.363.834.071,00</i>
<i>Dana desa</i>	<i>87.254.773.000,00</i>	<i>93.798.880.975,00</i>	<i>100.833.797.048,00</i>	<i>108.396.331.827,00</i>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.354.442.000,00	73.481.025.150,00	78.992.102.036,00	84.916.509.689,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>56.255.419.700,00</b>	<b>60.474.576.178,00</b>	<b>65.010.169.391,00</b>	<b>69.885.932.095,00</b>
Pendapatan Hibah	19.842.525.000,00	21.330.714.375,00	22.930.517.953,00	24.650.306.800,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	36.412.894.700,00	39.143.861.803,00	42.079.651.438,00	45.235.625.296,00

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

Pendapatan daerah pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 1,39 triliun lebih, dan diproyeksikan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp. 1,61 triliun lebih pada tahun 2024. Sementara itu, jika ditinjau dari komponen pembentuk pendapatan daerah juga diperkirakan mengalami peningkatan yang konsisten. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 143,75 milyar lebih, dan pada akhir periode RPJMD tahun 2024 diproyeksikan mencapai Rp.166,10 milyar lebih. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1,18 triliun lebih, dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 1,375 triliun lebih pada tahun 2024. Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan mencapai Rp. 60,47 milyar lebih pada tahun 2022, dan diproyeksikan meningkat menjadi sebesar Rp. 69,88 milyar lebih pada tahun 2024.

#### **3.3.1.2. Kebijakan dan Proyeksi Belanja**

Kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program pencapaian standar pelayanan minimal dan operasional;
3. Pemenuhan belanja untuk penanganan pandemi Covid-19;
4. Melaksanakan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia;
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten;
6. Menyesuaikan gaji pegawai sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Tabel 3.15  
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
<b>BELANJA</b>	<b>1.298.165.030.858,00</b>	<b>1.395.527.408.172,00</b>	<b>1.500.191.963.785,00</b>	<b>1.612.706.361.069,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>810.132.519.107,00</b>	<b>870.892.458.040,00</b>	<b>936.209.392.393,00</b>	<b>1.006.425.096.823,00</b>
Belanja pegawai	449.059.377.077,00	482.738.830.358,00	518.944.242.635,00	557.865.060.832,00
Belanja barang dan jasa	353.536.258.530,00	380.051.477.920,00	408.555.338.764,00	439.196.989.171,00
Belanja hibah	5.498.075.000,00	5.910.430.625,00	6.353.712.922,00	6.830.241.391,00
Belanja bantuan sosial	2.038.808.500,00	2.191.719.138,00	2.356.098.073,00	2.532.805.428,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>319.008.857.051,00</b>	<b>342.934.521.330,00</b>	<b>368.654.610.430,00</b>	<b>396.303.706.212,00</b>
Belanja modal tanah	1.122.000.000,00	1.206.150.000,00	1.296.611.250,00	1.393.857.094,00
Belanja modal peralatan dan mesin	71.557.741.076,00	76.924.571.657,00	82.693.914.531,00	88.895.958.121,00
Belanja modal gedung dan bangunan	134.850.085.227,00	144.963.841.619,00	155.836.129.740,00	167.523.839.471,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	110.785.245.956,00	119.094.139.403,00	128.026.199.858,00	137.628.164.847,00
Belanja modal aset tetap lainnya	693.784.792,00	745.818.651,00	801.755.050,00	861.886.679,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>16.125.000.000,00</b>	<b>17.334.375.000,00</b>	<b>18.634.453.125,00</b>
Belanja tidak terduga	15.000.000.000,00	16.125.000.000,00	17.334.375.000,00	18.634.453.125,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>154.023.654.700,00</b>	<b>165.575.428.803,00</b>	<b>177.993.585.963,00</b>	<b>191.343.104.910,00</b>
Belanja bagi hasil	5.729.400,00	6.159.105,00	6.621.038,00	7.117.616,00
Belanja bantuan keuangan	154.017.925.300,00	165.569.269.698,00	177.986.964.925,00	191.335.987.294,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.150.000.000,00)</b>	<b>(2.311.250.000,00)</b>	<b>(2.484.593.750,00)</b>

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

Proyeksi terhadap belanja daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2022 diperkirakan berjumlah Rp. 1,39 triliun lebih, sementara pada akhir periode RPJMD tahun 2024 jumlah belanja diproyeksikan mencapai Rp. 1,61 triliun lebih. Ditinjau berdasarkan jenis belanja, jumlah Belanja Operasi pada tahun 2022 diperkirakan mencapai Rp. 870,89 milyar lebih, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2024 hingga menjadi Rp. 1,00 triliun lebih, sementara itu Belanja Modal pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 342,93 milyar lebih dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp. 396,30 milyar lebih.

Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 16,25 milyar lebih dan hingga tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp. 18,63 milyar lebih, sedangkan Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 165,57 milyar lebih pada tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat hingga mencapai Rp. 191,34 milyar lebih pada tahun 2024.

#### **3.3.1.3. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan**

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal daerah berorientasi keuntungan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.16  
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.525.000.000,00</b>	<b>8.089.375.000,00</b>	<b>8.696.078.125,00</b>
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	7.000.000.000,00	7.525.000.000,00	8.089.375.000,00	8.696.078.125,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.375.000.000,00</b>	<b>5.778.125.000,00</b>	<b>6.211.484.375,00</b>
Penyertaan modal daerah	5.000.000.000,00	5.375.000.000,00	5.778.125.000,00	6.211.484.375,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.150.000.000,00</b>	<b>2.311.250.000,00</b>	<b>2.484.593.750,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

### 3.3.2. APBD Tahun Anggaran 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Tabel 3.17, pada tahun 2021 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1,96 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 133,70 milyar, Dana Transfer sebesar Rp. 1.106,20 Triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 56,25 milyar. Sementara itu, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.298 triliun yang terdiri dari Belanja operasi Rp. 810.132 Milyar, Belanja Modal 319 Milyar, Belanja Tidak Tetap Rp. 15 Milyar, dan Belanja Transfer Rp. 154,02 sedangkan Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp. 7,00 milyar dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 5,00 Milyar.

Tabel 3.17  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021

URAIAN	APBD 2021
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.296.165.030.858,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>133.705.406.158,00</b>
Pajak daerah	42.670.238.054,00
Retribusi daerah	18.511.296.957,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.592.488.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	59.931.383.147,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.106.204.205.000,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.849.763.000,00
<i>Dana bagi hasil</i>	99.696.202.000,00
<i>Dana alokasi umum</i>	560.585.321.000,00
<i>Dana alokasi khusus</i>	256.212.251.000,00
<i>Dana insentif khusus</i>	34.101.216.000,00
<i>Dana desa</i>	87.254.773.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.354.442.000,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>56.255.419.700,00</b>
Pendapatan Hibah	19.842.525.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	36.412.894.700,00
<b>BELANJA</b>	<b>1.298.165.030.858,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>810.132.519.107,00</b>
Belanja pegawai	449.059.377.077,00
Belanja barang dan jasa	353.536.258.530,00
Belanja hibah	5.498.075.000,00

Belanja bantuan sosial	2.038.808.500,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>319.008.857.051,00</b>
Belanja modal tanah	1.122.000.000,00
Belanja modal peralatan dan mesin	71.557.741.076,00
Belanja modal gedung dan bangunan	134.850.085.227,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	110.785.245.956,00
Belanja modal aset tetap lainnya	693.784.792,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000,00</b>
Belanja tidak terduga	15.000.000.000,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>154.023.654.700,00</b>
Belanja bagi hasil	5.729.400,00
Belanja bantuan keuangan	154.017.925.300,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>7.000.000.000,00</b>
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	7.000.000.000,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
Penyertaan modal daerah	5.000.000.000,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>2.000.000.000,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

### **3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kolaka tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.18  
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
Pendapatan	1.296.165.030.858,00	1.393.377.408.172,00	1.497.880.713.785,00	1.610.221.767.319,00
Penerimaan Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.525.000.000,00	8.089.375.000,00	8.696.078.125,00
<b>Total Penerimaan</b>	<b>1.303.165.030.858,00</b>	<b>1.400.902.408.172,00</b>	<b>1.505.970.088.785,00</b>	<b>1.618.917.845.444,00</b>
Dikurangi :				
Belanja pegawai	449.059.377.077,00	482.738.830.358,00	518.944.242.635,00	557.865.060.832,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.375.000.000,00	5.778.125.000,00	6.211.484.375,00
<b>KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>849.105.653.781,00</b>	<b>912.788.577.814,00</b>	<b>981.247.721.150,00</b>	<b>1.054.841.300.237,00</b>

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka cenderung meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 sebagai berikut :

1. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
2. Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.19  
Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020-2024

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
<b>KAPASITAS RIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>849.105.653.781,00</b>	<b>912.788.577.814,00</b>	<b>981.247.721.150,00</b>	<b>1.054.841.300.237,00</b>
<b>Priotitas I</b>	<b>424.552.826.891,00</b>	<b>456.394.288.907,00</b>	<b>490.623.860.575,00</b>	<b>527.420.650.118,00</b>
<b>Prioritas II</b>	<b>339.642.261.512,00</b>	<b>365.115.431.126,00</b>	<b>392.499.088.460,00</b>	<b>421.936.520.095,00</b>
<b>Prioritas III</b>	<b>84.910.565.378,00</b>	<b>91.278.857.781,00</b>	<b>98.124.772.115,00</b>	<b>105.484.130.024,00</b>

Sumber : Bappeda dan BKAD Kabupaten Kolaka, 2021

## **BAB IV**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Gambaran kondisi Kabupaten Kolaka yang telah diuraikan pada bab II menunjukkan bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, nasional, dan provinsi seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta berbagai kebijakan di tataran nasional dan provinsi. Adapun permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kolaka adalah : (1) masih tingginya angka kemiskinan; (2) masih belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman; (3) masih rendahnya daya saing ekonomi dan produktivitas; (4) masih belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi; (5) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia; (6) Masih terbatasnya lapangan kerja; dan (7) masih tingginya kerusakan dan pencemaran lingkungan serta permasalahan pertanahan.

#### **4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN**

##### **4.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

###### **A. Urusan Pendidikan**

Permasalahan Pendidikan di Kabupaten Kolaka antara lain :

- (1) Belum meratanya akses pendidikan wajib belajar 12 Tahun;
- (2) Kuantitas, kualitas dan sebaran guru belum maksimal;
- (3) Masih rendahnya ketersediaan sarana penunjang PAUD/ SD/ SMP;
- (4) Belum adanya dukungan beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi;
- (5) Perlunya menjaga paham kebangsaan dan keagamaan;
- (6) Belum optimalnya pelayanan sistem pembelajaran dalam menghadapi pandemic covid-19.

## **B. Urusan Kesehatan**

Permasalahan kesehatan yang masih ditemui di Kabupaten Kolaka meliputi :

- (1) Masih kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi;
- (2) Masih belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit;
- (3) Masih belum optimalnya penanganan *stunting*;
- (4) Masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan kesehatan serta SDM tenaga kesehatan;
- (5) Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan sekunder;
- (6) Masih rendahnya sistem kesehatan terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

## **C. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**

Permasalahan pekerjaan umum dan penataan ruang yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Masih belum memadainya konektivitas jaringan jalan dan jembatan pada pusat-pusat pertumbuhan (sentra produksi, pariwisata dan pusat pemerintahan);
- (2) Belum terintegrasinya sistem informasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota;
- (3) Penyediaan dan pengelolaan air minum belum optimal;
- (4) Masih belum optimalnya sistem irigasi dalam mendukung pertanian;
- (5) Sistem sanitasi yang masih belum terpadu;
- (6) Masih minimnya rencana rincian tata ruang.

#### **D. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Belum optimalnya penataan lingkungan permukiman kumuh;
- (2) Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni;
- (3) Belum seimbang pertumbuhannya rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah (backlog);
- (4) Belum optimalnya prasarana, sarana dan utilitas.

#### **E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik dan paham kebangsaan kepada masyarakat;
- (2) Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pengembangan wawasan kebangsaan dan jati diri bangsa;
- (3) Belum optimalnya perlindungan masyarakat dan penegakan perda;
- (4) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pencegahan bencana.

#### **F. Urusan Sosial**

Permasalahan urusan sosial yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Masih perlunya penurunan angka kemiskinan.;
- (2) Belum optimalnya penanganan PMKS terutama Lanjut usia, Komunitas Adat Terpencil, Anak Jalanan, Wanita Rawan Sosial

Ekonomi, Distabilitas, Korban tindak kekerasan dan Korban penyalahgunaan NAPZA;

- (3) Masih perlunya peningkatan penanganan jaring pengaman social dalam penanggulangan dampak pandemic covid-19.

#### **4.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar**

##### **A. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan ketenagakerjaan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja;
- (2) Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja; dan
- (3) Belum optimalnya perlindungan tenaga kerja.

##### **B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :

- (1) Masih belum optimalnya peran kesetaraan gender dalam pembangunan;
- (2) Belum optimalnya kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- (3) Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan; dan
- (4) Kabupaten Layak Anak masih perlu ditingkatkan.

### **C. Urusan Pangan**

Permasalahan terkait urusan ketahanan pangan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Belum optimalnya upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan;
- (2) Masih adanya potensi terjadinya kerawanan dan keamanan pangan; dan
- (3) Kualitas pola konsumsi pangan masyarakat yang belum beragam dan gizi berimbang.

### **D. Urusan Lingkungan Hidup**

Permasalahan terkait urusan lingkungan hidup yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Belum optimalnya penanganan sampah;
- (2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah;
- (3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan
- (4) Menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

### **E. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, yakni :

- (1) Belum optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- (2) Belum optimalnya sarana prasarana administrasi kependudukan.

#### **F. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yakni :

- (1) Belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dalam mendukung pembangunan di pedesaan;
- (2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan sistem informasi masyarakat baik sosial maupun ekonomi dalam menunjang kemampuan Desa dalam membangun;
- (3) Masih rendahnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga dalam pembangunan; dan
- (4) Belum optimalnya peran BUMDES dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

#### **G. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain :

- (1) Masih perlunya pengendalian penduduk;
- (2) Masih kurangnya tenaga penyuluh KB yang berkualitas; dan
- (3) Belum optimalnya konseling kesehatan reproduksi remaja.

#### **H. Urusan Perhubungan**

Permasalahan terkait urusan perhubungan yang masih terjadi di Kabupaten Kolaka, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pelayanan terminal penumpang dari aspek kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- (2) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas;
- (3) Belum terpenuhinya fasilitas pelayanan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor;

- (4) Belum terpenuhinya fasilitas markah jalan dan kenyamanan terhadap pengguna jalan.

#### **I. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika, yakni :

- (1) Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan media massa bagi masyarakat;
- (2) Belum optimalnya pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE); dan
- (3) Kurang memadainya fasilitas dan kualitas SDM di bidang komunikasi dan informatika pemerintahan lini depan.

#### **J. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, antara lain :

- (1) Masih rendahnya penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM;
- (2) Masih rendahnya kapasitas para pengelola koperasi dan UMKM; dan
- (3) Masih rendahnya akses permodalan UMKM terhadap sumber daya produktif.

#### **K. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal, yakni:

- (1) Belum optimalnya pelayanan perijinan; dan
- (2) Belum optimalnya nilai inventarisasi daerah.

**L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepemudaan dan Olahraga, antara lain :

- (1) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan;
- (2) Belum optimalnya pembinaan prestasi dan permasyarakatan olahraga; dan
- (3) Masih terbatasnya daya dukung Sarana dan Prasarana Olah Raga.

**M. Urusan Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik, yakni :

- (1) Belum optimalnya forum data untuk keterpaduan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

**N. Urusan Kebudayaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kebudayaan, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pelestarian adat istiadat, budaya dan kearifan lokal; dan
- (2) Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah.

**O. Urusan Perpustakaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perpustakaan, yakni :

- (1) Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- (2) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan; dan
- (3) Belum tersedianya pelayanan perpustakaan yang berbasis digital.

**P. Urusan Kearsipan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan, antara lain :

- (1) Kurang optimalnya pemeliharaan terhadap dokumen/arsip daerah dan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip daerah; dan;
- (2) Belum tersedianya pengelolaan arsip digital.

**Q. Urusan Pertanahan**

Permasalahan yang muncul terkait pertanahan antara lain :

- (1) Belum optimalnya pengelolaan pertanahan; dan
- (2) Belum semua aset pemerintah daerah dan masyarakat bersertifikat.

**4.1.3 Urusan Pilihan**

**A. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan, yakni :

- (1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan budi daya;
- (2) Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi perikanan;
- (3) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan; dan
- (4) Masih rendahnya akses permodalan bagi nelayan dan pelaku usaha tambak.

**B. Urusan Pariwisata**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pariwisata, antara lain :

- (1) Belum profesionalnya kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata;

- (2) Masih rendahnya jumlah kunjungan wisata dan pendapatan daerah dari objek wisata;
- (3) Masih rendahnya daya saing destinasi dan promosi wisata serta konektivitas antar daerah wisata; dan
- (4) Belum terkelolanya dengan baik potensi ekonomi kreatif.

### **C. Urusan Pertanian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pertanian, yakni :

- (1) Belum optimalnya pengembangan agroindustri;
- (2) Masih rendahnya nilai tukar produk pertanian;
- (3) Belum optimalnya produktifitas dan pemasaran hasil-hasil pertanian, perkebunan dan peternakan;
- (4) Masih rendahnya akses permodalan bagi petani;
- (5) Masih terbatasnya sarana prasarana pertanian; dan
- (6) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian.

### **D. Urusan Perdagangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perdagangan, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen;
- (2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan yang lebih representatif dan modern;
- (3) Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas hasil – hasil produksi unggulan daerah; dan
- (4) Belum adanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan.

### **E. Urusan Perindustrian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perindustrian, yakni :

- (1) Terbatasnya akses industri kecil dan menengah terhadap permodalan dan kemitraan;
- (2) Masih rendahnya daya saing produk industri lokal;
- (3) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri daerah; dan
- (4) Belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang berkompeten dan bersertifikasi.

### **F. Urusan Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Transmigrasi, antara lain:

- (1) Belum optimalnya infrastruktur kawasan transmigrasi; dan
- (2) Belum adanya penguatan sistem, kompetensi dan pengelolaan transmigrasi.

## **4.1.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **A. Perencanaan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perencanaan, yakni :

- (1) Belum optimalnya penyediaan data dan informasi pembangunan daerah;
- (2) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
- (3) Belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik.

## **B. Pengawasan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengawasan, antara lain :

- (1) Belum optimalnya sistem pengawasan internal pemerintah; dan
- (2) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga auditor daerah.

## **C. Keuangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Keuangan, yakni :

- (1) Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan daerah; dan
- (3) Belum optimalnya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

## **D. Kepegawaian**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kepegawaian, antara lain:

- (1) Belum terpenuhinya sistem merit ASN ;
- (2) Masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas SDM ASN; dan
- (3) Belum terpenuhinya diklat jabatan struktural dan fungsional ASN.

## **E. Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penelitian dan Pengembangan, yakni :

- (1) Penelitian belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang akan dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- (2) Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum berjalan optimal.

## **F. Administrasi Pemerintahan**

Permasalahan yang dihadapi pada fungsi lainnya, antara lain :

- (1) Reformasi birokrasi belum terealisasi secara optimal;
- (2) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik; dan
- (3) Belum tuntasnya batas administrasi Desa/ Kelurahan.

## **4.2. ISU STRATEGIS**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Berdasarkan hasil telaah gambaran umum kondisi daerah dan permasalahan yang dihadapi, maka dapat dirumuskan dalam 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dalam lima tahun kedepan, yakni isu strategis internasional, nasional, regional (provinsi) dan kabupaten.

### **4.2.1. Isu Strategis Internasional**

#### **A. Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, direncanakan dapat dicapai selama 15 Tahun sampai dengan 2030. Dimana Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* harus didukung capaiannya oleh Pemerintahan Kabupaten Kolaka yaitu :

- 1) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
- 2) Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;

- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
- 6) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- 7) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- 8) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- 9) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- 10) Menjadikan kota dan permukiman aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 11) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- 12) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
- 13) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
- 14) Menguatkan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, di semua tingkatan; dan
- 15) Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan. Target: memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan untuk pembangunan berkelanjutan.

## **B. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC) merupakan sebuah sistem yang menuju sebuah kesepakatan dalam mengintegrasikan ekonomi antar negara ASEAN. MEA telah merencanakan peta ekonomi baru yang menguntungkan untuk negara-negara ASEAN yaitu dengan dibukanya pasar perdagangan bebas, hal ini akan meminimalkan kesulitan-kesulitan yang selama ini menjadi penghalang untuk kegiatan ekspor – import.

Tujuan dari kesepakatan MEA yaitu :

1. Memperkuat hubungan antar negara ASEAN;
2. Mewujudkan sistem perbankan;
3. Merencanakan sistem keuangan;
4. Ketahanan pangan;
5. Keamanan politik;
6. Sosial Budaya.

## **C. Revolusi Industri 4.0**

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Setidaknya terdapat tiga hal utama yang menjadi ciri khas era 4.0. Pertama, inovasi dapat dikembangkan dan menyebar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatan terjadinya terobosan-terobosan baru pada era ini terjadi pada skala eksponensial dan bukan lagi pada skala linear. Kedua, penurunan biaya produksi marjinal dan munculnya platform yang dapat menyatukan dan mengkonsentrasikan beberapa bidang keilmuan terbukti meningkatkan output pekerjaan. Transformasi ini mengakibatkan perubahan dengan ruang lingkup yang begitu luas sehingga menyebabkan perubahan pada seluruh sistem produksi, manajemen, maupun tata kelola. Ketiga, revolusi secara global ini akan berpengaruh besar dan terbentuk di hampir semua negara di dunia, di mana cakupan transformasi ini terjadi pada setiap bidang industri, dan

bahkan akan mempunyai dampak menyeluruh pada level sistem di banyak tempat.

Revolusi Industri 4.0 adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya sehingga berpotensi untuk memberdayakan individu dan masyarakat, karena ia dapat menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan pribadi. Namun di sisi lain, era ini juga bisa menyebabkan pengkerdilan dan marginalisasi beberapa kelompok, memperburuk ketimpangan sosial, menciptakan risiko keamanan yang baru, serta dapat merusak hubungan antar manusia. Hal ini sudah menjadi hal yang tidak mungkin dihindari, sehingga negara dan daerah harus mampu beradaptasi dan mengantisipasi dengan strategi yang tepat agar mampu bersaing dan memanfaatkan era ini untuk percepatan pembangunan.

#### **4.2.2. Isu Strategis Nasional**

Isu-isu strategis nasional yang menjadi pertimbangan dalam pembangunan nasional lima tahun mendatang telah dijabarkan dalam RPJMN 2020 – 2024. Beberapa isu strategis sesuai arahan utama Presiden, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:
  - a) Pengembangan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
  - b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energy, industry, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan sector/ komoditas/ kegiatan unggulan daerah,
- b) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan(PKW) ke wilayah belum berkembang.
- c) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
- d) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- e) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan social;
- c) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- f) Pengentasan kemiskinan; dan
- g) Peningkatan produktifitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan modernisasi. Rencana mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) Revolusi mental dalam system pendidikan;
- b) Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c) Revolusi mental dalam system social. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) Pembangunan rendah karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan

kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

#### **4.2.3. Isu Strategis Regional (Provinsi Sulawesi Tenggara)**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam melaksanakan pembangunannya melalui pendekatan Gerakan Akselerasi Pembangunan Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan (GARBARATA). Pendekatan GARBARATA ini akan menjadi gerbong program prioritas daerah yang akan menuju ke seluruh wilayah daratan dan lautan/kepulauan.

Program prioritas dimaksud terdiri dari 5 pilar SULTRA EMAS, yaitu:

- 1) Pilar Sultra Cerdas;
- 2) Pilar Sultra Sehat;
- 3) Pilar Sultra Peduli Kemiskinan;
- 4) Pilar Sultra Berbudaya dan Beriman; dan
- 5) Pilar Sultra Produktif.

#### **4.2.4. Isu Strategis Kabupaten Kolaka**

Isu strategis daerah didapatkan dari pemetaan permasalahan-permasalahan yang ada dan sinkronisasi dengan isu-isu strategis yang

ada di internasional, nasional dan provinsi sehingga isu strategis daerah Kabupaten Kolaka yang diangkat pada RPJMD Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut:

**a) Penanggulangan kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah global yang juga masih menjadi isu di Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kabupaten Kolaka terhitung sebesar 12,51% atau 26 ribu jiwa. Angka ini masih tergolong tinggi karena berada di atas capaian nasional sebesar 9,66%. Kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi akibat masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan, belum terintegrasinya program kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian).

**b) Infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman**

Pemerataan pembangunan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan daerah Kabupaten Kolaka. Pembangunan daerah khususnya terkait penyediaan fasilitas publik dan infrastruktur tidak hanya harus berkualitas namun juga harus inklusif dan merata. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kolaka yang membentang dari utara ke selatan menjadi salah faktor yang mempengaruhi kualitas pemerataan penyediaan infrastruktur dan

fasilitas publik di Kabupaten Kolaka. Untuk membuka akses dan pemerataan infrastruktur wilayah perlu dibangun konektivitas jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baik itu pusat produksi maupun pusat pemerintahan. Berdasarkan data kondisi awal Tahun 2018 jalan Kabupaten Kolaka dalam kondisi mantap mencapai 76% yang dihitung berdasarkan panjang jalan dalam kondisi baik 359,14 Km (41%) dan jalan kondisi sedang sepanjang 306,22 Km (35%), namun capaian tersebut masih ditemukan permasalahan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah antara lain : masih belum memadainya konektivitas jaringan jalan dan jembatan pada pusat-pusat pertumbuhan (sentra produksi, pariwisata dan pusat pemerintahan); serta belum terintergrasinya sistem informasi dalam perencanaan pembangunan jalan/jembatan dan pemanfaatan ruang kota.

Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh. Berdasarkan kondisi awal tahun 2018 luas kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Kolaka mencapai 34,72 Ha dan jumlah rumah layak huni 45.277 unit dengan persentase mencapai 91,6% dari jumlah rumah keseluruhan sebanyak 49.413 unit atau masih terdapat 5.244 unit . Capaian tersebut masih perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Daerah antara lain : belum optimalnya penataan lingkungan pemukiman kumuh; masih banyaknya rumah yang tidak layak huni; dan belum seimbang pertumbuhan rumah tangga dengan pertumbuhan pengadaan rumah (*backlog*).

**c) Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Produktivitas**

Hingga saat ini, sektor pertambangan dan penggalan merupakan komponen utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka. Sektor ini berkontribusi 48% terhadap total PDRB Kab. Kolaka. Sedangkan

sektor lain yang cukup signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi Kab. Kolaka yaitu sektor pertanian/kehutanan/perikanan 13.15%, sektor industri pengolahan 9.38% dan sektor Perdagangan 9.33%. Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalami kesulitan dalam pemanfaatan sektor pertambangan secara optimal bagi kesejahteraan penduduk Kolaka sejak diperlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, dimana kewenangan sektor pertambangan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun telah beralih kepada pemerintah provinsi.

Mengantisipasi agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kolaka tetap tumbuh positif, sektor-sektor ekonomi lainnya menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan daya saing ekonomi dan produktivitas.

sedangkan sektor pertanian dalam arti luas melalui pengembangan agroindustri/industri pengolahan, optimalisasi produktivitas komoditas unggulan, serta pemberian kemudahan akses terhadap permodalan.

Pada sektor perdagangan dan UMKM, melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung perdagangan yang lebih representatif dan modern, peningkatan kualitas hasil – hasil produksi unggulan daerah, penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan, penciptaan wirausaha baru dan daya saing UMKM, serta dukungan terhadap akses permodalan UMKM.

Selanjutnya sektor pariwisata, melalui peningkatan daya saing dan promosi destinasi wisata, peningkatan konektifitas antar daerah wisata, peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata, serta dukungan pengembangan ekonomi kreatif pada daerah wisata.

#### **d) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan**

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kolaka masih menjadi permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian. Permasalahan tersebut diantaranya masih

rendahnya tingkat profesionalisme dan kapasitas aparatur, belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, masih kurangnya kualitas pelayanan publik dan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan penerapan SPBE pada perangkat daerah.

Pada bidang perencanaan dan keuangan, belum optimalnya penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, belum terintegrasinya perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah secara elektronik, belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah, serta belum optimalnya pengelolaan perusahaan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

Pada bidang Pengawasan, belum optimalnya sistem pengawasan internal pemerintah dan masih rendahnya kuantitas dan kualitas tenaga auditor daerah.

**e) Kualitas pendidikan dan kesehatan**

Kualitas kehidupan masyarakat di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Salah satu indikator untuk mengetahui kualitas kehidupan masyarakat adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan IPM dibentuk oleh 3 dimensi yaitu dimensi kesehatan yang dihitung menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi Pendidikan yang dihitung menggunakan indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), serta dimensi standar Hidup Layak yang dihitung menggunakan indikator pengeluaran perkapita.

Secara umum, kinerja peningkatan IPM Kabupaten Kolaka cukup baik setiap tahun terjadi peningkatan linear terhadap angka IPM Kabupaten Kolaka. Pada tahun 2017, angka IPM Kabupaten Kolaka tercatat sebesar 71.46. Namun demikian, dalam lingkup Provinsi

Sulawesi Tenggara, angka ini masih berada di bawah Kota Kendari (81.83) dan Kota Bau-Bau (74.14). Adapun permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kolaka antara lain: belum meratanya akses pendidikan serta Kuantitas, kualitas dan sebaran guru; masih rendahnya ketersediaan sarana penunjang; belum adanya dukungan beasiswa pendidikan bagi masyarakat tidak mampu dan berprestasi; kurang optimalnya kualitas pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi serta penanganan stunting; belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular/tidak menular; rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan serta SDM tenaga kesehatan; rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat; masih kurangnya tenaga penyuluh KB yang berkualitas; serta belum optimalnya konseling kesehatan reproduksi remaja.

**f) Peluang kerja**

Ketersediaan peluang kerja merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kolaka, terjadi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kolaka dari 6.53 % di tahun 2015, menjadi 2.18% di tahun 2018. Meskipun terjadi penurunan, namun masih ditemukan permasalahan yakni, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, kompetensi angkatan kerja tidak sesuai kebutuhan kerja, dan terbatasnya ketersediaan lapangan kerja, serta belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja.

**g) Kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam serta masalah pertanian**

Isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam serta masalah pertanian merupakan isu yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang berkaitan dengan penanganan

perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan SDA masih terdapat permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kolaka, seperti: belum optimalnya penanganan sampah; masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah; belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan; serta menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya air dan udara.

Selanjutnya, isu permasalahan pertanahan bermula dari tidak adanya kesepakatan bersama pada tiga hal, yaitu siapa yang berhak (1) menguasai tanah dan sumberdaya alam; (2) memanfaatkan tanah dan sumberdaya alam; (3) mengambil keputusan atas penguasaan tanah dan sumberdaya alam tersebut. Permasalahan pertanahan di Kabupaten Kolaka antara lain masih adanya klaim kepemilikan lahan pemda oleh masyarakat; belum semua aset Pemerintah daerah dan masyarakat bersertifikat.

## **BAB V**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih lima tahun kedepan. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah melalui implementasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah yang terukur, fokus dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan Isu Strategis Internasional, Regional, Nasional, dan Provinsi serta pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025.

#### **5.1. VISI**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Periode Tahun 2019-2024 adalah lanjutan dari Visi Pembangunan Periode Tahun 2014-2019. Untuk melanjutkan dan meningkatkan hasil capaian pembangunan daerah pada periode tahun sebelumnya, maka ditetapkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka periode tahun 2019-2024 yaitu:

**“ Kabupaten Kolaka yang Semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera ”**

**Semakin** : mengartikan bahwa adanya penambahan, peningkatan, kelebihan dari suatu kegiatan, program yang dilaksanakan dimulai dari sampai batas waktu yang ditentukan terjadi perubahan, perbaikan, peningkatan dalam pembangunan.

**Maju** : mengartikan bahwa adanya dinamika, pergerakan kondisi perekonomian kearah yang lebih baik, yang tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflasi yang

terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta tetap terjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Selain itu, juga ditandai dengan struktur ekonomi yang kokoh dan mampu produktifitas tinggi, dengan berbasis pada potensi ekonomi daerah.

**Berkeadilan:** Dimaknai bahwa perwujudan pembangunan yang adil dan merata, tanpa diskriminasi, baik antar individu, golongan maupun antar wilayah, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

**Sejahtera :** Mengandung makna bahwa semua kebutuhan lapisan masyarakat secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, baik dari aspek sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan secara merata.

Bahasa visi ini mengandung nilai-nilai dan harapan yang luhur, dalam menjalankan pemerintahan sampai dengan kurun waktu lima tahun ke depan, sebagai kerangka amanat pencapaian visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025, yaitu:

**“Kabupaten Kolaka Sebagai Daerah Perjuangan yang Aman, Maju, Berbudaya, Religius, Demokratis, Adil dan Sejahtera”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antar masyarakat, pemerintah dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Kolaka secara terpadu, yang dijalankan melalui sistem pemerintahan baik dan adil dalam melayani masyarakat, serta berpijak pada pola berpikir dan pola berbuat berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi Kabupaten Kolaka tersebut juga dapat sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional dan Visi Pembangunan Sulawesi Tenggara.

## 5.2. MISI

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka yang akan dijalankan pada periode 2019-2024, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah;  
Misi ini menggambarkan Pembangunan konektivitas Infrastruktur untuk memperkuat dan mendukung pusat-pusat pertumbuhan, mengurangi beban logistik dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat arus lalu lintas orang dan barang.
2. Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan;  
Misi ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui penguatan produktivitas dan daya saing produk unggulan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama;  
Misi ini menggambarkan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam memperoleh kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketertiban dalam sosial kemasyarakatan.
4. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat;  
Misi ini menggambarkan upaya pembaharuan sistem penyelenggaraan pemerintahan utamanya aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur untuk menciptakan Pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bermartabat melalui pemanfaatan teknologi informasi.
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Misi ini menggambarkan pembangunan daerah dan pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah

penataan ruang dan pengolahan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang berkelanjutan.

Kelima misi tersebut akan dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan, yang setiap tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai melalui prioritas pembangunan Strategi Mekongga Sejahtera Bekerja dan Berkarya (SMS BERJAYA).

Selanjutnya akan diuraikan keterkaitan antara misi RPJMN Tahun 2020-2024, Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 serta Agenda Prioritas Pembangunan, sebagai berikut :

Tabel 5.1

## Keterkaitan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara dan RPJMD Kabupaten Kolaka

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023	Misi Kabupaten Kolaka 2019-2024
1.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa	Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama
2.	Misi 2 : Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Misi 2 : Memajukan Daya Saing Wilayah melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Peningkatan Investasi.	Misi 3 : Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan
3.	Misi 3 : Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi 4 : Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur sosial ekonomi	Misi 1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah
4.	Misi 4 : Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan		Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup
5.	Misi 5 : Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa		

No.	Misi RPJMN 2020-2024	Misi Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023	Misi Kabupaten Kolaka 2019-2024
6.	Misi 6 : Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya		
7.	Misi 7 : Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga		
8.	Misi 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Misi 3 : Mewujudkan birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan	Misi 4 : Menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat
9.	Misi 9 : Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan		

Tabel 5.2

## Keterkaitan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Kolaka

No.	Agenda Prioritas Pembangunan 2020-2024	Agenda Prioritas Pembangunan Sulawesi Tenggara 2018-2023	Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Kolaka 2019-2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan daya saing perekonomian daerah melalui peningkatan nilai tambah sektor-sektor unggulan	Penguatan Struktur Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui peningkatan infrastruktur dasar dan wilayah untuk mendukung konektivitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan Konektivitas Infrastruktur Daerah</li> <li>• Penataan Kawasan Perkotaan dan Fasilitas Publik</li> </ul>
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemerataan akses terhadap pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Pendidikan, Agama, Budaya dan Paham kebangsaan</li> <li>• Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas</li> <li>• Pembukaan Peluang Kerja dan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja</li> </ul>
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Tata kelola pemerintahan yang baik	Pemantapan Reformasi Birokrasi yang Berbasis Elektronik serta Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Lini Depan

No.	Agenda Prioritas Pembangunan 2020-2024	Agenda Prioritas Pembangunan Sulawesi Tenggara 2018-2023	Agenda Prioritas Pembangunan Kabupaten Kolaka 2019-2024
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		Peningkatan Infrastruktur Pertanian Dalam Arti Luas
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Perlindungan Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

### 5.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

#### 5.3.1. TUJUAN PEMBANGUNAN

Tujuan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan;
3. Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan;
6. Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan;
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan potensi sumber daya alam berkelanjutan.

### **5.3.2 SASARAN PEMBANGUNAN**

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah.
2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman.
3. Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja.
4. Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah.
5. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.
6. Meningkatnya daya saing dan investasi daerah.
7. Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.
8. Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana.
9. Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.
10. Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di daerah.
11. Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah.
12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
13. Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah.
14. Optimalnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu.
15. Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi resiko bencana dan kondisi kedaruratan.

Adapun keselarasan Tujuan, Sasaran terhadap Misi dijabarkan sebagai berikut :

**Misi 1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah,** Misi ini dijabarkan melalui tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman dengan sasaran meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah serta meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman. Tujuan misi satu ini diukur dengan indikator indeks daya saing infrastruktur dengan indikator sasaran proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap, Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam, persentase Rumah Tangga berakses air bersih, persentase Rumah Tangga bersanitasi, persentase ruas jalan yang tersedia sarana Penerangan Jalan Umum yang baik, luas kawasan kumuh perkotaan dan persentase rumah layak huni.

**Misi 2 : Meningkatkan kinerja ekonomi melalui ekonomi kerakyatan,** didukung dengan 2 (dua) tujuan yakni tujuan pertama; Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan, tujuan ini didukung oleh 2 (dua) sasaran yakni meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja serta tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah, sedangkan tujuan kedua; Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah. Tujuan ini ditunjang dengan 2 (dua) sasaran yakni meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan serta meningkatnya daya saing dan investasi daerah. Adapun indikator tujuan adalah angka kemiskinan dan nilai PDRB atas dasar harga konstan.

**Misi 3 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama,** dilaksanakan

dengan 2 (dua) tujuan yakni tujuan pertama; meningkatnya kualitas sumber daya manusia didukung 2 (dua) sasaran yaitu meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Tujuan kedua; meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan juga dilaksanakan dengan 3 (tiga) sasaran yaitu pertama; Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, kedua; Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di daerah, ketiga; Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah. Tujuan pertama diukur dengan indikator nilai Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan tujuan kedua indikatornya adalah Jumlah konflik SARA. Indikator sasaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan yaitu : Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-rata lama sekolah, Angka Harapan Hidup, Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina, Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani dan Indeks kerukunan umat beragama.

**Misi 4 : Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat.** Misi keempat dilaksanakan dengan satu tujuan yaitu Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini didukung oleh satu sasaran yaitu, Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator Nilai AKIP Kabupaten, Opini BPK terhadap laporan keuangan, Indeks Desa Membangun, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah.

**Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.** Misi kelima diimplementasikan melalui satu tujuan dan tiga sasaran yaitu tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

dengan sasaran antara lain Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan Berdasarkan Tata Ruang Daerah, Optimalnya sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu dan Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan. Adapun indikator sasaran yaitu, Persentase Ruang Terbuka Hijau, Persentase jumlah sampah yang tertangani dan persentase desa tangguh bencana.

Tabel 5.3  
Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Misi 1 : Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah</b>										
<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman</b>		<b>Indeks Daya Saing Infrastruktur</b>	<b>indeks</b>	75	79,33	81,33	83,67	87	90	90
	Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	55,65	62	65	68	71	75	75
		Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam	%	65	67	75	80	85	90	90
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	79,47	80	82	85	90	95	95
		Persentase rumah tangga bersanitasi	%	80,64	82	85	88	92	95	95
		Persentase ruas jalan dengan PJU	%	16,67	20	20	25	30	35	35

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
		yang berfungsi baik								
		Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	34,72	30	25	20	10	0	0
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Ekonomi melalui Ekonomi Kerakyatan</b>										
<b>Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan</b>		<b>Angka Kemiskinan</b>	%	<b>12,51</b>	<b>11,72</b>	<b>11,25</b>	<b>10,65</b>	<b>10,02</b>	<b>9,81</b>	<b>9,81</b>
	Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja	Pengeluaran per kapita	Rp.(juta)	12.243	12.543	12.843	13.143	13.443	13.743	13.743
		Tingkat pengangguran terbuka	%	2,18	2,10	4,00	3,50	2,50	2,00	2,00
	Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	89,6	97,0	97,5	98,0	98,5	98,5
<b>Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan</b>		<b>Nilai PDRB AHK</b>	<b>Rp. (Milyar)</b>	<b>16.802,49</b>	<b>17.643</b>	<b>18.701</b>	<b>19.823</b>	<b>21.211</b>	<b>22.696</b>	<b>22.696</b>

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
<b>daya saing sektor unggulan daerah</b>	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	6,68	7,3	4,5	5,5	6,0	6,5	6,5
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	%	18,71	19,32	19,44	19,53	19,98	20	20
	Meningkatnya daya saing dan investasi daerah	Nilai investasi	Rp (milyar)	58,23	65	80	81,5	83,5	85	85
<b>Misi 3 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Penguatan Sendi-Sendi Sosial Budaya Dan Agama</b>										
<b>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</b>		<b>Nilai IPM</b>	<b>indeks</b>	<b>71,46</b>	<b>72,5</b>	<b>73</b>	<b>73,5</b>	<b>74</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>
	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13	13,25	13,75	13,97	14	14
		Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,33	9	9,25	9,50	9,75	9,75
		Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,3	71,2	71,5	71,8	72	72
		Prevalensi Stunting Balita	%	26,9	26,8	15	14,75	14,50	14,25	14,25

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
		Kabupaten								
	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB serta peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak perwanita	2,69	2,65	2,63	2,58	2,52	2,50	2,50
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,59	89,78	90	90,1	90,2	90,3	90,3
		Predikat Kabupaten Layak Anak	Skor/Predikat	251	500 Pratama	600 Pratama	650 Madya	700 Madya	750 Nindya	750 Nindya
		Presentase peningkatan kapasitas kepemudaan dan Prestasi olahraga	Persen	-	80	85	90	95	95	95
<b>Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan</b>		<b>Indeks Kebebasan Sipil</b>	<b>Indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Lestarnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase lembaga adat dan budaya yang terbina	%	18,1	20	45	50	55	65	65

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/ 2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
	Menurunnya jumlah PMKS di daerah	Persentase PMKS yang tertangani	%	46.44	50	55	60	65	70	70
	Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah	Indeks kerukunan umat beragama	Indeks	75	80	80	85	85	85	85
<b>Misi 4 : Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien, Bersih dan Bermartabat</b>										
<b>Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>indeks</b>	<b>n/a</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai AKIP kabupaten	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB	BB
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks Desa Membangun	indeks	n/a	0,5	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71
		Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Predikat	n/a	baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap	indeks	n/a	65	77	80	84	88	88

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2018/ 2019	TARGET					KONDISI AKHIR
					2020	2021	2022	2023	2024	
		pelayanan publik pemerintah								
		Persentase pertumbuhan PAD	%	10	20	7	8,5	10	11,5	11,5
<b>Misi 5 : Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup</b>										
<b>Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan</b>		<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>skor</b>	<b>n/a</b>	<b>60</b>	<b>69,9</b>	<b>70,25</b>	<b>70,60</b>	<b>70,94</b>	<b>70,94</b>
	Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang berkelanjutan	Pencapaian Adipura	Tercapai /Tidak Tercapai	n/a	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan	Persentase Desa/Kel Tangguh Bencana	%	27,3	40,9	45,83	62,5	79,17	100	100

## BAB VI

# STRATEGI ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah diuraikan serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dirumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah selama periode tahun 2019 - 2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

### 6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas pembangunan lima tahun kedepan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Untuk mencapai misi 1 : **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah** yang bertujuan “*Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman*”. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.1 berikut ini :

Tabel 6.1  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman</b>	Meningkatnya dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah	Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah
	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Melaksanakan pemenuhan standar pelayanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman

Untuk mencapai misi 2 : **Meningkatkan Kinerja Ekonomi Melalui Ekonomi Kerakyatan** yang bertujuan “*Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan*” dan *Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah*”. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan</b>	Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja	Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan tenaga kerja
	Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi konsumsi pangan daerah	Memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan pangan bagi masyarakat
<b>Meningkatkan produktifitas nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah</b>	Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dan perlindungan tenaga kerja
		Optimalisasi daya dukung potensi pariwisata serta pengembangan promosi pariwisata yang efektif, kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan
	Meningkatnya daya saing dan Investasi daerah	Peningkatan koordinasi dan Pelayanan perizinan

Untuk mencapai misi 3 : **Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Serta Penguatan Sendi-Sendi Sosial Budaya Dan Agama** yang bertujuan “*Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia*” dan “*Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan*” . Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar, tenaga pendidik dalam mendukung wajar 9 tahun
		Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan dalam meningkatkan kualitas pemenuhan pelayanan kesehatan
		Meningkatkan upaya preventif dalam pelaksanaan pemenuhan kesehatan
	Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB serta peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga	Optimalisasi upaya pengendalian penduduk melalui layanan KB dan pengarusutamaan gender serta peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga
Meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan	Lestarnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Peningkatan pemahaman nilai nilai budaya daerah di masyarakat
	Menurunnya jumlah PMKS di daerah	Meningkatkan pengendalian dan pembinaan PMKS
	Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan serta nilai-nilai keagamaan

Untuk mencapai misi 4 : **Menerapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Efisien, Bersih Dan Bermartabat** yang bertujuan “*Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan*”. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.4 berikut ini :

Tabel 6.4  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui penguatan inovasi daerah dan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi

Untuk mencapai misi 5 : **Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup** yang bertujuan “*Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan*”. Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi yang akan dilakukan tercantum pada tabel 6.5 berikut ini :

Tabel 6.5  
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5

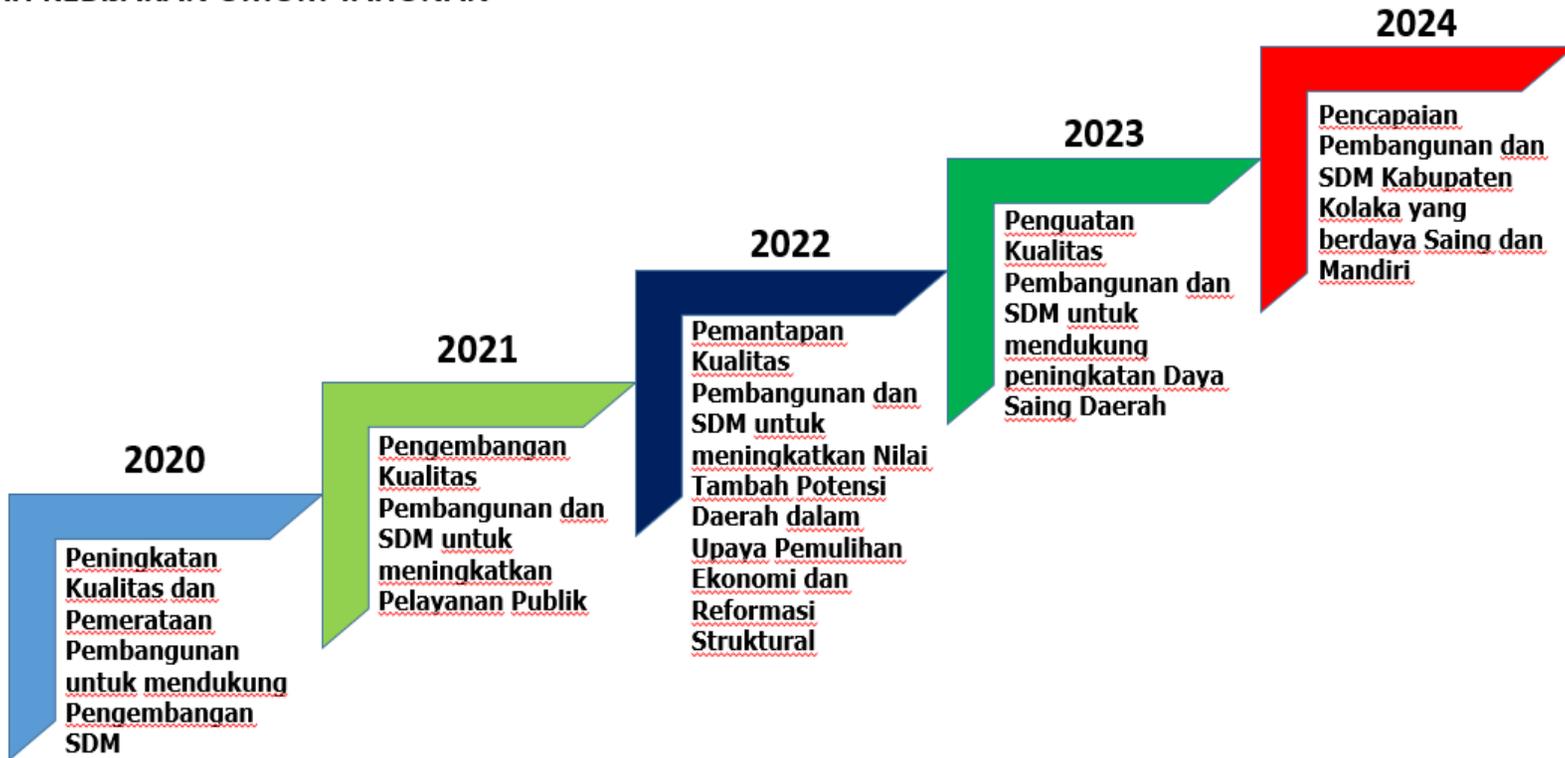
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkeberlanjutan	Meningkatkan sistem perijinan, pengawasan dan pemantauan lingkungan dan penataan ruang, serta penegakan hukum
		Mengurangi jumlah timbulan sampah

	Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan	Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana
--	--	--

## 6.2. Arah Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan strategi pembangunan lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :

**ARAH KEBIJAKAN UMUM TAHUNAN**



Gambar 6.1  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2020 - 2024

A. Arah Kebijakan tahun 2020

Perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka untuk lima tahun kedepan dimulai pada tahun 2020. Tema Pembangunan tahun 2020 difokuskan pada “Peningkatan kualitas dan pemerataan pembangunan untuk mendukung pengembangan SDM” dengan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan kesehatan pekerja;
4. Meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Penerapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
18. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

B. Arah Kebijakan tahun 2021

Tema Pembangunan tahun 2021 difokuskan pada “pengembangan kualitas pembangunan dan SDM untuk meningkatkan pelayanan publik” dengan arah kebijakan yaitu :

1. Pemantapan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD dan Pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Peningkatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.

C. Arah Kebijakan tahun 2022

Tema Pembangunan tahun 2022 difokuskan pada “Pemantapan kualitas pembangunan dan SDM untuk meningkatkan nilai tambah potensi daerah” dengan arah kebijakan yaitu :

1. Peningkatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenaga kerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD dan Pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah ;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik
16. Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana;
19. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social kepada masyarakat akibat pandemi covid-19.

D. Arah Kebijakan tahun 2023

Tema Pembangunan tahun 2023 difokuskan pada “Penguatan kualitas pembangunan dan SDM untuk mendukung peningkatan daya saing daerah” dengan arah kebijakan yaitu :

1. Pemantapan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD dan Pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Pemantapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.
19. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social kepada masyarakat.

E. Arah Kebijakan tahun 2024

Tema Pembangunan tahun 2024 difokuskan pada “Pencapaian pembangunan dan SDM Kabupaten Kolaka yang berdaya saing dan mandiri” dengan arah kebijakan yaitu :

1. Penguatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok;
2. Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman;
3. Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja;
4. meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
5. Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing;
6. Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata;
7. Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah;
8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan;
9. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis;
10. Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit;
11. Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD dan Pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga;
12. Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah;
13. Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS;
14. Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah;
15. Penguatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik;
16. Penguatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup;
17. Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan;
18. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana.
19. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social kepada masyarakat

Berdasarkan penjelasan arah kebijakan Pembangunan tahunan tersebut di atas, maka dapat dijabarkan setiap misi sebagaimana digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.6  
Arah Kebijakan Pembangunan lima Tahun kedepan

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>MISI 1 : MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>				
Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok	Pemantapan konektivitas transportasi antara pusat-pusat desa/kelurahan dengan pusat kecamatan dan kabupaten serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok	Peningkatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok	Pemantapan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok	Penguatan konektivitas transportasi antara simpul-simpul produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran serta Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok
Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman	Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman	Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman	Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman	Penyediaan prasarana sarana utilitas pemukiman

Arah Kebijakan				
2020	2021	2022	2023	2024
<b>MISI 2 : MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI EKONOMI KERAKYATAN</b>				
Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja	Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja	Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja	Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja	Meningkatkan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja serta perlindungan tenagakerja dan kesehatan pekerja
meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman	meningkatkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
Menerapkan sistem agribisnis yang berdaya saing				
Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata	Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata	Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata	Meningkatkan pemasaran destinasi pariwisata
Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah	Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah	Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah	Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah	Penyediaan sistem perizinan berbasis elektronik serta meningkatkan promosi peluang investasi daerah

Arah Kebijakan				
2020	2021	2022	2023	2024
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA PENGUATAN SENDI-SENDI SOSIAL, BUDAYA DAN AGAMA</b>				
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana faskes dasar dan rujukan serta tenaga medis dan paramedis
Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit	Peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan upaya pencegahan dan pemantauan terhadap penyebaran penyakit

Bab VI – Strategi ,Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD	Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD	Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD	Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD	Meningkatkan sarana dan prasarana pengendalian penduduk, penguatan peran PPL KB & PPKBD
Penguatan dan pembinaan nilai-nilai budaya daerah				
Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS	Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS	Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS	Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS	Pembinaan, pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi PMKS
Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah	Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah	Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah	Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah	Pembinaan tokoh agama, percepatan penanaman nilai agama sejak dini serta penguatan peran dan fungsi rumah ibadah

Arah Kebijakan				
2020	2021	2022	2023	2024
<b>MISI 4 : MENETAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT</b>				
Penerapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik	Peningkatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik	Pemantapan e-Government dan peningkatan pelayanan publik	Penguatan e-Government dan peningkatan pelayanan publik
<b>MISI 5 : MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>				
Pelaksanaan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup	Peningkatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup	Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup	Pemantapan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup	Penguatan pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup
Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan	Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan	Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan	Peningkatan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan persampahan
Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana	Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana	Pemantapan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana	Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengurangan risiko bencana

### 6.3. Program Pembangunan Daerah

#### A. Penjabaran Prioritas Pembangunan SMS Berjaya

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun ke depan, maka diperlukan suatu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih agar supaya lebih fokus dan terarah dalam pencapaian Sembilan Prioritas Pembangunan SMS Berjaya. Penjabaran Prioritas Pembangunan ini akan dilaksanakan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dengan berkoordinasi Instansi/Lembaga terkait sebagaimana diuraikan pada Tabel berikut ini :

Tabel 6.8

Implementasi 9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya dan Penjabarannya terhadap Misi

MISI	9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya	Penjabaran Prioritas Pembangunan	SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah	Peningkatan infrastruktur pertanian dalam arti luas	Meningkatkan cakupan layanan jaringan irigasi, bendung dan saluran tambak	Dinas PUPR, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian dan SDA Setda, serta Balai Wilayah Sungai IV Kendari
		Peningkatan jalan produksi dan jalan usaha tani pada sentra-sentra produksi	
	Penguatan konektivitas infrastruktur daerah	Peningkatan konektivitas transportasi antara pusat-pusat sentra Produksi, Pariwisata dan Pemerintahan	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, , Bagian Infrastruktur Setda dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XXI Kendari
		Perluasan keterjangkauan layanan komunikasi dan informasi hingga ke pelosok	Dinas Kominfo dan Bagian Humas dan Protokol Setda
2. Meningkatkan kinerja ekonomi	Penguatan struktur ekonomi rakyat dan penanggulangan	Meningkatkan daya saing produksi dan pengolahan hasil	Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura, Dinas

Bab VI – Strategi ,Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

MISI	9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya	Penjabaran Prioritas Pembangunan	SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana
melalui ekonomi kerakyatan	kemiskinan	agribisnis dan agroindustri	Perkebunan dan Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, BKAD serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda, Perbankan
		Pengembangan produk unggulan pertanian berskala kawasan	
		Pemberian stimulan permodalan bagi Petani, Nelayan dan UMKM	
		Peningkatan nilai tambah kepariwisataan dan penguatan ekonomi kreatif	
	Pembukaan peluang kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja	Penguatan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Peningkatan keterampilan wirausaha	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Peningkatan kerjasama Pemerintah, Masyarakat dan Dunia usaha	Dinas PM & PTSP, Bag. Pemerintahan Setda, Perusda, Perbankan
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan serta penguatan sendi-sendi sosial budaya dan agama	Peningkatan Pendidikan, Agama, Budaya dan Paham kebangsaan	Beasiswa berprestasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BKAD
		Perpustakaan yang representative	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sekolah berbasis IT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kominfo
		Promotif dan preventif kesehatan sejak dini melalui penguatan UKS	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Penguatan nilai-nilai keagamaan melalui pembinaan pada usia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol,

Bab VI – Strategi ,Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

MISI	9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya	Penjabaran Prioritas Pembangunan	SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana
		sekolah dan inter antar umat beragama	Bag. Kesra Setda, Kementerian Agama Kolaka
		Penguatan nilai-nilai budaya yang berbasis kearifan lokal dan pemahaman kebangsaan untuk mempererat kebhinekaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol, Dinas Pemuda dan Olahraga, Bag. Pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Linmas Setda
	Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat yang berkualitas	Kolaka Sehat	Dinas Kesehatan, Dinas PP & KB, Dinas PKP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bappeda, Dinas PP dan PA
		Meningkatkan peran rumah sakit kolaka sebagai pusat rujukan regional	Dinas Kesehatan, RSBG, BPJS Kesehatan
4. Menerapkan tatakelola pemerintahan yang baik, efisien, bersih dan bermartabat	Pemantapan Reformasi Birokrasi yang berbasis elektronik serta Peningkatan pelayanan pemerintahan lini depan	Penerapan e-Government terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-Kinerja, e-Monev dll)	Seluruh SKPD
		Peningkatan kualitas aparat pemerintah lini depan	Dinas PMD, Bag. Pemerintahan Setda, Bag. Pemberdayaan masyarakat dan Trantibum Linmas Setda, Kecamatan, Lurah, Desa,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan	Penataan Kawasan Perkotaan dan Fasilitas Publik	Penataan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PKP, Dinas Kesehatan, Bappeda, Satpol PP dan Damkar, Bag.
		Peningkatan kualitas lingkungan	
		Penyediaan Prasana Sarana Utilitas yang	

## Bab VI – Strategi ,Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

MISI	9 Prioritas Pembangunan SMS Berjaya	Penjabaran Prioritas Pembangunan	SKPD/ Instansi/ Lembaga Pelaksana
hidup		berkualitas	Infrastruktur Setda, Kecamatan, Kelurahan, Desa
		Penyediaan lampu jalan umum (Kolaka Terang)	
	Perlindungan SDA dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengawasan dan pemantauan pengelolaan Sumber daya alam	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PKP, Bappeda, Satpol PP dan Damkar, BPBD, Bag. Ekonomi dan SDA Setda, Bag. Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Balai SDA Sultra
		Pembangunan daerah yang tertib tata ruang dan berbasis lingkungan hidup	
	Penyediaan sarana prasarana persampahan dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan		

Penjabaran Program Prioritas yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya akan dilaksanakan kedalam Program pembangunan pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dengan saling berintegrasi serta berkolaborasi dalam rangka mewujudkan visi, dan misi pembangunan daerah serta pencapaian sasaran RPJMD.

### **B. Program Pembangunan**

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 telah diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan

Bab VI – Strategi ,Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang berjumlah 146 Program dengan disertai pendanaan bersifat indikatif yang tersaji pada tabel 6.9 berikut ini :

**TABEL 6.9**  
**Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024**

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	<b>MISI 1: MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH</b>														
	Tujuan 1: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dan kawasan permukiman		Indeks Daya Saing Infrastruktur	indeks	81,33		83,67		87		90		90		
	Sasaran 1: Meningkatkan dukungan infrastruktur untuk penguatan konektivitas dan peningkatan daya saing daerah		Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	65		68		71		75		75		
			Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam	%	75		80		85		90		90		
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (Potensial)	%	78	19.235.419.353	80	20.197.190.000	82	21.207.049.000	83	22.267.401.000	83	22.267.401.000	DINAS PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Mantap	%	68	73.950.001.122	70	82.116.810.000	73	97.436.249.000	75	113.528.190.000	75	113.528.190.000	DINAS PUPR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase fasilitas/ perlengkapan jalan kabupaten yang terpelihara	%	30	225.710.800	35	2.025.710.000	40	2.167.509.000	45	2.362.585.000	45	2.362.585.000	DISHUB
	Sasaran 2: Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar perumahan dan pemukiman		Persentase RT berakses air bersih	%	82		85		90		95		95		
			Persentase RT bersanitasi	%	85		88		92		95		95		
			Persentase Ruas Jalan dengan RJU yang berfungsi baik	%	20		25		30		35		35		
			Luas Kawasan Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu	Ha	4		5		5		5		5		
		1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	%	80	9.356.063.000	83	9.823.866.000	85	10.315.059.000	90	10.830.812.000	90	10.830.812.000	DINAS PUPR
		1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	85	6.040.110.000	88	6.342.115.000	90	6.659.220.000	95	6.992.181.000	95	6.992.181.000	DINAS PUPR
		1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem panjang drainase yang berfungsi dengan baik	%	45	4.551.007.605	60	4.778.557.000	65	5.017.484.000	70	5.268.359.000	70	5.268.359.000	DINAS PUPR

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	%	11	1.331.331.000	12	1.397.897.000	14	1.467.791.000	15	1.541.181.000	15	1.541.181.000	DINAS PUPR
		1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	%	11	350.000.000	12	367.500.000	13	385.875.000	14	405.168.000	14	405.168.000	DINAS PUPR
		1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga konstruksi/operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	40	72.286.000	50	100.000.000	60	107.000.000	70	116.630.000	70	116.630.000	DINAS PUPR
		1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	%	92	1.700.457.893	93	1.870.503.000	94	2.057.553.000	95	2.263.308.000	95	2.263.308.000	DINAS PKP
		1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	%	1	4.214.707.000	1	4.636.177.000	1	5.099.794.000	1	5.609.774.000	1	5.609.774.000	DINAS PKP
		1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8	160.244.000	7	176.268.000	6	193.894.000	5	213.284.000	5	213.284.000	DINAS PKP
		1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruas jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik	%	11,91	1.136.590.000	13	1.250.249.000	14	1.375.273.000	15	1.512.801.000	15	1.512.801.000	DINAS PKP
<b>MISI 2: MENINGKATKAN KINERJA EKONOMI MELALUI EKONOMI KERAKYATAN</b>															
	Tujuan 2: Meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat untuk menurunkan angka kemiskinan		Angka Kemiskinan	%	11,25		10,65		10,02		9,81		9,81		
	Sasaran 3: Meningkatnya kemampuan usaha dan kesempatan kerja		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp (ribuan)/bulan	12.843		13.143		13.443		13.743		13.743		
			Tingkat pengangguran terbuka	%	2,5		4,00		3,5		2,5		2,00		
		2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%	0	0	100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DINAS NAKERTRANS
		2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	%	18	243.577.600	20	267.935.000	22	294.728.000	23	324.201.000	23	324.201.000	DINAS NAKERTRANS
		2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan	%	21,00	319.185.700	22,00	351.104.000	23,00	386.214.000	25,00	424.835.000	26,00	424.835.000	DINAS NAKERTRANS
		2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	135.414.000	100	148.955.000	100	163.850.000	100	180.235.000	100	180.235.000	DINAS NAKERTRANS
		2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	9,83	37.566.400	14,34	200.000.000	22,54	220.000.000	28,68	242.000.000	28,68	242.000.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
		2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi bersertifikat NIK	%	30	166.872.000	35	283.559.000	40	311.914.000	50	343.106.000	50	343.106.000	DINAS KOPERASI DAN UKM

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Yang Sehat	%	6,15	47.670.000	8,20	200.000.000	10,25	220.000.000	12,30	242.000.000	12,30	242.000.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
		2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Anggota Koperasi yang terlatih	%	3,09	258.849.000	4,32	284.733.000	5,55	313.206.000	6,89	344.526.000	6,89	344.526.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
			Persentase Anggota Usaha Mikro yang terlatih	%	4,08		5,10		6,12		7,14		7,14	DINAS KOPERASI DAN UKM	
		2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Usaha Koperasi yang berkembang	%	6,3	250.557.000	7,87	275.612.000	9,84	303.173.000	9,84	333.490.000	85	333.490.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
		2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	%	0,98	363.107.000	1,2	599.417.000	2,00	659.358.000	3,5	725.294.000	3,5	725.294.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
		2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,12	487.121.800	0,2	735.833.000	0,31	809.416.000	0,47	890.357.000	0,47	890.357.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja disektor Pariwisata yang disertifikasi	%	94	318.714.600	96	550.586.000	98	605.644.000	100	666.209.000	100	666.209.000	DINAS PARIWISATA
		3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi penetapannya	%	100	62.543.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DISNAKERTRANS
		3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembangunannya	%	100	53.696.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DISNAKERTRANS
		3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembinaannya	%	100	50.333.800	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DISNAKERTRANS
	Sasaran 4: Tercapainya ketahanan pangan dan diversifikasi ketahanan pangan daerah		Skor Pola Pangan Harapan	Skor	97,0		97,5		98		98,5		98,5		
		2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pencapaian kemandirian pangan	%	67	456.874.000	80	502.561.000	90	552.817.000	100	608.098.000	100	608.098.000	DINAS KETAPANG
		2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Per Kapita/Hari	Kkal/kap/Thn	2400	324.108.000	2400	356.518.000	2400	392.169.000	2400	431.386.000	2400	431.386.000	DINAS KETAPANG
			Ketersediaan Protein Per Kapita/Hari	Gram/kap/Thn	63		63		63		63		63	0	0
		2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	80	33.487.000	85	100.000.000	90	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS KETAPANG
		2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	86	60.151.200	90	100.000.000	95	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS KETAPANG

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Tujuan 3: Meningkatkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor unggulan daerah		Nilai PDRB AHK	Rp. (Milyar)	18701		19823		21211		22696		22696		
	Sasaran 5: Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	%	4,5		5,5		6		6,5		6,5		
			Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	%	19,44		19,53		19,98		20		20		
		3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2.515.437.600	2	2.766.981.000	2	3.043.679.000	3	3.348.047.000	3	3.348.047.000	DINAS PERIKANAN
		3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	%	0,40	2.635.790.600	0,79	2.899.369.000	1,39	3.189.305.000	2,98	3.508.236.000	2,98	3.508.236.000	DINAS PERIKANAN
		3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	8	714.285.000	14	785.713.000	18	864.284.000	21	950.712.000	21	950.712.000	DINAS PERIKANAN
		3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	2,4	767.245.000	2,6	1.043.969.000	2,8	1.148.365.000	3	1.263.202.000	3	1.263.202.000	DINAS PARIWISATA
		3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Promosi Wisata	%	90	368.789.000	92	405.667.000	94	446.233.000	96	490.857.000	96	490.857.000	DINAS PARIWISATA
		3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rasio Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan Haki	%	15	225.388.000	20	247.926.000	25	272.718.000	30	299.990.000	30	299.990.000	DINAS PARIWISATA
		3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja disektor Pariwisata yang disertifikasi	%	94	318.714.600	96	550.586.000	98	605.644.000	100	666.209.000	100	666.209.000	DINAS PARIWISATA
		3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	1.717.148.500	3	1.888.863.000	4	2.077.749.000	5	2.285.524.000	5	2.285.524.000	DISTANHORTI
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%	2		3		4		5		5		DISTANHORTI
			Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	2		3		4		5		5		DISTANHORTI
			Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	7,50	2.354.362.200	8,50	2.589.798.000	9,00	2.848.777.000	9,50	3.133.655.000	9,50	3.133.655.000	DISBUNNAK
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5		5		5		5		5	0	DISBUNNAK
		3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	4,05	2.732.988.000	5,19	3.006.286.000	6,17	3.306.914.000	6,98	3.637.606.000	6,98	3.637.606.000	DISTANHORTI
			Persentase Peningkatan Prasarana perkebunan	%	3,16		4,08		5,88		6,48		6,48		DISBUNNAK
			Persentase Peningkatan Prasarana peternakan	%	1		2		2		2		2		DISBUNNAK

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan hewan/ Ternak	%	11,6	267.040.300	12,8	293.744.000	14,11	323.118.000	15,5	355.430.000	15,5	355.430.000	DISBUNNAK
		3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang dikendalikan	%	96,05	584.536.000	94,71	642.989.000	92,14	707.287.000	90,34	778.016.000	90,34	778.016.000	DISTANHORTI
			Persentase luas serangan OPT Perkebunan yang dikendalikan	%	66	131.198.200	65	144.318.000	63	158.749.000	61	174.624.000	61	174.624.000	DISBUNNAK
		3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Madya Pertanian	%	19,47	7.952.797.400	28,92	8.748.077.000	38,37	9.622.884.000	47,83	10.585.173.000	47,83	10.585.173.000	DISTANHORTI
		3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin	%			43,22	100.000.000	44,33	107.000.000	45,44	116.630.000	45,44	116.630.000	DISPERINDAG
		3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar daerah dalam Kondisi baik	%	60,71	999.900.000	64,29	1.099.890.000	67,86	1.209.879.000	71,43	1.330.866.000	71,43	1.330.866.000	DISPERINDAG
		3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Harga bahan Kebutuhan Pokok	%	30,77	218.258.000	38,46	440.083.000	53,85	484.091.000	69,23	532.500.000	69,23	532.500.000	DISPERINDAG
		3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Perkembangan Ekspor	%	2	931.735.400	2,5	1.024.908.000	2,5	1.127.398.000	3	1.240.138.000	3	1.240.138.000	DISPERINDAG
		3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Perkembangan Nilai Perdagangan Produk Dalam Negeri	%	25	41.200.000	28	141.200.000	28	151.084.000	30	164.681.000	30	164.681.000	DISPERINDAG
		3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Pembangunan Industri	%	25	1.422.065.000	50	1.564.271.000	75	1.720.698.000	100	1.892.767.000	100	1.892.767.000	DISPERINDAG
		3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri yang Memiliki Izin Usaha	%			3,30	100.000.000	4,43	107.000.000	5,57	116.630.000	5,57	116.630.000	DISPERINDAG
		3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Industri yang terpublikasi melalui SIIINas	%	60	80.430.000	65	108.473.000	70	119.320.000	75	131.252.000	75	131.252.000	DISPERINDAG
	Sasaran 6: Meningkatkan daya saing dan investasi daerah		Nilai investasi	Rp (milyar)	80		81,5		83,5		85		85		
		2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	%	100	99.403.000	100	209.343.000	100	230.277.000	100	253.305.000	100	253.305.000	DINAS PM & PTSP
		2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	%	100	283.845.000	100	512.229.000	100	563.451.000	100	619.797.000	100	619.797.000	DINAS PM & PTSP
		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan pelayanan penanaman modal	%	100	143.592.000	100	257.951.000	100	283.746.000	100	312.120.000	100	312.120.000	DINAS PM & PTSP
		2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	347.573.000	100	382.330.000	100	420.563.000	100	462.619.000	100	462.619.000	DINAS PM & PTSP

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	<b>MISI 3: MENINGKATKAN PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA Penguatan Sendi-Sendi Sosial, Budaya dan Agama</b>														
	Tujuan 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Nilai IPM	indeks	73		73,5		74		74,5		74,5		
	Sasaran 7: Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,25		13,75		13,97		14		14		
			Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	9		9,25		9,5		9,75		9,75		
			Angka Harapan Hidup	Tahun	71,2		71,5		71,8		72		72		
			Prevalensi Stunting Balita	%	15		14,5		14,25		14		14		
		1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK dan APM SD & SMP			85.450.480.185		87.023.004.000		91.374.154.000		95.942.861.000		95.942.861.000	DIKBUD
			APK SD	%	103,91		104,5		105		105,8		105,8		DIKBUD
			APK SMP	%	79,83		80		80,1		80,2		80,2		DIKBUD
			APM SD	%	99,25		99,3		99,45		99,5		99,5		DIKBUD
			APM SMP	%	73		73,5		75,1		75,8		75,8		DIKBUD
		1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%			100	500.000.000	100	535.000.000	100	583.150.000	100	583.150.000	DIKBUD
		1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Distribusi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan ( Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	%	97,58	956.171.000	98,87	3.003.979.000	99,26	3.154.177.000	99,82	3.311.886.000	99,82	3.311.886.000	DIKBUD
		1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga yang memenuhi persyaratan pemberian izin operasional	%			100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DIKBUD
		1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%			40	300.000.000	45	321.000.000	50	349.890.000	50	349.890.000	DIKBUD
		1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	172.128.707.015	100	180.735.142.000	100	189.771.899.000	100	199.260.494.000	100	199.260.494.000	DINKES
			Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap)	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
			Rasio daya tampung RS Rujukan	per 1000 penduduk	0,12		0,14		0,16		0,18		0,18		DINKES
			Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	%	100		100		100		100		100		DINKES
		1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dengan STR	%	76	405.827.000	77	426.118.000	78	447.423.000	80	469.795.000	80	469.795.000	DINKES
		1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	86	281.255.000	87	295.317.000	88	310.082.000	89	325.586.000	89	325.586.000	DINKES
		1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	72	1.563.372.000	75	1.641.540.000	78	1.723.617.000	80	1.809.797.000	80	1.809.797.000	DINKES
		2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	50	397.925.800	55	537.718.000	60	591.489.000	65	650.638.000	65	650.638.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka Dan Naskah Kuno	%	1	1.907.500	20	100.907.000	30	110.997.000	40	122.097.000	40	122.097.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Sasaran 8: Meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB serta peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olahraga		Total Fertility Rate	anak perwanita	2,63		2,58		2,52		2,5		2,5		
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	90		90,1		90,2		90,3		90,3		

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
			Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	600		650		700		750		750		
					Pratama		Madya		Madya		Nindya		Nindya		
			Presentase peningkatan kapasitas kepemudaan dan Prestasi olahraga	Persen	80		85		90		95		95		
		2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pemenuhan pelebagaan PUG	%	44	277.968.000	50	305.764.000	60	336.340.000	70	369.974.000	70	369.974.000	DINAS PP & PA
		2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pendampingan korban kekerasan pada perempuan	%	100	111.800.400	100	122.980.000	100	135.278.000	100	148.805.000	100	148.805.000	DINAS PP & PA
		2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	%			16,7	100.000.000	17,7	107.000.000	19,3	116.630.000	19,3	116.630.000	DINAS PP & PA
		2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpisah gender	%	40	64.635.000	50	100.000.000	70	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS PP & PA
		2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100	398.589.800	100	438.448.000	100	482.292.000	100	530.522.000	100	530.522.000	DINAS PP & PA
		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pendampingan korban kekerasan pada anak	%	100	106.615.600	100	117.277.000	100	129.004.000	100	141.905.000	100	141.905.000	DINAS PP & PA
		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,82	718.325.000	1,61	790.157.000	1,41	869.172.000	1,21	956.089.000	1,21	956.089.000	DINAS PP DAN KB
			Persentase Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	%			50		65		80		80	0	DINAS PP DAN KB
		2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 - 49 tahun	%	72,75	4.739.648.400	73,13	5.213.613.000	73,51	5.734.974.000	73,89	6.308.471.000	73,89	6.308.471.000	DINAS PP DAN KB
			Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	6,19		5,89		5,59		5,29		5,29	0	DINAS PP DAN KB
		2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikutsertaan ber KB pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKB, BKR, BKL dan kelompok UPPKS	%		607.906.000	60	668.696.000	70	735.565.000	80	809.122.000	80	809.122.000	DINAS PP DAN KB
		2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	40	654.162.000	45	1.019.578.000	50	1.121.535.000	63	1.233.689.000	63	1.233.689.000	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA
		2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase keolahragaan yang dikembangkan dan ditingkatkan daya Saingnya	%	3,12	1.565.138.000	15,62	8.721.651.000	18,75	2.593.816.000	22,00	2.853.197.000	22,00	2.853.197.000	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA
		2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi kepramukaan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kapasitasnya	%	99,13	200.000.000	99,13	520.000.000	100	572.000.000	100	629.200.000	100	629.200.000	DINAS PEMUDA & OLAHRAGA

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Tujuan 5: meningkatkan kualitas sendi-sendi sosial, budaya, agama dan paham kebangsaan		Indeks Kebebasan Sipil	Indeks	85		88		90		92		92		
	Sasaran 9: Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Lestarinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase lembaga adat dan budaya yang terbina lokal	%	45		50		55		65		65		
		2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	46,30	932.033.500	51,26	1.025.236.000	59,26	1.127.759.000	78,08	1.240.535.000	78,08	1.240.535.000	DIKBUD
		2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang didaftarkan	%	100	661.704.650	100	727.875.000	100	800.662.000	100	880.728.000	100	880.728.000	DIKBUD
	Sasaran 10: Menurunnya jumlah PMKS di daerah		Persentase PMKS yang tertangani	%	55		60		65		70		70		
		1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di berdayakan	%	40	474.172.000	60	521.589.000	80	573.747.000	100	631.122.000	100	631.122.000	DINSOS
		1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti Mendapatkan penanganan	%	100	1.896.646.800	100	2.086.311.000	100	2.294.942.000	100	2.524.436.000	100	2.524.436.000	DINSOS
		1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	81	916.073.100	83	1.007.680.000	85	1.108.448.000	87	1.219.292.000	87	1.219.292.000	DINSOS
	Sasaran 11: Terciptanya kerukunan antar dan inter umat beragama di daerah		Indeks kerukunan umat beragama	indeks	80		85		85		85		85		
		8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	209.486.000	85	230.434.000	90	253.477.000	95	278.825.000	95	278.825.000	KESBANGPOL
		8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pemahaman Politik dan Demokrasi	%	80	844.174.000	85	928.591.000	90	1.021.450.000	100	1.123.595.000	100	1.123.595.000	KESBANGPOL
		8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang diawasi	%	80	101.304.000	85	211.434.000	90	232.577.000	100	255.835.000	100	255.835.000	KESBANGPOL
		8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	85	287.808.000	88	316.588.000	90	348.246.000	92	383.071.000	92	383.071.000	KESBANGPOL

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	%	85	889.707.400	90	1.178.678.000	90	1.296.545.800	100	1.426.200.000	100	1.426.200.000	KESBANGPOL
<b>MISI 4: MENERAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, EFISIEN, BERSIH DAN BERMARTABAT</b>															
	Tujuan 6: Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	B		B		B		B		B		
	Sasaran 12: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan		Nilai AKIP kabupaten	indeks	B		B		B		BB		BB		
			Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	Opini	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,65		0,67		0,69		0,71		0,71		
			Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Predikat	baik		baik		sangat baik		sangat baik		sangat baik		
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah	Indeks	77		80		84		88		88		
			Persentase pertumbuhan PAD	%	7		8,5		10		11,5		11,5		
		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum	%	100	4.679.879.200	100	6.147.867.000	100	6.762.653.000	100	7.438.919.000	100	7.438.919.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pendaftaran Penduduk	%	97,66	955.526.000	97,67	1.051.078.000	97,69	1.156.185.000	97,70	1.271.804.000	97,70	1.271.804.000	DINAS KEPENDUDUK AN & PENCATATAN SIPIL
		2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil yang di terbitkan	%	53	284.054.000	54	412.459.000	55	453.704.000	56	499.075.000	56	499.075.000	DINAS KEPENDUDUK AN & PENCATATAN SIPIL
		2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang di kelola	%	90,99	111.132.000	90,99	222.245.000	90,99	244.469.000	90,99	268.916.000	99,99	268.916.000	DINAS KEPENDUDUK AN & PENCATATAN SIPIL
		2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan yang di kelola	%	55,88	62.265.800	73,52	262.265.000	88	280.623.000	100	305.879.000	100	305.879.000	DINAS KEPENDUDUK AN & PENCATATAN SIPIL
		2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Kel. yang tertata	%	15	36.300.000	17	236.300.000	17	252.841.000	17	275.596.000	17	275.596.000	DINAS PMD
		2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	5	94.380.000	10	203.818.000	25	224.199.000	35	246.619.000	35	246.619.000	DINAS PMD

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan desa yang akuntabel	%	72	531.831.600	75	585.014.000	78	643.515.000	80	707.866.000	80	707.866.000	DINAS PMD
		2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang di berdayakan	%	63	484.637.600	65	733.101.000	67	806.411.000	70	887.052.000	70	887.052.000	DINAS PMD
		2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik	%	60	136.519.000	65	650.170.000	70	1.200.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	DISKOMINFO
		2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	85	2.972.977.700	90	4.270.275.000	95	4.797.302.000	100	5.377.032.000	100	5.377.032.000	DISKOMINFO
		2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan data dan sistem informasi PM secara elektronik	%	100	51.650.000	100	351.650.000	100	376.265.000	100	410.129.000	100	410.129.000	DINAS PM & PTSP
		2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	70	133.617.200	75	246.978.000	80	271.675.000	85	298.843.000	85	298.843.000	DISKOMINFO
		2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan digital informasi	%	50	19.042.000	55	119.042.000	60	127.374.000	65	138.838.000	65	138.838.000	DISKOMINFO
		2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD tertib administrasi kearsipan	%	42	63.848.000	62	200.000.000	88	220.000.000	100	242.000.000	100	242.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang mendapat perlindungan dan diselamatkan	%	6	43.516.000	12	200.000.000	18	220.000.000	34	242.000.000	34	242.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	persentase SOP arsip yang dibuat	%	30	10.763.000	60	100.000.000	80	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	%	85	150.488.000	90	465.536.000	95	512.089.000	98	563.298.000	98	563.298.000	DISPERINDAG
		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	14.210.352.400	100	15.631.387.000	100	17.194.525.000	100	18.913.978.000	100	18.913.978.000	SETDA
		4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	1.200.136.000	100	1.320.149.000	100	1.452.163.000	100	1.597.380.000	100	1.597.380.000	SETDA
		4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	11.214.502.200	100	12.335.952.000	100	13.569.547.000	100	14.926.501.000	100	14.926.501.000	SEKRETARIAT DPRD
		5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	2.052.732.600	100	3.258.005.000	100	3.583.805.000	100	3.942.186.000	100	3.942.186.000	BAPPEDA

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sasaran Program dan Kegiatan RKP yang Konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	%	100	1.320.572.700	100	1.952.629.000	100	2.147.891.000	100	2.362.681.000	100	2.362.681.000	BAPPEDA
		5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian kinerja tata kelola keuangan daerah	%	82	175.542.999.800	87	179.850.573.913	90	203.900.943.291	95	223.683.568.485	95	223.683.568.485	BKAD
		5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	%	82	2.751.840.400	86	2.889.432.000	87	3.178.375.000	90	3.496.212.000	90	3.496.212.000	BKAD
		5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	%	100	2.423.004.000	100	2.802.896.000	100	3.083.185.000	100	3.391.504.000	100	3.391.504.000	BAPENDA
		5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	1.064.009.000	100	1.170.409.000	100	1.287.449.000	100	1.416.194.000	100	1.416.194.000	BKPSDM
		5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80	2.344.833.000	80	4.579.316.000	80	5.037.247.000	80	5.540.972.000	80	5.540.972.000	BKPSDM
		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	%	100	1.601.490.500	100	2.061.639.000	100	2.267.802.000	100	2.494.583.000	100	2.494.583.000	BALITBANG
		6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%	100	2.055.324.400	100	3.760.856.000	100	4.136.941.000	100	4.550.635.000	100	4.550.635.000	INSPEKTORAT
		6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Teknis Asistensi dan Pendampingan yang dirumuskan	%	100	1.479.727.600	100	3.127.700.000	100	3.440.470.000	100	3.784.517.000	100	3.784.517.000	INSPEKTORAT
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	869.436.444	100	921.602.000	100	986.114.100	100	1.074.864.000	100	1.074.864.000	KECAMATAN
		7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	18.501.350.335	100	19.611.431.000	100	20.984.231.100	100	22.872.811.000	100	22.872.811.000	KECAMATAN
		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	8.100.000	100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	KECAMATAN
		7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Presentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Desa/ Kelurahan	%	100	6.000.000	100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	KECAMATAN
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	48.845.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINSOS
		2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%			100	10.000.000.000	100	11.000.000.000	100	12.100.000.000	100	12.100.000.000	0

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	<b>MISI 5: MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP</b>														
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	69.9		70.25		70.6		70.94		70.94		
	Sasaran 13: Optimalnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Keberlanjutan		Pencapaian Adipura	Tercapai/ Tidak Tercapai	tercapai		tercapai		tercapai		tercapai		tercapai		
		1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Penerbitan Pertimbangan Teknis yang Sesuai Pemanfaatan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%	93	2.647.086.240	94	2.779.440.000	95	2.918.412.000	96	3.064.332.000	96	3.064.332.000	DINAS PUPR
		2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dikaji	%	100	98.170.000	100	107.987.000	100	118.785.000	100	130.664.000	100	130.664.000	DLH
		2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	%	90	176.142.000	90	393.756.000	90	433.131.000	90	476.444.000	90	476.444.000	DLH
															DLH
		2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan RTH Perkotaan	%	55	2.493.691.900	60	2.743.061.000	65	3.017.367.000	70	3.319.103.000	70	3.319.103.000	DLH
		2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pembinaan Pengelola Limbah B3	%	100	75.095.000	100	175.095.000	100	187.351.000	100	204.213.000	100	204.213.000	DLH
		2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan izin PPLH	%	100	80.447.000	100	180.447.000	100	193.078.000	100	210.455.000	100	210.455.000	DLH
		2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pembinaan Lembaga Peduli Lingkungan	%	0	0	100	15.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	DLH
		2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan lingkungan hidup	%	100	225.995.000	100	433.594.000	100	476.453.000	100	522.798.000	0	522.798.000	DLH
		2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan yang ditindak lanjuti	%	100	16.044.000	100	116.044.000	100	124.167.000	100	135.342.000	100	135.342.000	DLH
		2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	96	4.330.075.000	97	5.763.082.000	98	6.339.390.000	99	6.973.329.000	99	6.973.329.000	DLH

Kode	Tujuan/Sasaran	Program	Indikator Tujuan/ Sasaran/ Program	Satuan									Kondisi Akhir		OPD Penanggung Jawab
					2021		2022		2023		2024		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Sasaran 14: Meningkatnya ketangguhan daerah dalam menghadapi dan mengurangi risiko bencana dan kondisi kedaruratan		Persentase Desa Tangguh Bencana	%	45,83		62,5		79,17		100		100		
		1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	189.900.000	100	1.089.900.000	100	1.166.193.000	100	1.271.150.000	100	1.271.150.000	BPBD
		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	1.718.587.000	100	2.890.445.000	100	3.179.489.000	100	3.497.438.000	100	3.497.438.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan Bencana	%	100	1.145.348.000	100	1.259.882.000	100	1.385.870.000	100	1.524.457.000	100	1.524.457.000	DINSOS
						694.405.285.442		773.390.431.913		840.738.799.291		913.807.761.485		913.807.761.485	

## **BAB VII**

### **KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III sebelumnya, Pendapatan daerah Kabupaten Kolaka dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

- a. Meningkatnya bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dari alokasi dana transfer pusat sebagai akibat dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yang kewenangannya berada pada pemerintah Kabupaten Kolaka;
- b. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak dan retribusi utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru lainnya;
- c. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2020-2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan

daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan sesuai kewenangan Kabupaten Kolaka dengan memperhatikan potensi daerah.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan proporsi yang semakin berimbang dalam rangka menjaga kualitas fiskal daerah.

Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2020-2024 tertuang dalam tabel 7.1 berikut :

Bab VII – Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Tabel 7.1  
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2024  
Kabupaten Kolaka

URAIAN	APBD 2021	PROYEKSI (Rp.)		
		2022	2023	2024
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.296.165.030.858,00</b>	<b>1.393.377.408.172,00</b>	<b>1.497.880.713.785,00</b>	<b>1.610.221.767.319,00</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>133.705.406.158,00</b>	<b>143.733.311.620,00</b>	<b>154.513.309.991,00</b>	<b>166.101.808.241,00</b>
Pajak daerah	42.670.238.054,00	45.870.505.908,00	49.310.793.851,00	53.009.103.390,00
Retribusi daerah	18.511.296.957,00	19.899.644.229,00	21.392.117.546,00	22.996.526.362,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.592.488.000,00	13.536.924.600,00	14.552.193.945,00	15.643.608.491,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	59.931.383.147,00	64.426.236.883,00	69.258.204.649,00	74.452.569.998,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.106.204.205.000,00</b>	<b>1.189.169.520.375,00</b>	<b>1.278.357.234.403,00</b>	<b>1.374.234.026.983,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.037.849.763.000,00	1.115.688.495.225,00	1.199.365.132.367,00	1.289.317.517.294,00
<i>Dana bagi hasil</i>	<i>99.696.202.000,00</i>	<i>107.173.417.150,00</i>	<i>115.211.423.436,00</i>	<i>123.852.280.194,00</i>
<i>Dana alokasi umum</i>	<i>560.585.321.000,00</i>	<i>602.629.220.075,00</i>	<i>647.826.411.581,00</i>	<i>696.413.392.449,00</i>
<i>Dana alokasi khusus</i>	<i>256.212.251.000,00</i>	<i>275.428.169.825,00</i>	<i>296.085.282.562,00</i>	<i>318.291.678.754,00</i>
<i>Dana insentif khusus</i>	<i>34.101.216.000,00</i>	<i>36.658.807.200,00</i>	<i>39.408.217.740,00</i>	<i>42.363.834.071,00</i>
<i>Dana desa</i>	<i>87.254.773.000,00</i>	<i>93.798.880.975,00</i>	<i>100.833.797.048,00</i>	<i>108.396.331.827,00</i>
Pendapatan Transfer Antar Daerah	68.354.442.000,00	73.481.025.150,00	78.992.102.036,00	84.916.509.689,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>56.255.419.700,00</b>	<b>60.474.576.178,00</b>	<b>65.010.169.391,00</b>	<b>69.885.932.095,00</b>
Pendapatan Hibah	19.842.525.000,00	21.330.714.375,00	22.930.517.953,00	24.650.306.800,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	36.412.894.700,00	39.143.861.803,00	42.079.651.438,00	45.235.625.296,00
<b>BELANJA</b>	<b>1.298.165.030.858,00</b>	<b>1.395.527.408.172,00</b>	<b>1.500.191.963.785,00</b>	<b>1.612.706.361.069,00</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>810.132.519.107,00</b>	<b>870.892.458.040,00</b>	<b>936.209.392.393,00</b>	<b>1.006.425.096.823,00</b>
Belanja pegawai	449.059.377.077,00	482.738.830.358,00	518.944.242.635,00	557.865.060.832,00
Belanja barang dan jasa	353.536.258.530,00	380.051.477.920,00	408.555.338.764,00	439.196.989.171,00
Belanja hibah	5.498.075.000,00	5.910.430.625,00	6.353.712.922,00	6.830.241.391,00
Belanja bantuan sosial	2.038.808.500,00	2.191.719.138,00	2.356.098.073,00	2.532.805.428,00

Bab VII – Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

<b>Belanja Modal</b>	<b>319.008.857.051,00</b>	<b>342.934.521.330,00</b>	<b>368.654.610.430,00</b>	<b>396.303.706.212,00</b>
Belanja modal tanah	1.122.000.000,00	1.206.150.000,00	1.296.611.250,00,	1.393.857.094,00
Belanja modal peralatan dan mesin	71.557.741.076,00	76.924.571.657,00	82.693.914.531,00	88.895.958.121,00
Belanja modal gedung dan bangunan	134.850.085.227,00	144.963.841.619,00	155.836.129.740,00	167.523.839.471,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	110.785.245.956,00	119.094.139.403,00	128.026.199.858,00	137.628.164.847,00
Belanja modal aset tetap lainnya	693.784.792,00	745.818.651,00	801.755.050,00	861.886.679,00
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>15.000.000.000,00</b>	<b>16.125.000.000,00</b>	<b>17.334.375.000,00</b>	<b>18.634.453.125,00</b>
Belanja tidak terduga	15.000.000.000,00	16.125.000.000,00	17.334.375.000,00	18.634.453.125,00
<b>Belanja Transfer</b>	<b>154.023.654.700,00</b>	<b>165.575.428.803,00</b>	<b>177.993.585.963,00</b>	<b>191.343.104.910,00</b>
Belanja bagi hasil	5.729.400,00	6.159.105,00	6.621.038,00	7.117.616,00
Belanja bantuan keuangan	154.017.925.300,00	165.569.269.698,00	177.986.964.925,00	191.335.987.294,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(2.000.000.000,00)</b>	<b>(2.150.000.000,00)</b>	<b>(2.311.250.000,00)</b>	<b>(2.484.593.750,00)</b>

Berdasarkan kerangka pendanaan tersebut di atas dapat digambarkan dalam rencana program prioritas daerah pada seluruh perangkat daerah yang dijabarkan dalam 6 Urusan pemerintahan wajib dengan pelayanan dasar, 18 Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, 8 Urusan pemerintahan pilihan, 2 unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 Unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum. Pada Tabel 7.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab dan bidang urusan masing-masing. Adapun penjabaran program prioritas seluruh perangkat daerah Kabupaten Kolaka disajikan dalam Tabel 7.2 berikut ini :

**TABEL 7.2**  
**Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Kolaka Tahun 2021-2024**

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	185.530.512.963	100	190.168.775.787	100	201.578.902.334	100	213.673.636.474	100	213.673.636.474	DIKBUD
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK dan APM SD & SMP			85.450.480.185		87.023.004.000		91.374.154.000		95.942.861.000		95.942.861.000	DIKBUD
	APK SD		103,91		104,5		105		105,8		105,8		DIKBUD
	APK SMP		79,83		80		80,1		80,2		80,2		DIKBUD
	APM SD		99,25		99,3		99,45		99,5		99,5		DIKBUD
	APM SMP		73		73,5		75,1		75,8		75,8		DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%			100	500.000.000	100	535.000.000	100	583.150.000	100	583.150.000	DIKBUD
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Distribusi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan ( Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	%	97,58	956.171.000	98,87	3.003.979.000	99,26	3.154.177.000	99,82	3.311.886.000	99,82	3.311.886.000	DIKBUD
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga yang memenuhi persyaratan pemberian izin operasional	%			100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DIKBUD
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%			40	300.000.000	45	321.000.000	50	349.890.000	50	349.890.000	DIKBUD
<b>1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			126.029.652.771		129.180.394.090		136.931.217.736		145.147.090.800		145.147.090.800	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	172.128.707.015	100	180.735.142.000	100	189.771.899.000	100	199.260.494.000	100	199.260.494.000	DINKES
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap)	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	%	100		100		100		100		100		DINKES

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	%	100		100		100		100		100		DINKES
	Rasio daya tampung RS Rujukan	per 1000 penduduk	0,12		0,14		0,16		0,18		0,18		DINKES
	Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	%	50		100		100		100		100		DINKES
	Prevalensi stunting pada balita	%	15,2		14,8		14,4		14		14		DINKES
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dengan STR	%	76	405.827.000	77	426.118.000	78	447.423.000	80	469.795.000	80	469.795.000	DINKES
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	86	281.255.000	87	295.317.000	88	310.082.000	89	325.586.000	89	325.586.000	DINKES
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	72	1.563.372.000	75	1.641.540.000	78	1.723.617.000	80	1.809.797.000	80	1.809.797.000	DINKES
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	10.594.695.529	100	10.859.562.917	100	11.511.136.692	100	12.201.804.894	100	12.201.804.894	DINAS PUPR
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luas Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (Potensial)	%	78	19.235.419.353	80	20.197.190.000	82	21.207.049.000	83	22.267.401.000	83	22.267.401.000	DINAS PUPR
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	%	80	9.356.063.000	83	9.823.866.000	85	10.315.059.000	90	10.830.812.000	90	10.830.812.000	DINAS PUPR
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	85	6.040.110.000	88	6.342.115.000	90	6.659.220.000	95	6.992.181.000	95	6.992.181.000	DINAS PUPR
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem panjang drainase yang berfungsi dengan baik	%	45	4.551.007.605	60	4.778.557.000	65	5.017.484.000	70	5.268.359.000	70	5.268.359.000	DINAS PUPR
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	%	11	1.331.331.000	12	1.397.897.000	14	1.467.791.000	15	1.541.181.000	15	1.541.181.000	DINAS PUPR
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	%	11	350.000.000	12	367.500.000	13	385.875.000	14	405.168.000	14	405.168.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Mantap	%	68	73.950.001.122	70	82.116.810.000	73	97.436.249.000	75	113.528.190.000	75	113.528.190.000	DINAS PUPR
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga konstruksi/operator/teknisi/a nalis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	40	72.286.000	50	100.000.000	60	107.000.000	70	116.630.000	70	116.630.000	DINAS PUPR
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Penerbitan Pertimbangan Teknis yang Sesuai Pemanfaatan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%	93	2.647.086.240	94	2.779.440.000	95	2.918.412.000	96	3.064.332.000	96	3.064.332.000	DINAS PUPR
<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.448.771.761	100	4.559.991.055	100	4.833.590.518	100	5.123.605.949	100	5.123.605.949	DINAS PKP
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak Huni	%	92	1.700.457.893	93	1.870.503.000	94	2.057.553.000	95	2.263.308.000	95	2.263.308.000	DINAS PKP
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	%	1	4.214.707.000	1	4.636.177.000	1	5.099.794.000	1	5.609.774.000	1	5.609.774.000	DINAS PKP
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8	160.244.000	7	176.268.000	6	193.894.000	5	213.284.000	5	213.284.000	DINAS PKP
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ruas jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik	%	11,91	1.136.590.000	13	1.250.249.000	14	1.375.273.000	15	1.512.801.000	15	1.512.801.000	DINAS PKP
<b>1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT POL PP DAN DAMKAR</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.596.303.532	100	5.736.211.120	100	6.068.240.778	100	6.419.585.063	100	6.419.585.063	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Ketertiban dan Ketertaman Umum	%	100	4.679.879.200	100	6.147.867.000	100	6.762.653.000	100	7.438.919.000	100	7.438.919.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditegakkan	%	100		100		100		100		100		
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	1.718.587.000	100	2.890.445.000	100	3.179.489.000	100	3.497.438.000	100	3.497.438.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
<b>BPBD</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.226.935.580	100	3.307.608.970	100	3.518.208.517	100	3.742.051.190	100	3.742.051.190	BPBD
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	%	100	189.900.000	100	1.089.900.000	100	1.166.193.000	100	1.271.150.000	100	1.271.150.000	BPBD
<b>1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.711.595.598	100	4.829.385.488	100	5.119.148.617	100	5.426.297.534	100	5.426.297.534	DINSOS
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di berdayakan	%	40	474.172.000	60	521.589.000	80	573.747.000	100	631.122.000	100	631.122.000	DINSOS

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti Mendapatkan penanganan	%	100	1.896.646.800	100	2.086.311.000	100	2.294.942.000	100	2.524.436.000	100	2.524.436.000	DINSOS
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	81	916.073.100	83	1.007.680.000	85	1.108.448.000	87	1.219.292.000	87	1.219.292.000	DINSOS
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase penanganan bencana	%	100	1.145.348.000	100	1.259.882.000	100	1.385.870.000	100	1.524.457.000	100	1.524.457.000	DINSOS
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase capaian kondisi Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	50	48.845.000	60	100.000.000	70	110.000.000	80	121.000.000	90	121.000.000	DINSOS
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	7.093.314.872	100	7.270.647.744	100	7.706.886.608	100	8.169.299.805	100	8.169.299.805	
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%			100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DINAS NAKERTRANS
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lembaga yang menerapkan Program peningkatan Produktivitas	%	18	243.577.600	20	267.935.000	22	294.728.000	23	324.201.000	23	324.201.000	DINAS NAKERTRANS
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,00	319.185.700	71,50	351.104.000	72,00	386.214.000	72,50	424.835.000	72,50	424.835.000	DINAS NAKERTRANS
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	100	135.414.000	100	148.955.000	100	163.850.000	100	180.235.000	100	180.235.000	DINAS NAKERTRANS
<b>2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.610.693.443	100	2.675.960.779	100	2.836.518.426	100	3.006.709.531	100	3.006.709.531	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pemenuhan pelebagaan PUG	%	44	277.968.000	50	305.764.000	60	336.340.000	70	369.974.000	70	369.974.000	DINAS PP & PA
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase pendampingan korban kekerasan pada perempuan	%	100	111.800.400	100	122.980.000	100	135.278.000	100	148.805.000	100	148.805.000	DINAS PP & PA
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	%			16,7	100.000.000	17,7	107.000.000	19,3	116.630.000	19,3	116.630.000	DINAS PP & PA
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender	%	40	64.635.000	50	100.000.000	70	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS PP & PA
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	100	398.589.800	100	438.448.000	100	482.292.000	100	530.522.000	100	530.522.000	DINAS PP & PA
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pendampingan korban kekerasan pada anak	%	100	106.615.600	100	117.277.000	100	129.004.000	100	141.905.000	100	141.905.000	DINAS PP & PA
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.889.251.779	100	2.961.483.073	100	3.139.172.058	100	3.327.522.381	100	3.327.522.381	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase pencapaian kemandirian pangan	%	67	456.874.000	80	502.561.000	90	552.817.000	100	608.098.000	100	608.098.000	DINAS KETAPANG
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Energi Per Kapita/Hari	Kkal/kap/Thn	2400	324.108.000	2400	356.518.000	2400	392.169.000	2400	431.386.000	2400	431.386.000	DINAS KETAPANG
	Ketersediaan Protein Per Kapita/Hari	Gram/kap/Thn	63		63		63		63		63		
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%	80	33.487.000	85	100.000.000	90	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS KETAPANG
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%	86	60.151.200	90	100.000.000	95	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS KETAPANG
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>													
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan				100	10.000.000.000	100	11.000.000.000	100	12.100.000.000	100	12.100.000.000	
<b>2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>													DLH
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.865.979.376	100	7.037.628.860	100	7.459.886.592	100	7.907.479.788	100	7.907.479.788	DLH
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dikaji	%	100	98.170.000	100	107.987.000	100	118.785.000	100	130.664.000	100	130.664.000	DLH
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	%	90	176.142.000	90	393.756.000	90	433.131.000	90	476.444.000	90	476.444.000	DLH
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan RTH Perkotaan	%	55	2.493.691.900	60	2.743.061.000	65	3.017.367.000	70	3.319.103.000	70	3.319.103.000	DLH
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pembinaan Pengelola Limbah B3	%	100	75.095.000	100	175.095.000	100	187.351.000	100	204.213.000	100	204.213.000	DLH
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan izin PPLH	%	100	80.447.000	100	180.447.000	100	193.078.000	100	210.455.000	100	210.455.000	DLH
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pembinaan Lembaga Peduli Lingkungan	%			100	15.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	DLH
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase capaian penghargaan lingkungan hidup	%	100	225.995.000	100	433.594.000	100	476.453.000	100	522.798.000	100	522.798.000	DLH
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan yang ditindak lanjuti	%	100	16.044.000	100	116.044.000	100	124.167.000	100	135.342.000	100	135.342.000	DLH
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	%	96	4.330.075.000	97	5.763.082.000	98	6.339.390.000	99	6.973.329.000	99	6.973.329.000	DLH
<b>2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.997.597.840	100	3.072.537.786	100	3.256.890.053	100	3.452.303.456	100	3.452.303.456	DNAS DUKCAPIL
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Pendaftaran Penduduk	%	97,66	955.526.000	97,67	1.051.078.000	97,69	1.156.185.000	97,70	1.271.804.000	97,70	1.271.804.000	DNAS DUKCAPIL
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Pencatatan Sipil yang di terbitkan	%	53	284.054.000	54	412.459.000	55	453.704.000	56	499.075.000	56	499.075.000	DNAS DUKCAPIL
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang di kelola	%	90,99	111.132.000	90,99	222.245.000	90,99	244.469.000	90,99	268.916.000	99,99	268.916.000	DNAS DUKCAPIL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Profil Kependudukan yang di kelola	%	55,88	62.265.800	73,52	262.265.000	88	280.623.000	100	305.879.000	100	305.879.000	DNAS DUKCAPIL
<b>2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.793.237.180	100	6.963.068.110	100	7.380.852.196	100	7.823.703.328	100	7.823.703.328	
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Kel. yang tertata	%	15	36.300.000	17	236.300.000	17	252.841.000	17	275.596.000	17	275.596.000	DINAS PMD
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%	5	94.380.000	10	203.818.000	25	224.199.000	35	246.619.000	35	246.619.000	DINAS PMD
2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan pengelolaan adminisrasi pemerintahan desa yang akuntabel	%	72	531.831.600	75	585.014.000	78	643.515.000	80	707.866.000	80	707.866.000	DINAS PMD
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Adat dan Masyarakatat Hukum Adat yang di berdayakan	%	63	484.637.600	65	733.101.000	67	806.411.000	70	887.052.000	70	887.052.000	DINAS PMD
<b>2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.700.061.409	100	4.817.562.944	100	5.106.616.721	100	5.413.013.724	100	5.413.013.724	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,82	718.325.000	1,61	790.157.000	1,41	869.172.000	1,21	956.089.000	1,21	956.089.000	DINAS PP DAN KB
	Persentase Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	%			50		65		80		80		DINAS PP DAN KB
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 - 49 tahun	%	72,75	4.739.648.400	73,13	5.213.613.000	73,51	5.734.974.000	73,89	6.308.471.000	73,89	6.308.471.000	DINAS PP DAN KB
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%	6,19		5,89		5,59		5,29		5,29		DINAS PP DAN KB
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase keikut sertaan ber KB pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKB, BKR, BKL dan kelompok UPPKS	%	50	607.906.000	60	668.696.000	70	735.565.000	80	809.122.000	80	809.122.000	DINAS PP DAN KB
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	7.508.154.043	100	7.695.857.894	100	8.157.609.368	100	8.647.065.930	100	8.647.065.930	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Presentase fasilitas/ perlengkapan jalan kabupaten yang terpelihara	%	30	225.710.800	35	2.025.710.000	40	2.167.509.000	45	2.362.585.000	45	2.362.585.000	DISHUB
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.491.090.253	100	4.578.367.509	100	4.793.069.560	100	5.020.653.733	100	5.020.653.733	
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik	%	60	136.519.000	65	650.170.000	70	1.200.000.000	75	1.500.000.000	75	1.500.000.000	DISKOMINFO
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan SPBE	%	85	2.972.977.700	90	4.270.275.000	95	4.797.302.000	100	5.377.032.000	100	5.377.032.000	DISKOMINFO
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.320.283.818	100	4.428.290.913	100	4.693.988.368	100	4.975.627.670	100	4.975.627.670	

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase KSP/USP yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%	9,83	37.566.400	14,34	200.000.000	22,54	220.000.000	28,68	242.000.000	28,68	242.000.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi bersertifikat NIK	%	30	166.872.000	35	283.559.000	40	311.914.000	50	343.106.000	50	343.106.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Yang Sehat	%	6,15	47.670.000	8,20	200.000.000	10,25	220.000.000	12,30	242.000.000	12,30	242.000.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Anggota Koperasi yang terlatih	%	3,09	258.849.000	4,32	284.733.000	5,55	313.206.000	6,89	344.526.000	6,89	344.526.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
	Persentase Anggota Usaha Mikro yang terlatih	%	4,08		5,10		6,12		7,14		7,14		DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Usaha Koperasi yang berkembang	%	6,3	250.557.000	7,87	275.612.000	9,84	303.173.000	12,01	333.490.000	12,01	333.490.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	%	0,98	363.107.000	1,2	599.417.000	2,00	659.358.000	3,5	725.294.000	3,5	725.294.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%	0,12	487.121.800	0,2	735.833.000	0,31	809.416.000	0,47	890.357.000	0,47	890.357.000	DINAS KOPERASI DAN UKM
<b>2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>												DINAS PM & PTSP	
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.679.534.634	100	3.771.523.000	100	3.997.814.380	100	4.237.683.243	100	4.237.683.243	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	%	100	99.403.000	100	209.343.000	100	230.277.000	100	253.305.000	100	253.305.000	DINAS PM & PTSP
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	%	100	283.845.000	100	512.229.000	100	563.451.000	100	619.797.000	100	619.797.000	DINAS PM & PTSP
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Cakupan peningkatan pelayanan modal	%	100	143.592.000	100	257.951.000	100	283.746.000	100	312.120.000	100	312.120.000	DINAS PM & PTSP
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	347.573.000	100	382.330.000	100	420.563.000	100	462.619.000	100	462.619.000	DINAS PM & PTSP
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan ketersediaan data dan sistem informasi PM secara elektronik	%	100	51.650.000	100	351.650.000	100	376.265.000	100	410.129.000	100	410.129.000	DINAS PM & PTSP
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.610.763.345	100	2.676.032.429	100	2.836.594.374	100	3.006.790.037	100	3.006.790.037	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	40	654.162.000	45	1.019.578.000	50	1.121.535.000	63	1.233.689.000	63	1.233.689.000	DISPORA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase keolahragaan yang dikembangkan dan ditingkatkan daya Saingnya	%	3,12	1.565.138.000	15,62	8.721.651.000	18,75	2.593.816.000	22,00	2.853.197.000	22,00	2.853.197.000	DISPORA
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Organisasi kepramukaan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kapasitasnya	%	99,13	200.000.000	99,13	520.000.000	100	572.000.000	100	629.200.000	100	629.200.000	DISPORA
<b>2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>													
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	70	133.617.200	75	246.978.000	80	271.675.000	85	298.843.000	85	298.843.000	DISKOMINFO
<b>2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>													

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan digital informasi	%	50	19.042.000	55	119.042.000	60	127.374.000	65	138.838.000	65	138.838.000	DISKOMINFO
<b>2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>													
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%	46,30	932.033.500	51,26	1.025.236.000	59,26	1.127.759.000	78,08	1.240.535.000	78,08	1.240.535.000	DIKBUD
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang didaftarkan	%	100	661.704.650	100	727.875.000	100	800.662.000	100	880.728.000	100	880.728.000	DIKBUD
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Pengelolaan Museum Daerah	%			100	100.000.000	100	107.000.000	100				DIKBUD
<b>2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.393.247.169	100	2.453.078.348	100	2.600.263.049	100	2.756.278.832	100	2.756.278.832	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	50	397.925.800	55	537.718.000	60	591.489.000	65	650.638.000	65	650.638.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka Dan Naskah Kuno	%	10	1.907.500	20	100.907.000	30	110.997.000	40	122.097.000	40	122.097.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>													
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase SKPD tertib administrasi kearsipan	%	42	63.848.000	62	200.000.000	88	220.000.000	100	242.000.000	100	242.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip yang mendapat perlindungan dan diselamatkan	%	6	43.516.000	12	200.000.000	18	220.000.000	34	242.000.000	34	242.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase SOP arsip yang dibuat	%	30	10.763.000	60	100.000.000	80	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>													
<b>3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.294.015.687	100	4.401.366.079	100	4.665.448.044	100	4.945.374.927	100	4.945.374.927	DINAS PERIKANAN
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	2	2.515.437.600	2	2.766.981.000	2	3.043.679.000	3	3.348.047.000	3	3.348.047.000	DINAS PERIKANAN
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	%	0,40	2.635.790.600	0,79	2.899.369.000	1,39	3.189.305.000	2,98	3.508.236.000	2,98	3.508.236.000	DINAS PERIKANAN
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%	8	714.285.000	14	785.713.000	18	864.284.000	21	950.712.000	21	950.712.000	DINAS PERIKANAN
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.514.779.764	100	3.602.649.258	100	3.818.808.214	100	4.047.936.706	100	4.047.936.706	DINAS PARIWISATA
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%	2,4	767.245.000	2,6	1.043.969.000	2,8	1.148.365.000	3	1.263.202.000	3	1.263.202.000	DINAS PARIWISATA
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Presentase Promosi Wisata	%	90	368.789.000	92	405.667.000	94	446.233.000	96	490.857.000	96	490.857.000	DINAS PARIWISATA
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rasio Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan Haki	%	15	225.388.000	20	247.926.000	25	272.718.000	30	299.990.000	30	299.990.000	DINAS PARIWISATA

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja disektor Pariwisata yang disertifikasi	%	94	318.714.600	96	550.586.000	98	605.644.000	100	666.209.000	100	666.209.000	DINAS PARIWISATA
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>													
<b>TANAMAN PANGAN &amp; HORTIKULTURA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	11.145.577.689,00	100	11.424.217.131	100	11.995.427.988	100	12.835.107.947	100	12.835.107.947	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	2	1.717.148.500	3	1.888.863.000	4	2.077.749.000	5	2.285.524.000	5	2.285.524.000	DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%	2		3		4		5		5		DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%	2		3		4		5		5		DISTANHORTI
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	4,05	2.732.988.000	5,19	3.006.286.000	6,17	3.306.914.000	6,98	3.637.606.000	6,98	3.637.606.000	DISTANHORTI
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang dikendalikan	%	96,05	584.536.000	94,71	642.989.000	92,14	707.287.000	90,34	778.016.000	90,34	778.016.000	DISTANHORTI
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Madya Pertanian	%	19,47	7.952.797.400	28,92	8.748.077.000	38,37	9.622.884.000	47,83	10.585.173.000	47,83	10.585.173.000	DISTANHORTI
<b>PERKEBUNAN &amp; PETERNAKAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.674.784.931,00	100	4.791.654.554	100	5.193.395.999	100	5.385.045.479	100	5.385.045.479	
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%	7,50	2.354.362.200	8,50	2.589.798.000	9,00	2.848.777.000	9,50	3.133.655.000	9,50	3.133.655.000	DISBUNNAK
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5		5		5		5		5		DISBUNNAK
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana perkebunan	%	3,16	1.209.791.645	4,08	1.330.770.000	5,88	1.463.847.000	6,48	1.610.231.000	6,48	1.610.231.000	DISBUNNAK
	Persentase Peningkatan Prasarana peternakan	%	1		2		2		2		2		DISBUNNAK
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan hewan/Ternak	%	11,6	267.040.300	12,8	293.744.000	14,11	323.118.000	15,5	355.430.000	15,5	355.430.000	DISBUNNAK
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas serangan OPT Perkebunan yang dikendalikan	%	66	131.198.200	65	144.318.000	63	158.749.000	61	174.624.000	61	174.624.000	DISBUNNAK
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelompok Tani Madya Perkebunan dan Peternakan	%	5,8	358.231.000	7,0	394.055.000	8,0	433.460.000	9,0	476.806.000	9,0	476.806.000	DISBUNNAK
<b>3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>													
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin	%			43,22	100.000.000	44,33	107.000.000	45,44	116.630.000	45,44	116.630.000	DISPERINDAG
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar daerah dalam Kondisi baik	%	60,71	999.900.000	64,29	1.099.890.000	67,86	1.209.879.000	71,43	1.330.866.000	71,43	1.330.866.000	DISPERINDAG
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas dan Jumlah Harga bahan Kebutuhan Pokok	%	30,77	218.258.000	38,46	440.083.000	53,85	484.091.000	69,23	532.500.000	69,23	532.500.000	DISPERINDAG
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Perkembangan Ekspor	%	2	931.735.400	2,5	1.024.908.000	2,5	1.127.398.000	3	1.240.138.000	3	1.240.138.000	DISPERINDAG
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	%	85	150.488.000	90	465.536.000	95	512.089.000	98	563.298.000	98	563.298.000	DISPERINDAG

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Perkembangan Nilai Perdagangan Produk Dalam Negeri	%	25	41.200.000	28	141.200.000	28	151.084.000	30	164.681.000	30	164.681.000	DISPERINDAG
<b>3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.474.932.790	100	4.586.806.110	100	4.862.014.476	100	5.153.735.345	100	5.153.735.345	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Pembangunan Industri	%	25	1.422.065.000	50	1.564.271.000	75	1.720.698.000	100	1.892.767.000	100	1.892.767.000	DISPERINDAG
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Industri yang Memiliki Izin Usaha	%			3,30	100.000.000	4,43	107.000.000	5,57	116.630.000	5,57	116.630.000	DISPERINDAG
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Peningkatan Industri yang terpublikasi melalui SIINas	%	60	80.430.000	65	108.473.000	70	119.320.000	75	131.252.000	75	131.252.000	DISPERINDAG
<b>3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>													
3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi penetapannya	%	100	62.543.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS NAKERTRANS
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembangunan	%	100	53.696.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS NAKERTRANS
3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembinaannya	%	100	50.333.800	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	121.000.000	DINAS NAKERTRANS
<b>4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>4.01 SEKRETARIAT DAERAH</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	54.495.109.452	100	55.857.487.188	100	59.208.936.420	100	62.761.472.605	100	62.761.472.605	SETDA
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	14.210.352.400	100	15.631.387.000	100	17.194.525.000	100	18.913.978.000	100	18.913.978.000	SETDA
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	1.200.136.000	100	1.320.149.000	100	1.452.163.000	100	1.597.380.000	100	1.597.380.000	SETDA
<b>4.02 SEKRETARIAT DPRD</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	24.353.581.249	100	24.962.420.780	100	26.460.166.027	100	28.047.775.989	100	28.047.775.989	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	11.214.502.200	100	12.335.952.000	100	13.569.547.000	100	14.926.501.000	100	14.926.501.000	SEKRETARIAT DPRD
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>5.01 PERENCANAAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	6.834.995.891	100	9.176.745.686	100	9.727.350.427	100	10.310.991.452	100	10.310.991.452	BAPPEDA
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	2.052.732.600	100	3.258.005.000	100	3.583.805.000	100	3.942.186.000	100	3.942.186.000	BAPPEDA
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sasaran Program dan Kegiatan RKPD yang Konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	%	100	1.320.572.700	100	1.952.629.000	100	2.147.891.000	100	2.362.681.000	100	2.362.681.000	BAPPEDA
<b>5.02 KEUANGAN</b>													
<b>BKAD</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	19.150.114.739,00	100	19.628.867.607	100	20.806.599.664	100	22.054.995.644	100	22.054.995.644	BKAD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase capaian kinerja tata kelola keuangan daerah	%	82	175.542.999.800	87	179.850.573.913	90	203.900.943.291	95	223.683.568.485	95	223.683.568.485	BKAD
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	%	82	2.751.840.400	86	2.889.432.000	87	3.178.375.000	90	3.496.212.000	90	3.496.212.000	BKAD
<b>BAPENDA</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	8.841.126.770,00	100	9.062.154.939	100	9.605.884.236	100	10.182.237.290	100	10.182.237.290	BAPENDA
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	%	100	2.423.004.000	100	2.802.896.000	100	3.083.185.000	100	3.391.504.000	100	3.391.504.000	BAPENDA
<b>5.03 KEPEGAWAIAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	3.506.022.404	100	3.593.672.964	100	3.809.293.342	100	4.037.850.942	100	4.037.850.942	BKPSDM
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%	100	1.064.009.000	100	1.170.409.000	100	1.287.449.000	100	1.416.194.000	100	1.416.194.000	BKPSDM
<b>5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>													
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	80	2.344.833.000	80	4.579.316.000	80	5.037.247.000	80	5.540.972.000	80	5.540.972.000	BKPSDM
<b>5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.441.815.304	100	2.502.860.687	100	2.653.032.328	100	2.812.214.267	100	2.812.214.267	BALITBANG
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	%	100	1.601.490.500	100	2.061.639.000	100	2.267.802.000	100	2.494.583.000	100	2.494.583.000	BALITBANG
<b>6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>													
<b>6.01 INSPEKTORAT DAERAH</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	4.746.562.245	100	4.983.890.357	100	5.282.923.779	100	5.599.899.205	100	5.599.899.205	INSPEKTORAT
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%	100	2.055.324.400	100	3.760.856.000	100	4.136.941.000	100	4.550.635.000	100	4.550.635.000	INSPEKTORAT
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Kebijakan Teknis Asistensi dan Pendampingan yang dirumuskan	%	100	1.479.727.600	100	3.127.700.000	100	3.440.470.000	100	3.784.517.000	100	3.784.517.000	INSPEKTORAT
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>													
<b>7.01 KECAMATAN</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	49.526.685.150	100	50.764.852.279	100	53.810.743.415	100	57.039.388.020	100	57.039.388.020	KECAMATAN
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	869.436.444	100	921.602.000	100	986.114.100	100	1.074.864.000	100	1.074.864.000	KECAMATAN
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	18.501.350.335	100	19.611.431.000	100	20.984.231.100	100	22.872.811.000	100	22.872.811.000	KECAMATAN
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	8.100.000	100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	KECAMATAN
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Desa/ Kelurahan	%	100	6.000.000	100	100.000.000	100	107.000.000	100	116.630.000	100	116.630.000	KECAMATAN
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>													
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	2.418.656.411	100	2.479.122.821	100	2.627.870.191	100	2.785.542.402	100	2.785.542.402	KESBANGPOL
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	80	209.486.000	85	230.434.000	90	253.477.000	95	278.825.000	95	278.825.000	KESBANGPOL

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN KINERJA								KONDISI AKHIR		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2021		2022		2023		2024		K	Rp.	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pemahaman Politik dan Demokrasi	%	80	844.174.000	85	928.591.000	90	1.021.450.000	100	1.123.595.000	100	1.123.595.000	KESBANGPOL
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang diawasi	%	80	101.304.000	85	211.434.000	90	232.577.000	100	255.835.000	100	255.835.000	KESBANGPOL
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%	85	287.808.000	88	316.588.000	90	348.246.000	92	383.071.000	92	383.071.000	KESBANGPOL
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	%	85	889.707.400	90	1.178.678.000	90	1.296.545.800	100	1.426.200.000	100	1.426.200.000	KESBANGPOL
				1.298.165.030.858		1.395.527.408.172		1.500.191.963.785		1.612.706.361.069		1.612.706.361.069	

## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan IKU perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah.

Penetapan IKU daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2019-2024 hingga akhir periode masa jabatan. IKU pemerintah daerah Kabupaten Kolaka memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU perangkat daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU daerah memiliki makna bahwa perangkat daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah dalam pencapaian indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran dari setiap misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kolaka.

#### **8.1. Indikator Kinerja Utama**

IKU pemerintah daerah Kabupaten Kolaka tahun 2019-2024 dapat disajikan pada Tabel 8.1 berikut ini:

**Tabel 8.1**  
**Indikator Kinerja Utama**

Nomor	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018/2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
<b>A. INDIKATOR TUJUAN</b>									
1.	Indeks Daya Saing Infrastruktur	indeks	n/a	65	68	71	75	78	78
2.	Angka Kemiskinan	%	12,51	11,72	11,25	10,65	10,02	9,81	9,81
3.	Nilai IPM	indeks	73,01	74	74,5	75	75,5	76	76
4.	Nilai PDRB AHK	Rp. (Milyar)	16.802,49	17.643	18.701	19.823	21.211	22.696	22.696
5.	Indeks Kebebasan Sipil	indeks	n/a	80	85	88	90	92	92
6.	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	n/a	B	B	B	BB	BB	BB

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nomor	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018/2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	skor	n/a	60	69,9	70,25	70,6	70,94	70,94
<b>B.</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>								
1.	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	56,65	62	65	68	71	75	75
2.	Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam	%	65	67	75	80	85	90	85
3.	Persentase RT berakses air bersih	%	79,47	80	82	85	90	95	95
4.	Persentase RT bersanitasi	%	80,64	82	85	88	92	95	95
5.	Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik	%	16,67	20	20	25	30	35	35
6.	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	34,72	30	25	20	10	0	0

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Nomor	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018/2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
	yang ditangani secara terpadu								
7.	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Rp (ribuan)/bulan	12.243	12.543	12.843	13.143	13.443	13.743	13.743
8.	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,18	2,10	4,00	3,50	2,50	2,00	2,00
9.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	87	89,6	97,0	97,5	98,0	98,5	98,5
10.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	%	6,68	7,3	4,5	5,5	6,0	6,5	6,5
11.	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan	%	18,71	19,32	19,44	19,53	19,98	20	20
12.	Nilai investasi	Rp (milyar)	58,23	65	80	81,5	83,5	85	85
13.	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13	13,25	13,75	13,97	14	14

Nomor	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018/2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
14.	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,33	9	9,25	9,50	9,75	9,75
15.	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,3	71,2	71,5	71,8	72	72
16.	Prevalensi Stunting Balita	%	26,9	26,8	15	14,75	14,50	14,25	14,25
17.	TFR	Rata-rata Anak Perwanita	2,69	2,65	2,63	2,58	2,52	2,50	2,50
18.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,59	89,78	90	90,1	90,2	90,3	90,3
19.	Predikat Kabupaten Layak Anak	Skor	251	500 Pratama	600 Pratama	650 Madya	700 Madya	750 Nindya	750 Nindya
20.	Presentase peningkatan kapasitas kepemudaan dan Prestasi olahraga	%	-	80	85	90	95	95	95
21.	Persentase lembaga adat dan budaya yang terbina	%	18,1	20	20	45	50	55	65
22.	Persentase PMKS yang tertangani	%	46,44	50	50	55	60	65	70
23.	Indeks kerukunan umat beragama	indeks	75	80	80	80	85	85	85
24.	Nilai AKIP kabupaten	indeks	CC	B	B	B	BB	BB	BB

Nomor	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal (2018/2019)	Target Capaian					Kondisi Akhir
				2020	2021	2022	2023	2024	2024
25.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan daerah	indeks	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	Indeks Desa Membangun	indeks	N/A	0,5	0,65	0,67	0,69	0,71	0,71
27.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	N/A	Baik	baik	baik	sangat baik	sangat baik	sangat baik
28.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah	indeks	N/A	65	77	80	84	88	88
29.	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	10	20	7	8,5	10	11,5	11,5
30.	Pencapaian Adipura	Tercapai/Tidak Tercapai	n/a	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai
31.	Persentase Desa/Kel Tangguh Bencana	%	27,3	40,9	45,83	62,5	79,17	100	100

## **8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

IKU perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan aspek bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Indikator ini berada pada *level intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU perangkat daerah ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya sebagaimana disajikan pada Tabel 8.2 sebagai berikut:

**Tabel 8.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>I. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>1.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI</b>										
1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	6,68	7,3	4,5	5,5	6,0	6,5	6,5	
1.1.2	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/tahun	12,243	12,543	12,843	13,143	13,443	13,743	13,743	
1.1.3	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	73,01	74	74,5	75	75,5	76	76	
1.1.4	Persentase Penduduk Miskin	%	11,92	11,72	11,25	10,65	10,02	9,81	9,81	
1.1.5	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,69	5,29	2,05	2,05	2	2	2	
1.1.6	Laju Inflasi	%	3,22	1,38	2	2	2	2	2	
<b>1.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>										
1.2.1	Angka Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,31	8,33	9	9,25	9,50	9,75	9,75	

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
1.2.2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,98	13	13,25	13,75	13,97	14	14	
1.2.3	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,06	70,3	71,2	71,5	71,8	72	72	
1.2.4	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak perwanita	2,69	2,65	2,63	2,58	2,52	2,5	2,5	
1.2.5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,59	89,79	90	90,1	90,2	90,3	90,3	
1.2.6	Persentase Lembaga Adat dan Budaya yang terbina	%	18,1	20	45	50	55	65	65	
1.2.7	Indeks Kebebasan Sipil	Indeks	n/a	80	85	88	90	92	92	
1.2.8	Persentase PMKS yang tertangani	%	46,44	50	55	60	65	70	70	
1.2.9	Indeks kerukunan umat beragama	indeks	75	80	80	85	85	85	85	
<b>II. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
<b>2.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH</b>										
<b>2.1.1</b>	Pengeluaran per Kapita	Ribu Rp/tahun	12,243	12,543	12,843	13,143	13,443	13,743	13,743	
<b>2.1.2</b>	Persentase pertumbuhan PAD	%	4,1	5	5	5	5	5	5	

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
2.1.3	Indeks Desa Membangun	indeks	N/A	0,5	0,56	0,61	0,63	0,65	0,65	
2.1.4	Prosentase tenaga kerja yang terdaftar dan ditempatkan.	%	26,71	21,48	22,42	23,25	25	26	26	
2.1.5	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih	Orang	n/a	500	750	750	1000	1200	1200	
2.1.6	Laju pertumbuhan penduduk.	%	2,22	2,02	1,82	1,61	1,41	1,21	1,21	
<b>2.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR</b>										
2.2.1	Indeks Daya Saing Infrastruktur	indeks	75	79,33	81,33	83,67	87	90	90	
2.2.2	Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75	76	77	78	79	80	80	
2.2.3	Persentase ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tanam	%	65	67	70	75	80	85	85	
2.2.4	Persentase RT berakses air bersih	%	79,47	80	82	85	90	95	95	
2.2.5	Persentase RT bersanitasi	%	80,64	82	85	88	92	95	95	

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
2.2.6	Persentase Ruas Jalan dengan PJU yang berfungsi baik	%	16,67	20	25	30	35	40	40	
2.2.7	Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	Ha	34,72	30	25	20	10	0	0	
<b>III. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>										
3.1.1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>									
3.1.1.1	<b>Pendidikan</b>									
	APK SD	%			103,91	104,5	105	105,8	105,8	DINAS DIKBUD
	APK SMP	%			79,83	80	80,1	80,2	80,2	DINAS DIKBUD
	APM SD	%			99,25	99,3	99,45	99,5	99,5	DINAS DIKBUD
	APM SMP	%			73	73,5	75,1	75,8	75,8	DINAS DIKBUD
	persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	%				100	100	100	100	DINAS DIKBUD

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Distribusi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan ( Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	%			97,58	98,87	99,26	99,82	99,82	DINAS DIKBUD
	Persentase Lembaga yang memenuhi persyaratan pemberian izin operasional	%				100	100	100	100	DINAS DIKBUD
	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah	%				40	45	50	50	DINAS DIKBUD
<b>3.1.1.2</b>	<b>Kesehatan</b>									
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN lengkap)	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	%			100	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung RS Rujukan	%			0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	DINAS KESEHATAN

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase RS rujukan tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	%			50	100	100	100	100	DINAS KESEHATAN
	Prevalensi stunting pada balita	%			15,2	14,8	14,4	14	14	DINAS KESEHATAN
	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang kompeten dengan STR	%			76	77	78	80	80	DINAS KESEHATAN
	Persentase sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%			86	87	88	89	89	DINAS KESEHATAN
	Cakupan penyelenggaraan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%			72	75	78	80	80	DINAS KESEHATAN
<b>3.1.1.3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
	Rasio Luas Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi (Potensial)	%			78	80	82	83	83	DINAS PUPR

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Masyarakat Terakses Air Minum Layak	%			80	83	85	90	90	DINAS PUPR
	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%			85	88	90	95	95	DINAS PUPR
	Rasio Sistem panjang drainase yang berfungsi dengan baik	%			45	60	65	70	70	DINAS PUPR
	Rasio Kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	%			11	12	14	15	15	DINAS PUPR
	Rasio Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	%			11	12	13	14	14	DINAS PUPR
	Rasio Jalan Mantap	%			68	70	73	75	75	DINAS PUPR
	Rasio tenaga konstruksi/operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%			40	50	60	70	70	DINAS PUPR

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Rasio Penerbitan Pertimbangan Teknis yang Sesuai Pemanfaatan Tata Ruang (RTRW/RDTR)	%			93	94	95	96	96	DINAS PUPR
<b>3.1.1.4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>									
	Persentase Rumah Layak Huni	%			92	93	94	95	95	DINAS PKP
	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	%			1	1	1	1	1	DINAS PKP
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%			8	7	6	5	5	DINAS PKP
	Persentase Ruas jalan yang tersedia sarana PJU dengan baik	%			11,91	13	14	15	15	DINAS PKP
<b>3.1.1.5</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat</b>									
	Persentase Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman Umum	%			100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Peratuaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Ditegakkan	%			100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%			100	100	100	100	100	SATPOL PP DAMKAR
	Persentase Penanggulangan Bencana	%			100	100	100	100	100	BPBD
<b>3.1.1.6</b>	<b>Sosial</b>									
	Persentase PSKS yang di berdayakan	%			40	60	80	100	100	DINAS SOSIAL
	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan PMKS Lainnya yang terpenuhi kebutuhan Dasarnya diluar Panti Mendapatkan penanganan	%			100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	%			81	83	85	87	87	DINAS SOSIAL
	Persentase penanganan bencana	%			100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
	Persentase capaian kondisi Taman Makam Pahlawan yang dikelola				50	60	70	80	80	DINAS SOSIAL
<b>3.1.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>									
<b>3.1.2.1</b>	<b>Tenaga Kerja</b>									
	Persentase Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun	%				100	100	100	100	DINAS NAKERTRANS
	Persentase lembaga yang menerapkan Program peningkatan Produktivitas	%			18	20	22	23	23	DINAS NAKERTRANS
	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%			71,00	71,50	72,00	72,50	72,50	DINAS NAKERTRANS

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%			100	100	100	100	100	DINAS NAKERTRANS
<b>3.1.2.2</b>	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>									
	Persentase pemenuhan pelebagaan PUG	%			44	50	60	70	70	DINAS P3A
	Persentase pendampingan korban kekerasan pada perempuan	%			100	100	100	100	100	DINAS P3A
	Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga	%				16,7	17,7	19,3	19,3	DINAS P3A
	Persentase OPD yang memiliki data terpilah gender	%			40	50	70	100	100	DINAS P3A

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%			100	100	100	100	100	DINAS P3A
	Persentase pendampingan korban kekerasan pada anak	%			100	100	100	100	100	DINAS P3A
<b>3.1.2.3</b>	<b>Pangan</b>									
	Persentase pencapaian kemandirian pangan	%			80	90	100	100	100	DISKETAPANG
	Ketersediaan Energi Per Kapita/Hari	Kkal/kap/Thn			2400	2400	2400	2400	2400	DISKETAPANG
	Ketersediaan Protein Per Kapita/Hari	Gram/kap/Thn			63	63	63	63	63	DISKETAPANG
	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	%			85	90	100	100	100	DISKETAPANG
	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan	%			90	95	100	100	100	DISKETAPANG
<b>3.1.2.4</b>	<b>Pertanahan</b>									
	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	%			100	100	100	100	100	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>3.1.2.5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>									
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dikaji	%			100	100	100	100	100	DLH
	Persentase Peningkatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	%			90	90	90	90	90	DLH
	Persentase Pengelolaan RTH Perkotaan	%			55	60	65	70	70	DLH
	Persentase Pembinaan Pengelola Limbah B3	%			100	100	100	100	100	DLH
	Persentase ketaatan izin PPLH	%			100	100	100	100	100	DLH
	Persentase capaian penghargaan lingkungan hidup	%			100	100	100	100	100	DLH
	Persentase Aduan yang ditindak lanjuti	%			100	100	100	100	100	DLH
	Persentase Pengelolaan Sampah Perkotaan	%			96	97	98	99	99	DLH
<b>3.1.2.6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Capil</b>									

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Pendaftaran Penduduk	%			97,66	97,67	97,69	97,70	97,70	DINAS DUKCAPIL
	Persentase Pencatatan Sipil yang di terbitkan	%			53	54	55	56	56	DINAS DUKCAPIL
	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan yang di kelola	%			90,99	90,99	90,99	90,99	90,99	DINAS DUKCAPIL
	Persentase Profil Kependudukan yang di kelola	%			55,88	73,52	88	100	100	DINAS DUKCAPIL
<b>3.1.2.7</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>									
	Persentase Desa/Kel. yang tertata	%			15	17	17	17	17	DINAS PMD
	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	%			5	10	25	35	35	DINAS PMD
	Persentase desa dengan pengelolaan adminisrasi pemerintahan desa yang akuntabel	%			72	75	78	80	80	DINAS PMD
	Persentase Lembaga Adat dan Masyarakatat Hukum	%			63	65	67	70	70	DINAS PMD

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Adat yang di berdayakan									
<b>3.1.2.8</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>									
	Persentase laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%		1,82	1,61	1,41	1,21	1,21		DINAS P2KB
	Persentase Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk	%			50	65	80	80		DINAS P2KB
	Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah Usia 15 - 49 tahun	%		72,75	73,13	73,51	73,89	73,89		DINAS P2KB
	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	%		6,19	5,89	5,59	5,29	5,29		DINAS P2KB

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase keikutsertaan ber KB pasangan Usia Subur (PUS) anggota BKB, BKR, BKL dan kelompok UPPKS	%			50	60	70	80	80	DINAS P2KB
<b>3.1.2.9</b>	<b>Perhubungan</b>									
	Presentase fasilitas/ perlengkapan jalan kabupaten yang terpelihara	%			30	35	40	45	45	DISHUB
<b>3.1.2.10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>									
	Persentase masyarakat yang terpapar informasi publik	%			60	65	70	75	75	DISKOMINFO
	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan layanan SPBE	%			85	90	95	100	100	DISKOMINFO
<b>3.1.2.11</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
	Persentase KSP/USP yang telah memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam	%			9,83	14,34	22,54	28,68	28,68	DINAS KOP-UKM

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Koperasi bersertifikat NIK	%			30	35	40	50	50	DINAS KOP-UKM
	Persentase KSP/USP Yang Sehat	%			6,15	8,20	10,25	12,30	12,30	DINAS KOP-UKM
	Persentase Anggota Koperasi yang terlatih	%			3,09	4,32	5,55	6,89	6,89	DINAS KOP-UKM
	Persentase Anggota Usaha Mikro yang terlatih	%			4,08	5,10	6,12	7,14	7,14	DINAS KOP-UKM
	Persentase Usaha Koperasi yang berkembang	%			6,3	7,87	9,84	12,01	12,01	DINAS KOP-UKM
	Persentase Usaha Mikro menjadi Wirausaha	%			0,98	1,2	2,00	3,5	3,5	DINAS KOP-UKM
	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	%			0,12	0,2	0,31	0,47	0,47	DINAS KOP-UKM
<b>3.1.2.12</b>	<b>Penanaman Modal</b>									
	Cakupan pengembangan iklim penanaman modal	%			100	100	100	100	100	DINAS PM & PTSP
	Cakupan peningkatan promosi penanaman modal	%			100	100	100	100	100	DINAS PM & PTSP
	Cakupan peningkatan pelayanan modal	%			100	100	100	100	100	DINAS PM & PTSP

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%			100	100	100	100	100	DINAS PM & PTSP
	Cakupan ketersediaan data dan sistem informasi PM secara elektronik	%			100	100	100	100	100	DINAS PM & PTSP
<b>3.1.2.13</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>									
	Persentase Pemuda dan Organisasi Kepemudaan yang dibina	%			40	45	50	63	63	DISPORA
	Persentase keolahragaan yang dikembangkan dan ditingkatkan daya Saingnya	%			3,12	15,62	18,75	22,00	22,00	DISPORA
	Persentase Organisasi kepramukaan yang dikembangkan dan ditingkatkan Kapasitasnya	%			99,13	99,13	100	100	100	DISPORA
<b>3.1.2.14</b>	<b>Statistik</b>									

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%			70	75	80	85	85	DISKOMINFO
<b>3.1.2.15</b>	<b>Persandian</b>									
	Persentase pengamanan digital informasi	%			50	55	65	75	75	DISKOMINFO
<b>3.1.2.16</b>	<b>Kebudayaan</b>									
	Persentase Sanggar Seni dan Budaya yang dibina	%			46,30	51,26	59,26	78,08	78,08	DINAS DIKBUD
	Persentase Cagar Budaya yang didaftarkan	%			100	100	100	100	100	DINAS DIKBUD
	Persentase Pengelolaan Museum Daerah	%				100	100	100		DINAS DIKBUD
<b>3.1.2.17</b>	<b>Perpustakaan</b>									
	Persentase nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%			50	55	60	65	65	DINAS PERPUS & ARSIP
	Persentase Peningkatan Pelestarian Bahan Pustaka Dan Naskah Kuno	%			10	20	30	40	40	DINAS PERPUS & ARSIP

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>3.1.2.18</b>	<b>Kearsipan</b>									
	Persentase SKPD tertib administrasi kearsipan	%			42	62	88	100	100	DINAS PERPUS & ARSIP
	Persentase arsip yang mendapat perlindungan dan diselamatkan	%			6	12	18	34	34	DINAS PERPUS & ARSIP
	Persentase SOP arsip yang dibuat	%			30	60	80	100	100	DINAS PERPUS & ARSIP
<b>3.2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									
<b>3.2.1</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>									
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%			2	2	2	3	3	DINAS PERIKANAN
	Persentase peningkatan produksi budidaya perikanan	%			0,40	0,79	1,39	2,98	2,98	DINAS PERIKANAN
	Persentase Produksi Hasil Olahan Perikanan	%			8	14	18	21	21	DINAS PERIKANAN
<b>3.2.2</b>	<b>Pariwisata</b>									

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	%			2,4	2,6	2,8	3	3	DINAS PARIWISATA
	Presentase Promosi Wisata	%			90	92	94	96	96	DINAS PARIWISATA
	Rasio Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan perlindungan Hak	%			15	20	25	30	30	DINAS PARIWISATA
	Persentase Tenaga Kerja disektor Pariwisata yang disertifikasi	%			94	96	98	100	100	DINAS PARIWISATA
<b>3.2.3</b>	<b>Pertanian</b>									
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%			2	3	4	5	5	DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lainnya	%			2	3	4	5	5	DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	%			2	3	4	5	5	DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%			4,05	5,19	6,17	6,98	6,98	DISTANHORTI
	Persentase luas serangan OPT	%			96,05	94,71	92,14	90,34	90,34	DISTANHORTI

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Tanaman Pangan yang dikendalikan									
	Persentase Kelompok Tani Madya Pertanian	%			7,50	8,50	9,00	9,50	9,50	DISTANHORTI
	Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	%			5	5	5	5	5	DISBUNAK
	Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%			3,16	4,08	5,88	6,48	6,48	DISBUNAK
	Persentase Peningkatan Prasarana perkebunan	%			1	2	2	2	2	DISBUNAK
	Persentase Peningkatan Prasarana peternakan	%			11,6	12,8	14,11	15,5	15,5	DISBUNAK
	Persentase Kesehatan hewan/Ternak	%			66	65	63	61	61	DISBUNAK
	Persentase luas serangan OPT Perkebunan yang dikendalikan	%			5,8	7,0	8,0	9,0	9,0	DISBUNAK
<b>3.2.4</b>	<b>Perdagangan</b>									
	Persentase Pasar daerah dalam Kondisi baik	%			30,77	38,46	53,85	69,23	69,23	DISPERINDAG

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase Stabilitas dan Jumlah Harga bahan Kebutuhan Pokok	%			2	2,5	2,5	3	3	DISPERINDAG
	Persentase Perkembangan Ekspor	%			85	90	95	98	98	DISPERINDAG
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang berlaku	%			25	28	28	30	30	DISPERINDAG
	Persentase Perkembangan Nilai Perdagangan Produk Dalam Negeri	%			30,77	38,46	53,85	69,23	69,23	DISPERINDAG
<b>3.2.5</b>	<b>Perindustrian</b>									
	Persentase Realisasi Pembangunan Industri	%			25	50	75	100	100	DISPERINDAG
	Persentase Industri yang Memiliki Izin Usaha	%				3,30	4,43	5,57	5,57	DISPERINDAG
	Persentase Peningkatan Industri yang terpublikasi melalui SIINas	%			60	65	70	75	75	DISPERINDAG

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	<b>Transmigrasi</b>									
	Persentase Kawasan yang difasilitasi penempatannya	%			100	100	100	100	100	DINAS NAKERTRANS
	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembangunan	%			100	100	100	100	100	DINAS NAKERTRANS
	Persentase Kawasan yang difasilitasi pembinaannya	%			100	100	100	100	100	DINAS NAKERTRANS
<b>3.3</b>	<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
<b>3.3.1</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>									
	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%			100	100	100	100	100	SETDA
	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%			100	100	100	100	100	SETDA
	Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Perekonomian dan Pembangunan	%			100	100	100	100	100	SETDA

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
3.3.2	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									
	Cakupan peningkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%			100	100	100	100	100	SEKRETARIAT DPRD
3.4	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
3.4.1	<b>Perencanaan</b>									
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dengan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%			100	100	100	100	100	BAPPEDA
	Persentase Sasaran Program dan Kegiatan RKPD yang Konsisten dengan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah	%			100	100	100	100	100	BAPPEDA
3.4.2	<b>Keuangan</b>									

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Persentase capaian kinerja tata kelola keuangan daerah	%			100	100	100	100	100	BKAD
	Persentase capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	%			100	100	100	100	100	BKAD
	Persentase Realisasi Penerimaan PAD	%			100	100	100	100	100	BAPENDA
<b>3.4.3</b>	<b>Kepegawaian</b>									
	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	%			100	100	100	100	100	BKPSDM
<b>3.4.4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>									
	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%			100	100	100	100	100	BKPSDM
<b>3.4.5</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
	Persentase Peningkatan Pemanfaatan hasil Penelitian dan Pengembangan	%			100	100	100	100	100	BALITBANG
<b>3.5</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>									

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
<b>3.5.1</b>	<b>Pengawasan</b>									
	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	%		100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
	Persentase Kebijakan Teknis Asistensi dan Pendampingan yang dirumuskan	%		100	100	100	100	100	100	INSPEKTORAT
<b>3.6</b>	<b>KEWILAYAHAN</b>									
<b>3.6.1</b>	<b>KECAMATAN</b>									
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%		100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%		100	100	100	100	100	100	KECAMATAN
	Persentase Peningkatan Pembinaan dan	%		100	100	100	100	100	100	KECAMATAN

Bab VIII – Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Awal (2018/ 2019)	Target Capaian					Kondisi Pada Akhir Periode	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2020	2021	2022	2023	2024		
	Pengawasan Desa/ Kelurahan									
<b>3.7</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>									
<b>3.7.1</b>	<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>									
	Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%		80	85	90	95	95	KESBANGPOL	
	Persentase Masyarakat yang mendapatkan Pemahaman Politik dan Demokrasi	%		80	85	90	100	100	KESBANGPOL	
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) yang diawasi	%		80	85	90	100	100	KESBANGPOL	
	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya	%		85	88	90	92	92	KESBANGPOL	
	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Dini Daerah dan Kualitas Penanganan Konflik Sosial	%		85	90	90	100	100	KESBANGPOL	

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Bupati Kolaka H.Ahmad Safei, SH.,MH dan Wakil Bupati Kolaka H. Muhammad Jayadin,SE.,ME periode Tahun 2019-2024. Adapun RPJMD Kabupaten Kolaka disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam upaya mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, yaitu : “KABUPATEN KOLAKA YANG SEMAKIN MAJU, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan ke dalam strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang menjadi janji-janji politik Bupati dan Wakil Bupati yang harus diwujudkan selama 5 (lima) tahun.

Pasca diberlakukannya RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024, terdapat dinamika perkembangan daerah maupun nasional dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mempengaruhi perencanaan dalam RPJMD tersebut. Perkembangan dimaksud berupa terbitnya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, berpengaruh terhadap perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kemudian dampak bencana non alam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan membawa implikasi bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Kolaka.

Sehubungan dengan terjadinya perubahan yang mendasar tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka harus melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2019-2024 untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024 dapat dicapai, dengan tetap menjaga keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta dapat menjalankan amanat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dengan melakukan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024.

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 merupakan pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rentan waktu 2019 – 2024.

Dengan Perubahan RPJMD ini, maka ditetapkan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 dengan

berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa.

2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya.
3. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2024 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019 - 2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Kabupaten Kolaka yang semakin Maju, Berkeadilan dan Sejahtera.

**BUPATI KOLAKA,**  
  
**H. AHMAD SAFEI, SH., MH**